NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN AGAM

NOMOR 5 TAHUN 2025
NOMOR 1 TAHUN 2025
TANGGAL 11 AGUSTUS 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **BENNI WARLIS**
   Jabatan : Bupati Agam
   Alamat Kantor : Jl. Sudirman No 1 Lubuk Basung

   bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Agam, dan selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. a. Nama : **ILHAM**
      Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Agam
      Alamat Kantor : Jl. Sudirman No.2 Lubuk Basung

   b. Nama : **HENRIZAL**
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Agam
      Alamat Kantor : Jl. Sudirman No. 2 Lubuk Basung

   c. Nama : **MUHAMMAD RISMAN**
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Agam
      Alamat Kantor : Jl. Sudirman No.2 Lubuk Basung

   d. Nama : **ADERIA**
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Agam
      Alamat Kantor : Jl. Sudirman No. 2 Lubuk Basung

   bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam, dan selanjutnya disebut Pihak Kedua

   Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan

Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah akan disesuaikan kembali dengan kemampuan keuangan daerah pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran *yang menjadi satu* kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Lubuk Basung, 11 Agustus 2025

BUPATI AGAM
Selaku
PIHAK PERTAMA

BENNI WARLIS

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN AGAM
Selaku
PIHAK KEDUA

ILHAM
KETUA

HENRIZAL
WAKIL KETUA

MUHAMMAD RISMAN
WAKIL KETUA

ADERIA
WAKIL KETUA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

Berdasarkan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
3. keadaan yang menyebabkan SiLPA TA sebelumnya harus digunakan dalam Tahun Anggaran berjalan;
4. keadaan darurat; dan/atau
5. keadaan luar biasa.

Selanjutnya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA tersebut dapat berupa terjadinya :

a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
c. perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Perubahan APBD Kabupaten Agam tahun 2025 dikarenakan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan SiLPA Tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.

Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja baik menyebakan perubahan APBD maupun yang tidak menyebabkan perubahan APBD telah dilakukan sebelum perubahan APBD Tahun 2025 sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Agam Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Agam Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Peraturan Bupati Agam Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Agam Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Perubahan KUA Tahun 2025 berisikan gambaran mengenai kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah serta Strategi pencapaian yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dengan substansi perubahan meliputi :

a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;

b. target sasaran pembangunan Daerah;

c. prioritas pembangunan Daerah;

d. penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah;

e. target kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya Perubahan KUA-PPAS Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Agam Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024, disusun dengan menyelaraskan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Republik Indonesia Tahun 2025 serta mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Agam tahun 2021-2026.

Sejalan dengan pelantikan Kepala Daerah tanggal 20 Februari 2025, perlu dilakukan penyesuaian kegiatan yang mendukung program unggulan yang diusung kepala daerah. Dan dalam perkembangan tahun berjalan RKPD Tahun 2025 hingga triwulan I, ditemukan berbagai kondisi yang mengharuskan dilakukannya perubahan atas dokumen RKPD Tahun 2025 Kabupaten Agam, yaitu:

1. Menyesuaikan arah kebijakan, visi, misi, dan prioritas pembangunan dengan kepemimpinan kepala daerah yang baru dilantik. Perubahan ini dimaksudkan agar dokumen perencanaan mampu mengakomodasi program prioritas kepala daerah terpilih yang telah ditetapkan dalam dokumen visi dan misi saat pencalonan, sehingga terdapat keselarasan antara dokumen perencanaan daerah dengan agenda strategis Kepala Daerah.

2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 dan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja dalam APBD, bahwa Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk membatasi Belanja untuk Kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi dan seminar/FGD, mengurangi Belanja Perjalanan Dinas sebesar 50%, menfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik dan melakukan penyesuain belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah.

3. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian rincian Alokasi TKD menurut Provinsi/Kab/Kota dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. APBD Kabupaten Agam mengalami efisiensi:

- Dana Alokasi Khusus Fisik Irigasi sebesar Rp. 6.142.428.000,-
- Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum sebesar 31.337.163.000

Sehingga terjadi pengurangan dana transfer ke Kabupaten Agam sebesar Rp. 37.479.591.000,-

4. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan pendanaan sampai dengan Triwulan I tahun 2025 yang mengharuskan dilakukannya perubahan atas dokumen RKPD Tahun 2025, menyesuaikan dengan efisiensi anggaran yang dilaksanakan sebelumnya.
5. Capaian beberapa target Indikator Kinerja Daerah Tahun 2023 sudah melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2025, sehingga perlu dilakukan penyesuaian target di perubahan RKPD Tahun 2025.
6. Hasil Audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 yaitu ditetapkannya Sisa Lebih Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 39.578.636.185,73 sehingga terdapat selisih dari yang diperkirakan dalam APBD Awal tahun 2025 yaitu berkurang sebesar Rp.18.397.774.021,27 dari proyeksi semula sebesar Rp.57.976.410.207,69 sehingga perlu dilakukan penyesuaian pada Perubahan KUA Tahun 2025.
7. Mengakomodir pergeseran yang dilakukan sebelumnya, yaitu:
   a. Pergeseran pertama, menindaklanjuti,
      1) Surat BKPSDM Nomor 800/32/BKPSDM-2025 tanggal 17 Januari 2025 perihal Permohonan Pergeseran Anggaran bahwa Tenaga Non ASN yang tidak lulus seleksi CPNS dan tidak masuk dalam database, dan Tenaga Non ASN yang masa kerjanya kurang dari 2 Tahun atau yang tidak ikut seleksi PPPK ataupun tidak lulus seleksi administrasi PPPK, maka tidak dapat diangkat kembali sebagai tenaga Non ASN pada Tahun 2025, dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pengadaan barang dan jasa melalui Mekanisme Tenaga Alih Daya (Outsourcing), dan untuk mengakomodir Tenaga Alih Daya terserbut, terlebih dahulu dilakukan penyesuaian Nomenklatur dalam DPA-SKPD Tahun 2025 sesuai Surat Menpan RB Nomor B.1971/SM.01.00/2022 perihal Nomenklatur Jabatan dalam Pendataan Non ASN melalui Pergeseran Anggaran.
      2) PMK Nomor 102 Tahun 2024 tanggal 13 Desember 2024 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian DAU yang ditentukan Penggunaannya, Pemerintah Daerah perlu menyesuaikan kembali Sub Kegiatan yang bersumber dari DAU Diarahkan melalui Pergeseran Anggaran.

3) KMK Nomor 416 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian DAU Tahun 2024 terkait Dukungan Pendanaan TPG THR dan TPG Gaji ke-13 Tahun 2024 bagi Guru ASN di Daerah, yang telah ditransfer ke Kas Daerah pada Desember 2024, maka untuk dapat dilakukannya realisasi terhadap TPG THR dan TPG Gaji ke-13 Tahun 2024 tersebut, terlebih dahulu diakomodir dalam APBD Tahun 2025 melalui Pergeseran Anggaran dengan mengalihkan sebahagian belanja TPG Guru dan Tamsil Guru Tahun 2025 dan menambahkan uraian TPG THR dan TPG Gaji ke-13 Tahun 2024, selanjutnya TPG Guru dan Tamsil Guru Tahun 2025 tersebut akan disesuaikan kembali pada Perubahan APBD Tahun 2025.

b. Pergeseran kedua menindaklanjuti:

1) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efesiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

2) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efesiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun 2025, bahwa Pemerintah Daerah untuk melakukan efesiensi belanja APBD Tahun 2025

3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh (DOP) Pertanian Tahun Anggaran 2025, bahwa Kabupaten Agam menerima alokasi BOP Pertanian Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.351.120.000,- dan sesuai hasil rapat zoom meeting dengan Ditjen Bina Keuda Kementerian Dalam Negeri pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2025, yang menyampaikan bahwa Penyesuaian alokasi BOP Pertanian Tahun 2025 dilakukan melalui pergeseran anggaran.

4) Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025, terdapat penyesuaian anggaran untuk Kader Penyuluh KB yang semula diberkan biaya perjalanan dinas, sesuai Petunjuk Teknis tersebut diatas dialihkan ke Biaya BBM. Begitu juga dengan kegiatan yang bersumber dari DAK Fisik KB juga dilakukan penyesuaian yang mengacu kepada dokumen Rencana Kegiatan (RK) DAK KB Tahun 2025, yang semula dialokasikan pada Belanja Pemeliharaan dialihkan

menjadi Belanja Modal, yaitu untuk rehab Balai Penyuluh KB dan Pengadaan Alat Kesehatan.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2025, program unggulan Kepala Daerah, serta penyesuaian terhadap pagu definitif Dana Perimbangan maka perubahan RKPD Tahun 2025 ini dirasakan sangat penting untuk konsistensi dan keselarasan serta kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Agam dengan lebih efisien dan efektif.

Perubahan KUA-PPAS Tahun 2025 ini merupakan pedoman dalam menyusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025, serta penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang Rasional dan Realistis.
2. Untuk menyesuaikan arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang sistematis, terukur dan rasional.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Dasar hukum penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarasutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarasutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarasutamaan Gender di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuthakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
18. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja dan pemerataan distribusi pendapatan. Dengan kata lain pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Kinerja ekonomi suatu wilayah dapat diukur dengan melihat beberapa indikator seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Gini Rasio dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kinerja perekonomian Agam ditahun 2024 dibandingkan dengan Sumatera Barat dan Nasional disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.1

Capaian Indikator Makro Ekonomi Tahun 2024

	Indikator	Indonesia	Sumatera Barat	Agam
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,03	4,36	4,12
3	TPT (%)	4,91	5,75	4,73
4	IPM	74,20	76,43	75,08
5	Persentase Kemiskinan (%)	8,57	5,97	6,83
6	Gini Rasio	0,381	0,283	0,249

Capaian indikator makro kabupaten Agam tahun 2024 secara umum berada dibawah rata-rata Sumatera Barat. Laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,12 persen, turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 4,52 persen. Angka ini berada dibawah angka pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Barat dan nasional yang masing-masing mencapai 4,36 persen dan 5,03 persen. Angka IPM Agam mencapai 75,08, namun masih berada dibawah capaian provinsi (76,43) dan sedikit lebih baik dibanding nasional (74,20). Angka kemiskinan Agam mencapai 6,83 persen, lebih tinggi dari capaian provinsi (5,97 persen), namun berada dibawah angka nasional (8,57 persen). Indikator yang capaiannya sedikit lebih baik dibandingkan capaian provinsi Sumatera Barat adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan angka gini rasio. Capaian kinerja ekonomi Kabupaten Agam diuraikan secara rinci pada Bab II RKPD, secara ringkas dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik II.1

Capaian Indikator Ekonomi Kabupaten Agam Tahun 2022– 2024



Sumber : BPS 2025

Pertumbuhan ekonomi kabupaten Agam di tahun 2024 sebesar 4,12 persen, sedikit turun dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar 4,52 persen. Penurunan pertumbuhan tersebut menunjukkan terjadinya perlambatan aktivitas ekonomi. Perlambatan tersebut terjadi pada beberapa sektor-sektor lapangan usaha utama, seperti sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Industri Pengolahan dan sektor Konstruksi. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor terbesar penyumbang PDRB dengan nilai mencapai 7,9 triliun rupiah atau secara persentase sebesar 28,26 persen. Pertumbuhan sektor ini turun ditahun 2024 menjadi 1,79 persen, dari sebelumnya sebesar 3,10 persen ditahun 2023. Perlambatan ini tentunya memberikan dampak yang cukup signifikan mengingat sektor ini merupakan sektor yang sangat dominan. Perlambatan ini dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah terjadinya bencana alam yang mengakibatkan kerusakan lahan dan infrastruktur jalan sehingga terganggunya rantai pasok dan logistik produk pertanian. Selanjutnya sektor dominan yang mengalami perlambatan pertumbuhan adalah sektor Industri Pengolahan turun dari 6,6 persen ditahun 2023 menjadi 3,43 persen ditahun 2024. Sektor Konstruksi turun dari 6,02 persen ditahun 2023 menjadi 3,09 persen ditahun 2024.

Tingkat ketimpangan pendapatan di kabupaten Agam dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang positif, dimana angka gini rasio semakin turun. Angka gini rasio tahun 2024 tercatat sebesar 0,249, turun dari tahun 2023 sebesar 0,255 dan tahun 2022 sebesar 0,298. Tingkat ketimpangan pendapatan kabupaten Agam berada pada skala rendah. Berbeda dengan gini rasio, persentase penduduk miskin Kabupaten Agam mengalami peningkatan dari 6,60 persen di tahun 2023 menjadi 6,83 persen pada tahun 2024. Jika dilihat berdasarkan jumlah penduduk, penduduk miskin meningkat dari 33,41 ribu menjadi 34,82 ribu jiwa.

Tingkat pengangguran kabupaten Agam turun dari 4,96 persen di tahun 2023 menjadi 4,73 persen pada tahun 2024. Jika dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, pengangguran terbuka di dominasi tamatan pendidikan tinggi dan SLTA sederajat. Hal ini disebabkan salah satunya karena ketidaksesuaian antara keterampilan atau pendidikan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga mereka sulit mendapatkan pekerjaan yang cocok. Sementara angka IPM kabupaten Agam mengalami peningkatan dari 74,44 ditahun 2023 menjadi 75,08 pada tahun 2024. Meningkatnya angka IPM Agam sejalan dengan peningkatan pada aspek pendidikan, kesehatan. Angka harapan lama sekolah meningkat dari 13,89 tahun menjadi 4,16 tahun , angka rata-rata lama sekolah meningkat dari 9,22 tahun menjadi 9,23 tahun dan angka harapan hidup meningkat dari 74,22 tahun menjadi 74,39 tahun.

Tabel II.2

Capaian dan Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Agam

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi		Proyeksi	
		2023	2024	2025 (Berdasarkan RKPD 2025)	P-RPKD 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,52	4,12	4,89	4,41
2	TPT (%)	4,96	4,73	4,88	4,71
3	IPM	74,44	75,08	75,75	75,75
	Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,22	74,39	74,51	74,51
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,89	14,16	14,39	14,40
	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,22	9,23	9,75	9,75
4	Persentase Kemiskinan (%)	6,60	6,83	6,15	6,50
5	Gini Rasio	0,255	0,249	0,253	0,248

Sumber : Hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2025

Perkembangan indikator makro dikabupaten Agam beberapa tahun kebelakang cukup berfluktuatif. Indikator seperti pertumbuhan ekonomi, pengangguran, IPM dan gini rasio mengalami perkembangan yang cukup positif, walaupun belum mencapai target yang ditetapkan dalam periodesasi RKPD. Sementara indikator kemiskinan menunjukkan perkembangan yang negatif, dimana angka kemiskinan semakin tinggi ditahun 2024. Untuk itu diperlukan arah dan kebijakan untuk lebih meningkatkan capaian makro ekonomi ditahun berikutnya. Beberapa arah kebijakan pembangunan ekonomi kabupaten Agam ke depannya adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peran sektor pertanian dan pariwisata sebagai sektor basis dalam memberikan daya ungkit pertumbuhan ekonomi. Bertumbuhnya ekonomi yang berdampak terhadap peningkaan nilai IPM, turunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran serta turunnya tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dan wilayah.

2. Memperkuat ketahanan pangan daerah dengan menjamin ketersediaan bahan pangan pokok, distribusi, stabilitas harga, pengendalian dan pengawasan mutu bahan pangan masyarakat.

3. Menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penguatan jejaring kerja sama kemitraan dengan swasta perantau dan alumni dalam permodalan usaha, Membangun sistem pengelolaan dana perantau dan sumber permodalan lainnya secara digital dan mendorong terciptanya konsorsium UMKM

4. Meningkatkan daya saing industri pengolahan dan nilai tambah produk melalui fasilitasi industri pengolahan komoditi primer, meningkatkan produktivitas dan akses UKM pada sumberdaya produktif, peningkatan standarisasi, branding dan packaging, pengembangan agroindusri dan agro bisnis.

2.1.1. Evaluasi Perkembangan Indikator Ekonomi Makro

A. Capaian Indikator Makro Pembangunan

Indikator makro pembangunan merupakan ukuran untuk menilai kemajuan ekonomi dan sosial daerah. Indikator ini mencakup berbagai aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, gini rasio dan tingkat pengangguran yang membantu menggambarkan keadaan umum dan arah pembangunan. Capaian indikator makro tersebut diukur oleh BPS, yang datanya dirilis setiap awal tahun. Untuk capaian 2024 akan dihitung diakhir tahun berjalan, sehingga dalam pembahasan aspek kesejahteraan digunakan data capaian terakhir yaitu tahun 2023

a) PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa dari berbagai sektor lapangan usaha yang dihasilkan suatu wilayah dalam periode tertentu. Nilai PDRB Kabupaten Agam ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) tahun 2024 mencapai 27,97 triliun rupiah, meningkat dari tahun 2023 sebesar 26,16 triliun rupiah. Sektor lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar dalam PDRB Kabupaten Agam tahun 2024 adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan nilai 7,90 triliun atau secara persentase mencapai 28,26 persen. Selanjutnya diikuti sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai 5,52 triliun (19,76 persen), sektor Industri Pengolahan dengan nilai 2,89 triliun (10,33 persen) dan sektor Konstruksi dengan nilai 2,53 triliun (9,07 persen). Lebih rinci perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel II.3 :

Nilai, Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Kab. Agam ADHB (miliar)

SEKTOR LAPANGAN USAHA	2023	2024		
	Nilai PDRB (Miliar)	Nilai PDRB (Miliar)	Distribusi (%)	Pertumbuhan (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.378,2	7.906,6	28,26	7,16
Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	5.970,4	6.459,5	23,09	8,19
Kehutanan dan Penebangan Kayu	149,8	157,0	0,56	4,75
Perikanan	1.257,9	1.290,2	4,61	2,57
Pertambangan dan Penggalian	949,6	999,7	3,57	5,27
Industri Pengolahan	2.677,7	2.891,0	10,33	7,97
Pengadaan Listrik dan Gas	5,9	6,2	0,02	5,99
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,0	13,4	0,05	11,36
Konstruksi	2.439,3	2.537,6	9,07	4,03
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.146,1	5.528,5	19,76	7,43
Transportasi dan Pergudangan	1.745,7	1.858,8	6,64	6,47
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	237,4	248,2	0,89	4,53
Informasi dan Komunikasi	1.581,4	1.682,4	6,01	6,39
Jasa Keuangan dan Asuransi	315,8	336,0	1,20	6,41
Real Estate	513,4	565,3	2,02	10,11
Jasa Perusahaan	9,4	9,9	0,04	5,78
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.174,1	1.279,5	4,57	8,98
Jasa Pendidikan	1.405,6	1.477,0	5,28	5,08
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	349,3	380,5	1,36	8,94
Jasa lainnya	221,7	254,9	0,91	15,01
Produk Domestik Regional Bruto	**26.162**	**27.975**	**100,00**	**6,93**

Sumber : BPS Sumatera Barat 2025

Sementara nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2024 mencapai 27,97 triliun rupiah, meningkat dari tahun 2023 sebesar 16,27 triliun rupiah. Sektor lapangan usaha yang bertumbuh cukup tinggi di tahun 2024 adalah sektor Jasa Lainnya dengan pertumbuhan mencapai 11,06 persen dibanding tahun sebelumnya, diikuti sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan pertumbuhan 8,90 persen dan sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan pertumbuhan 8,49 persen. Sementara sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memberikan kontribusi terbesar pembentuk nilai PDRB hanya tumbuh 1,79 persen di tahun 2024. Secara umum laju pertumbuhan ekonomi tahun 2024 mencapai 4,12 persen. Dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi sedikit perlambatan dimana pertumbuhan ekonomi tahun 2023 mencapai 4,52 persen. Hal ini sejalan dengan menurunnya laju pertumbuhan sektor lapangan usaha yang berkontribusi dominan, seperti sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Industri Pengolahan dan sektor Konstruksi.

Lebih rinci perkembanhgan PDRB Atas Dasar Harga Konstan disajikan pada tabel dibawah ini :

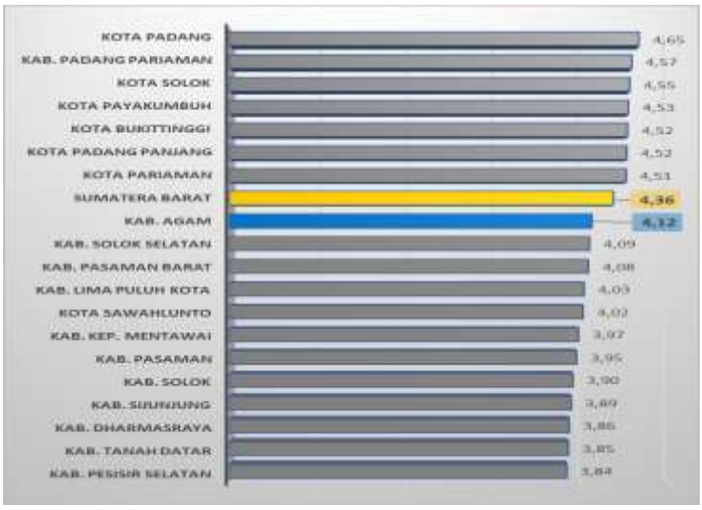
Tabel II.4 :
Nilai, Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Kab. Agam ADHK
(miliar)

SEKTOR LAPANGAN USAHA	2023 Nilai PDRB (Miliar)	2024 Nilai PDRB (Miliar)	2024 Distribusi (%)	2024 Pertumbuhan (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.738,0	4.823,0	28,46	1,79
Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	4.013,9	4.076,3	24,05	1,55
Kehutanan dan Penebangan Kayu	73,2	74,7	0,44	2,02
Perikanan	650,8	672,0	3,97	3,26
Pertambangan dan Penggalian	554,8	579,8	3,42	4,51
Industri Pengolahan	1.843,4	1.906,7	11,25	3,43
Pengadaan Listrik dan Gas	3,9	4,1	0,02	5,26
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,0	8,7	0,05	8,49
Konstruksi	1.218,4	1.256,0	7,41	3,09
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.189,2	3.350,4	19,77	5,05
Transportasi dan Pergudangan	1.079,1	1.161,2	6,85	7,60
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	119,1	124,9	0,74	4,82
Informasi dan Komunikasi	1.319,9	1.400,3	8,26	6,09
Jasa Keuangan dan Asuransi	200,3	212,0	1,25	5,87
Real Estate	311,1	327,7	1,93	5,33
Jasa Perusahaan	6,3	6,5	0,04	3,73
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	565,9	616,3	3,64	8,90
Jasa Pendidikan	778,5	802,5	4,74	3,08
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	208,9	221,0	1,30	5,81
Jasa lainnya	131,1	145,6	0,86	11,06
Produk Domestik Regional Bruto	**16.276,0**	**16.946,6**	**100**	**4,12**

Sumber : BPS Sumatera Barat 2025

Jika dibandingkan dengan kota dan kabupaten se Sumatera Barat, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam di tahun 2024 menempati urutan ke-8 setelah kota Pariaman. Laju pertumbuhan ekonomi Agam juga berada dibawah rata-rata provinsi dimana pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mencapai 4,36 persen. Persandingan LPE Kabupaten, Kota, dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 disajikan sebagai berikut.

Grafik II.2 :
LPE Kabupaten, Kota, dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024



Sumber : BPS Sumatera Barat 2025

Selanjutnya grafik dibawah memperlihatkan tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam, Sumatera Barat tahun 2021-2024. Dari Grafik tersebut dapat dilihat bahwa pola perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam relatif sama dengan pola perkembangan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

Grafik II.3 :
Persandingan LPE Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020–2024



Sumber : BPS Sumatera Barat 2025

b) PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah/wilayah. PDRB per kapita diperoleh berdasarkan penghitungan terhadap nilai PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk di pertengahan tahun. Nilai PDRB per kapita atas harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu penduduk pada tahun berjalan. Pada tahun 2024 PDRB per

kapita Kabupaten Agam Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. PDRB perkapita 2024 mencapai 50,02 juta rupiah meningkat dari 47,41 juta. Grafik II.4 dibawah ini menyajikan perkembangan laju pertumbuhan PDRB perkapita tahun 2021-2024.

Grafik II.4 :
PDRB Perkapita Kabupaten Agam Tahun 2020 - 2024 (ADHB)



Sumber : BPS Sumatera Barat 2025

Jika dibandingkan dengan Sumatera Barat, nilai PDRB per kapita Kabupaten Agam masih berada dibawah Provinsi Sumatera Barat. PDRB perkapita tahun 2024 PDRB perkapita Sumatera Barat mencapai 57,05 juta rupiah.

c) Gini Rasio

Ketimpangan pendapatan adalah kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Ketimpangan pendapatan penting menjadi perhatian karena akan menyebabkan inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas serta jika ketimpangan ekstrim menunjukkan ketidakadilan. Koefisien Gini *(Gini Ratio)* menjadi salah satu indikator untuk melihat disparitas atau ketimpangan pendapatan masyarakat dalam suatu wilayah. Indeks ini menunjukkan sejauh mana pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh individu ataupun sejauh mana pertumbuhan ekonomi dapat memberikan dampak positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. *Gini Ratio* dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu : tingkat Ketimpangan Tinggi (*Gini Ratio* 0,50-0,70), tingkat Ketimpangan Sedang (*Gini Ratio* 0,35-0,50), dan tingkat Ketimpangan Rendah (*Gini Ratio* 0,20-0,35).

Pada tahun 2024 ketimpangan pendapatan masyarakat kabupaten Agam turun dibanding kondisi tahun sebelumnya. Hal ini tergambar dengan semakin turunnya angka gini rasio dari 0,255 ditahun 2023 menjadi 0,249 pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi di

masyarakat Agam berada pada tingkat ketimpangan rendah. Sementara ditingkat provinsi, angka gini rasio juga mengalami peningkatan dari 0,280 ditahun 2023 menjadi 0,283 pada tahun 2024. Perkembangan Gini Rasio tahun 2021-2024 disajikan pada berikut.

Grafik II.5.
Gini Rasio Kabupaten Agam Tahun 2020 s.d 2024



Sumber: BPS Sumatera Barat 2025

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Sumatera Barat, angka gini rasio kabupaten Agam relatif rendah, berada pada urutan ke 8 terendah, dan berada dibawah rata-rata provinsi sebesar 0,283. Data Gini Ratio Kabupaten Agam dibanding kabupaten/kota dan provinsi disajikan dalam grafik berikut :

Grafik II.6 :
Gini Rasio Kabupaten Kota Di Sumatera Barat Tahun 2024



Sumber : BPS Sumatera Barat 2025

d) Kemiskinan

Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Untuk tahun 2024, BPS menetapkan garis

kemiskinan kabupaten Agam sebesar Rp. 558.963,-. Dengan besaran garis kemiskinan tersebut, penduduk miskin kabupaten Agam 2024 tercatat sebanyak 34,82 ribu jiwa, meningkat dari tahun 2023 sebesar 33,41 ribu jiwa. Secara persentase jumlah penduduk miskin mencapai 6,83 persen dari total penduduk Agam, meningkat dari tahun 2023 sebesar 6,60 persen. Dalam periode lima tahun, secara jumlah dan persentase perkembangan penduduk miskin dikabupaten Agam, seperti disajikan pada grafik berikut.

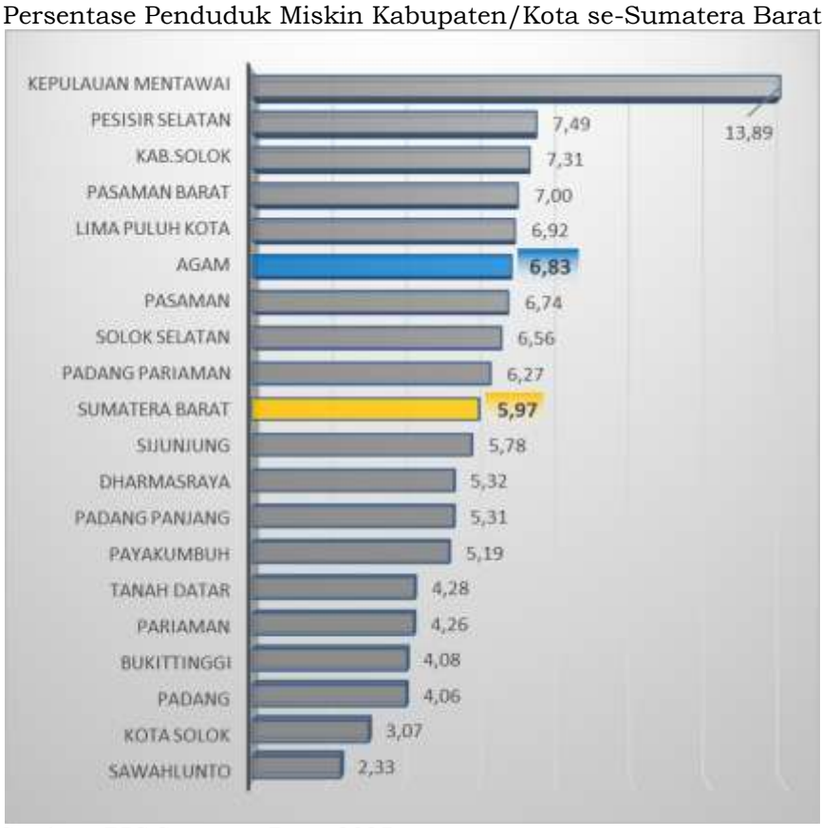
Grafik II.7 :
Penduduk Miskin Kabupaten Agam Tahun 2020 s.d 2024



Sumber : BPS Sumatera Barat 2025

Dibandingkan dengan kabupaten/kota di Sumatera Barat angka kemiskinan Agam relatif tinggi. Secara rata-rata, angka kemiskinan Sumatera Barat. tercatat sebesar 5,97 persen. Kabupaten Agam berada pada urutan ke-enam tertinggi pada kategori persentase penduduk miskin di Sumatera Barat.

Grafik II.8 :
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat



Sumber : BPS Sumatera Barat 2025

Lebih lanjut, untuk mengukur kualitas kinerja penurunan tingkat kemiskinan digunakan indikator berupa Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan menggambarkan tingkat kesenjangan pendapatan rata-rata penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Angka Indeks Kedalaman Kemiskinan Agam pada tahun 2024 sebesar 0,50, turun dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar 0,75. Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukan jarak rata-rata pendapatan antar sesama penduduk miskin. Pada tahun 2024 capaian indeks keparahan kemiskinan turun dibanding tahun sebelumnya dimana capaian pada tahun 2024 sebesar 0,07 dan capaian 2023 sebesar 0,13. Artinya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin kecil. Perkembangan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan disajikan pada grafik berikut.

Grafik II.9 :
Indeks kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Agam



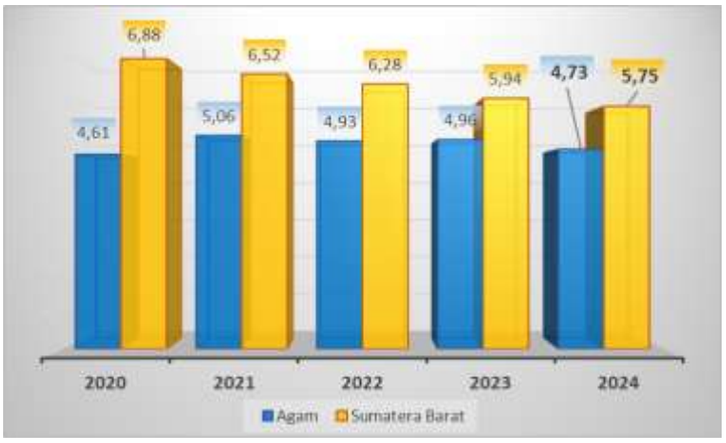
Sumber : BPS Sumatera Barat 2025

Secara kelembagaan di Kabupaten Agam juga telah dibentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK) melalui Keputusan Bupati Nomor 96 Tahun 2017. Tim ini diharapkan mampu menggerakan upaya percepatan penurunan kemiskinan dengan memperkuat integrasi program-program pengentasan kemiskinan khususnya pemberdayaan ekonomi kerakyatan, memperluas akses kerja, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan didukung oleh *updating* data kemiskinan yang akurat.

e) Tingkat Pengangguran

Pengangguran terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja dalam suatu wilayah. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Agam pada tahun 2024 mencapai angka 4,73 persen. Artinya terdapat 4,73 persen penduduk yang termasuk angkatan kerja yang tidak terserap lapangan kerja. TPT Agam tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 4,96 persen. Sementara di tingkat provinsi tingkat pengangguran juga mengalami penurunan dari 5,94 persen menjadi 5,75 persen, seperti disajikan pada grafik berikut.

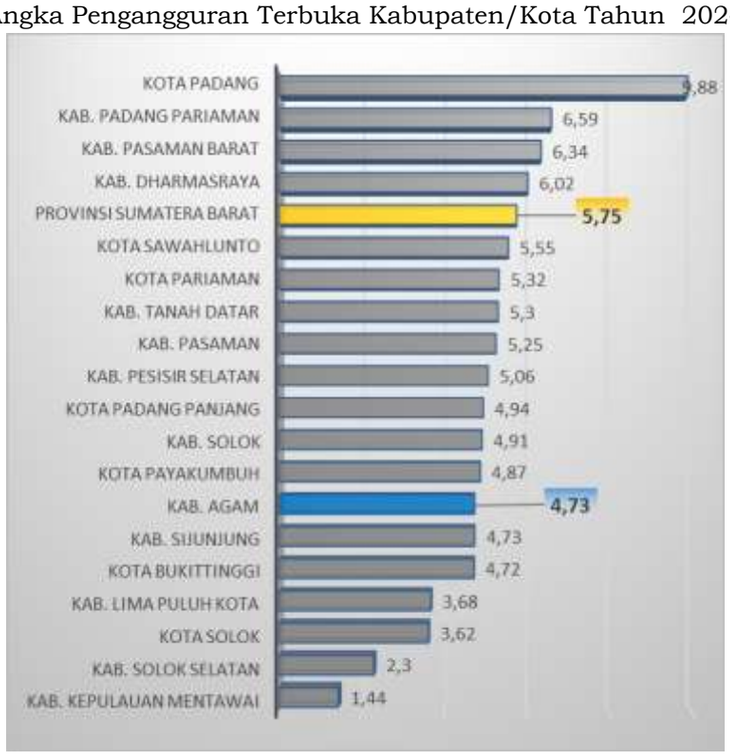
Grafik II.10
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Agam Tahun 2020 - 2024



Sumber : BPS Sumatera Barat 2025

Jika dibandingkan dengan kabupaten dan kota di Sumatera Barat, tingkat pengangguran kabupaten Agam cukup rendah. Pengangguran paling rendah di Sumatera Barat terjadi di kabupaten Kepulauan Mentawai dengan tingkat pengangguran hanya sebesar 1,44 persen. Grafik berikut menyajikan tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

Grafik II.11
Angka Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Tahun 2024



Sumber : BPS Sumatera Barat 2025

f) Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan, dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk oleh tiga dimensi utama yaitu : 1) umur panjang dan hidup sehat, 2) pengetahuan dan 3) standar hidup layak. Perhitungan IPM mulai tahun 2015 telah mengunakan metode baru dengan mengunakan variabel Agka Harapan Hidup (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Pengeluaran Perkapita.

IPM Kabupaten Agam mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Di tahun 2024 IPM Kabupaten Agam sebesar 75,08, meningkat dari angka 72,46 ditahun 2020. Berdasarkan angka capaian IPM dapat dilihat bahwa level pencapaian pembangunan manusia selama periode lima tahun terakhir ini berada di kelompok tinggi, karena IPM berada pada rentang angka indeks 70 – 80. Semakin tingginya angka IPM mengambarkan kebijakan terkait pembangunan manusia yang telah diambil pemerintah daerah memiliki dampak positif terhadap kualitas pembangunan manusia. Jika dibandingkan IPM Sumatera Barat, IPM Agam relatif rendah dimana IPM Sumatera Barat sebesar 76,43. Untuk lebih jelasnya perkembangan dan pertumbuhan IPM Kabupaten Agam dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik II.12 :
Nilai dan Pertumbuhan IPM Kabupaten Agam Tahun 2021-2024



Sumber : BPS Sumatera Barat 2025

Sebagai suatu indikator makro daerah, IPM digunakan untuk melihat keterbandingannya antar wilayah. Hal ini dimaksudkan untuk melihat posisi pembangunan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Pencapaian IPM Kabupaten Agam tahun 2024 berada pada urutan ke-9 dibandingkan

kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat. Jika dibandingkan dengan kabupaten saja, capaian IPM Agam merupakan ke-2 tertinggi di antara seluruh Kabupaten di Sumatera Barat.

Grafik II.13.
Perbandingan IPM Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2024.



Sumber : BPS Sumatera Barat 2025

B. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelengaraan pemerintah daerah khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Tabel berikut menyajikan data terkait capaian Indikator Kinerja Utama pada hingga 2025:

Tabel II.5

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

	Uraian	Capaian Tahun 2025 (Triwulan I)	Target Tahun 2025	Ketercapaian Terhadap Target 2025
	Misi I : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan melaayani			
1	Indeks Reformasi Birokrasi	75,84	BB (71)	Belum
2	Nilai Sakip	B (67.11)	BB (77)	Belum
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Perlu Perbaikan (74,03)	Baik (84)	Belum
4	Nilai EPPD	3,58	3,50	Tercapai
5	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	39,88	46 (Tinggi)	Belum
6	Indeks Profesionalitas ASN	78,81	tinggi (66)	Tercapai
7	Indeks SPBE	2,56	3,1 (Baik)	Belum
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,30	85,00	Tercapai
9	Persentase Nagari Dengan Katagori Cepat Berkembang	69,00	53,20	Tercapai
10	Indek Pengelolaan Pemerintahan Nagari	469,00	464,00	Tercapai
	Misi II: Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui obtimalisasi sumbedaya daerah dan pengembangan pariwisata			
11	Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK)	2,74	3,98	Belum
12	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,12	4,89	Belum
13	Laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha pertanian (ADHK)	1,55	2,75	Belum
14	Laju pertumbuhan pelaku usaha skala mikro	1,85	2,60	Belum
15	Laju pertumbuhan nilai tambah usaha mikro	3,08	2,00	Tercapai
16	Laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha akomodasi dan makan minum (ADHK)	4,82	8,56	Belum
17	Jumlah Kunjungan Wisatawan	930.617,00	936.752,00	Belum
18	Laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha transportasi (ADHK)	7,60	5,94	Tercapai
19	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	68,98	86,00	Belum
20	Persentase Peningkatan realisasi investasi dari capaian tahun dasar (2020)	75,76	43,50	Tercapai
	Misi III: Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tataruang wilayah dan mitigasi bencana			
21	Tingkat Kapasitas Ketahanan Daerah	Rendah (0,33)	Tinggi	Belum
22	Persentase penanggulangan bencana yang terintegrasi	86,91	87,00	Belum

	Uraian	Capaian Tahun 2025 (Triwulan I)	Target Tahun 2025	Ketercapaian Terhadap Target 2025
23	Indeks kualitas lingkungan Hidup	70,74	76,87	Belum
24	Indeks ketaatan terhadap tata ruang	99,99	99,98	Tercapai
	Misi IV: Membangun masyarakat yang madiri, berdaya saing, berkualitas dan berkarakter			
25	Indeks Pembangunan Manusia	75,08	75,75	Belum
26	Angka Harapan Lama Sekolah	14,16	14,39	Belum
27	Rata rata lama sekolah	9,23	9,75	Belum
28	Angka Harapan Hidup	74,39	74,51	Belum
29	Nilai Pertumbuhan Produktivitas Daerah (Juta/Kapita)	92,97	96,52	Belum
30	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,73	4,88	Belum
31	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	92,79	94,00	Belum
32	Jumlah cabang olah raga berprestasi	47,00	46,00	Tercapai
33	Indeks ketahanan pangan daerah	86,92	94,00	Belum
34	Indeks Kesejahteraan Rakyat	88,52	80,35	Tercapai
35	Status IDM	Mandiri : 42	Mandiri : 34	Tercapai
		Maju : 41	Maju : 48	
		Berkembang : 9	Berkembang : 10	
36	Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan dan pemberdayaan sosial	90,89	90,35	Tercapai
37	IPG	97,37	98,10	Belum
38	Indek perlindungan anak	63,04	72,00	Belum
39	Total Fertility Rate	2,48	2,27	Belum
	Misi V : Meningkatkan kehidupan masyarakat yang Madani, berlandaskan ABS-SBK			
40	Indeks Keamanan	96,70	91,50	Tercapai
41	Angka kriminalitas per 10.000 penduduk	2,74	2,90	Tercapai
42	Persentase kasus kekerasan dan TPPO pada perempuan yang ditangani	100,00	100,00	Belum
43	Persentase pemenuhan waktu tanggap pelayanan pemadam kebakaran	90,00	100,00	Belum
44	Persentase nagari madani Level V	14,13	18,48	Belum
	Jumlah Nagari Madani Level			
	- V	13,00	17,00	
	- IV	64,00	42,00	
	- III	15,00	32,00	
	- II		1,00	
	- I			
45	Persentase Lembaga adat yang aktif menegakkan Adat Salingka Nagari	100,00	100,00	Belum

	Uraian	Capaian Tahun 2025 (Triwulan I)	Target Tahun 2025	Ketercapaian Terhadap Target 2025
46	Persentase kesenian tradisional, cagar budaya dan peninggalan sejarah yang dilestarikan	94,55	100,00	Belum

Capaian IKU hingga triwulan II tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat 23 indikator belum mencapai target atau secara persentase mencapai 50 persen. Sementara 23 indikator lainnya, capaiannya sudah melampaui target yang ditetapkan. Selain Indikator Kinerja Utama yang juga merupakan indikator kinerja kepala daerah, terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator ini mengukur capaian pada aspek layanan umum yang meliputi urusan pemerintah pada urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan. Berikut disajikan capaian indikator kinerja kunci tahun 2024.

Tabel II.6

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Tahun 2025 (Triwulan I)	Target Tahun 2025	Ketercapaian Terhadap Target 2025
Urusan Pendidikan			
Angka Harapan Lama Sekolah	14,16	14,39	Belum
Rata-rata lama sekolah	9,23	9,75	Belum
APK PAUD	60,05	83,75	Belum
APK SD	97,19	100,00	Belum
APK SMP	101,56	102,69	Belum
APM SD	88,38	92,00	Belum
APM SMP	78,52	84,17	Belum
Angka Putus Sekolah SD	0,02	0,01	Belum
Angka Putus Sekolah SMP	0,05	0,01	Belum
Persentase Lembaga satuan PAUD yang Terakreditasi	77,23	78,08	Belum
Persentase PKBM dan SKB yang terakreditasi	80,00	100,00	Belum
Persentase SD yang terakreditasi Minimal B	87,30	94,70	Belum
Persentase SMP yang terakreditasi Minimal B	85,29	89,81	Belum
Persentase anak Usia 7-15 tahun yang terlayani sesuai SPM pendidikan dasar	99,60	100,00	Belum
Persentase anak Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang terlayani sesuai SPM pendidikan kesetaraan	100,00	100,00	Tercapai
Persentase anak Usia 5-6 Tahun yang terlayani sesuai SPM pendidikan PAUD	99,53	100,00	Belum
Persentase Anak PAUD yang	15,93	92,00	Belum

Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Tahun 2025 (Triwulan I)	Target Tahun 2025	Ketercapaian Terhadap Target 2025
menamatkan iqra' 6			
Persentase murid SD yang hafal al-Qur'an Juz 30	31,22	50,00	Belum
Persentase murid SMP yang hafal al-Qur'an Juz 1 dan juz 30	42,20	60,00	Belum
Persentase murid SD yang mampu Pasambahan adat	23,07	45,00	Belum
Persentase murid SMP yang mampu Pasambahan adat	3,08	60,00	Belum
Persentase murid SD yang mampu Berbahasa inggris	10,00	30,00	Belum
Persentase murid SMP yang mampu Berbahasa inggris	18,00	35,00	Belum
Urusan Kesehatan			
Menurunnya rasio kematian ibu	172,08	97,08	Belum
Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) per tahun	10,00	12,50	Belum
Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	93,56	100,00	Belum
Meurunnya ratio kematian bayi	12,60	8,90	Belum
Persentase balita stunting	(20,1% Survei SKI), (7,01% ePPGBM)	10,70	Belum
Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	4,13	3,48	Belum
Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	25,20	53,00	Belum
Inseiden HIV per 1000 penduduk yang tidak reinfeksi HIV	0,03	0,10	Belum
Insedensi TB per 100.000 penduduk	155,00	216,00	Belum
Persentase angka keberhasilan pengobatan (succes rate) TBC	92,00	91,26	Tercapai
Temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB)	83,50	75,00	Tercapai
Treatmen coverage pada pasien TB	36,00	75,00	Belum
Cakupan Posbindu aktif	100 %	72,00	Tercapai
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan survelen	23,00	23,00	Tercapai
Jumlah Puskesmas yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar	23,00	23,00	Tercapai
Perentase ketersedian prasarana dan alkes Puskesmas sesuai standar	72,25	72,00	Tercapai
Persentase ketersedian obat esensial Puskesmas	100,00	100,00	Tercapai
Persentase Puskesmas yang menggunakan sistem pelaporan on-line	100,00	100,00	Tercapai
Persentase Puskesmas dengan jenis nakes sesuai anjab ABK	42,25	80,46	Belum
Persentase SPP-IRT yang diterbitkan sesuai ketentuan	70,00	92,00	Belum
Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	10,10	8,10	Belum
Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan upaya berhenti merokok (UBM)	100,00	100,00	Belum

Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Tahun 2025 (Triwulan I)	Target Tahun 2025	Ketercapaian Terhadap Target 2025
Implementasi KTR pada 9 tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll)	50,00	100,00	Belum
Persentase rumah tangga ber- PHBS	82 %	87,00	Belum
Pelayanan Kesehatan Ibu hamil sesuai standar	93,56	100,00	Belum
Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin sesuai standar	98,59	100,00	Belum
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standar	93,67	100,00	Belum
Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	73,79	100,00	Belum
Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar sesuai Standar	97,83	100,00	Belum
Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sesuai Standar	89,43	100,00	Belum
Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sesuai Standar	73,71	100,00	Belum
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sesuai Standar	90,90	100,00	Belum
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus sesuai Standar	90,86	100,00	Belum
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai Standar	100,00	100,00	Belum
Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai Standar	83,73	100,00	Belum
Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai Standar	93,00	100,00	Belum
Persentase rumah sakit rujukan yang terakreditasi	100,00	100,00	Belum
Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk (1 : 1.000)	185,00	205 tempat tidur	Belum
Jumlah desa/kelurahan bebas Stunting (Pravalensi Stunting <14%)	85,00	92 (100%)	Belum
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Persentase luas sawah beririgasi	51,74	91,20	Belum
Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	68,98	86,00	Belum
Persentase penduduk berakses air minum	88,51	100,00	Belum
Persentase rumah tangga berakses sanitasi	79,50	85,00	Belum
Persentase drainase kondisi baik	40,60	41,60	Belum
Persentase jalan lingkung kondisi baik	54,25	64,05	Belum
Persentase ketaatan terhadap tata ruang	96,48	98,65	Belum
Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	-	0,27	Belum
Persentase Gedung Pemerintah yang dibangun	33,33	95,00	Belum
Persentase Bangunan yang tertata	82,75	98,00	Belum
Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman			

Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Tahun 2025 (Triwulan I)	Target Tahun 2025	Ketercapaian Terhadap Target 2025
Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	26,18	100,00	Belum
Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH	1,34	1,67	Belum
Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	3,63	0,11	Tercapai
Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	55,01	65,00	Belum
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			Belum
Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100,00	100,00	Tercapai
Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	100,00	100,00	Tercapai
Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100,00	96,00	Tercapai
Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	85	49,00	Belum
Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	31	50,00	Belum
Persentase penanganan pra bencana	38	89,08	Belum
Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100	100,00	Tercapai
Persentase penanganan pasca bencana	100	100,00	Tercapai
Urusan Sosial			
Jumlah Layanan Data dan Pengaduan Yang Dimiliki	10,00	10,00	Belum
Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	1,00	3,00	Belum
Keluarga Yang mendapat Bantuan Sosial Bersyarat (KK)	20.779,00	21.371,00	Belum
Urusan Ketenaga Kerjaan			
Tingkat partisipasi angkatan kerja	69,48	76,58	Belum
Rasio penduduk yang bekerja.	95,27	95,71	Belum
Pencari Kerja yang ditempatkan	1.565,00	1.571,00	Belum
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	n.a	70,06	Belum
Kecamatan Layak Anak	n.a	6,00	Belum
Nagari Layak Anak	n.a	27,00	Belum
Urusan Pangan			
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	81,00	85,00	Belum
Persentase cadangan pangan masyarakat	18,58	15,00	Tercapai
Ketersediaan pangan utama	79,69	100,00	Belum
Urusan Pertanahan			
Luas tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya (Ha)	37,45	1,00	Tercapai
Jumlah bidang tanah yang direstribusi	87,00	1.000,00	Belum
Persentase Penyelesaian sengketa tanah	100,00	100,00	Tercapai

Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Tahun 2025 (Triwulan I)	Target Tahun 2025	Ketercapaian Terhadap Target 2025
Persentase Sertifikat Tanah milik daerah	50,00	100,00	Belum
Urusan Lingkungan Hidup			
Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	100,00	100,00	Tercapai
Rasio Pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kab/Kota terhadap usaha izin lingkungan , izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	-	3,00	Belum
Persentase persetujuan teknis pengelolahan limbah bahan berbahaya dan beracun	100,00	100,00	Tercapai
Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	100,00	100,00	Tercapai
Persentase pengelolaan ruang terbuka hijau / taman kota	100,00	100,00	Tercapai
Persentase peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan hidup	50,41	78,00	Belum
Persentase data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan.	100,00	100,00	Tercapai
Persentase pengelolaan persampahan.	46,29	65,00	Belum
Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan.	62,50	58,00	Tercapai
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,37	97,16	Tercapai
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	63,63	76,27	Belum
Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil			
Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100,00	100,00	Tercapai
Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	65,53	100,00	Belum
Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	62,93	100,00	Belum
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
Nilai kontribusi masyarakat dan perantau terhadap pembangunan nagari (Rp. Juta)	62,40 milyar	28,46 milyar	Tercapai
Jumlah sistem pelayananAdministrasi kelembagaandesa yang ditata sesuai standar (3 Sistem Pelayanan Kelembagaan : 1. WN, 2. Bamus, 3. BUMNag)	195 Sistem	217,00	Belum
Jumlah Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) Berkembang	28 Unit	25,00	Tercapai
Persentase pengentasan desa tertinggal	100,00	100,00	Tercapai

Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Tahun 2025 (Triwulan I)	Target Tahun 2025	Ketercapaian Terhadap Target 2025
Urusan Perhubungan			
Jumlah arus penumpang angkutan umum	348.765,00	610.556,00	Belum
Rasio ijin trayek	0,09	0,16	Belum
Jumlah uji kir angkutan umum	4.570,00	4.870,00	Belum
Rasio Kejadian Kecelakaan	1,87	0,15	Belum
Urusan Komunikasi Informatika			
Persentase perangkat daerah (OPD) yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	100,00	32,50	Tercapai
Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital	10,00	10,00	Tercapai
Persentase layanan SPBE yang memanfaatkan sertifikat elektronik	131,00	10,00	Tercapai
Persentase konten informasi tekait program dan kebijakan Pemda termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis Pemda (tema: prokes, vaksin, stunting) yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi	100,00	100,00	Tercapai
Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik pemerintah daerah.	100,00	100,00	Tercapai
Urusan Koperasi dan UMKM			
Persentase Peningkatan koperasi yang berkualitas	69,13	69,40	Belum
Persentase BPR/LKM aktif	n.a	67,52	Belum
Persentase UKM non BPR/LKM aktif	n.a	10,40	Belum
Urusan Penanaman Modal			
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	-	13,00	Belum
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp. Milyar)	-	414,00	Belum
Urusan Kepemudaan dan Olah Raga			
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	49,75	85,00	Belum
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	7,85	70,00	Belum
Peningkatan prestasi olahraga (Jumlah perolehana medali)	88,00	180,00	Belum
Persentase wirausahawan muda	52,17 (9.104)	0,75	Tercapai
Urusan Statistik			
Persentase organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah.	evaluasi= 83% perencanaan = 86%	100,00	Belum
Urusan Persandian			
Indeks keamanan informasi	338,00	30,00	Tercapai

Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Tahun 2025 (Triwulan I)	Target Tahun 2025	Ketercapaian Terhadap Target 2025
	(Metode perhitungan baru)		
Urusan Kebudayaan			
Persentase lembaga adat yang aktif menegakkan Adat Salingka Nagari	100,00	100,00	Tercapai
Jumlah situs cagar budaya yang terdaftar dan dapat di lestarikan	52,00	65,00	Belum
Jumlah Pengunjung Museum	26.381,00	20.500,00	Tercapai
Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni.	10,00	13,00	Belum
Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni.	90,00	85,00	Tercapai
Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.	1,00	1,50	Belum
Persentase Rumah Tangga yang menyelenggarakan upacara adat.	80,00	72,00	Tercapai
Urusan Perpustakaan			
Nilai Tingkat kegemaran membaca	81,72	63,00	Tercapai
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	72,92	70,66	Tercapai
Urusan Kearsipan			
Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang syah dan pertanggungjawaban nasional	57,08	57,25	Belum
Persentase unit organisasi yang melakukan penyusutan arsip	13,63	7,04	Tercapai
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan public dan kesejahteraan rakyat	68,33	65,33	Tercapai
Nilai Pengelolaan Arsip Daerah	51,01 (CC)	Baik (61)	Belum
Urusan Kelautan dan Perikanan			
Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	4,61	4,93	Belum
Produksi perikanan tangkap (ton)	8.139,98	8.170,00	Belum
Produksi perikanan budidaya (ton)	33.409,39	30.750,00	Tercapai
Produksi benih ikan (juta ton)	312	200,00	Tercapai
Jumlah konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	43.43	46,00	Belum
Cakupan Bina kelompok nelayan	37,00	100,00	Belum
Produksi perikanan kelompok nelayan (Ton)	8.139,98	8.170,00	Belum
Jumlah Produksi Olahan Ikan (Ton),	715,03	755,00	Belum
Urusan Pariwisata			
Tingkat hunian akomodasi (Length of	2 hari	2 hari	Belum

Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Tahun 2025 (Triwulan I)	Target Tahun 2025	Ketercapaian Terhadap Target 2025
Stay)			
Kontribusi sektor pariwisataterhadap PAD	0,15	1,00	Belum
Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	913.330,00	1.135.159,00	Belum
Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara	17.287,00	14.471,00	Tercapai
Peningkatan Rata - Rata Pengeluaran Wisatawan (Spend Of Money)	536.000,00	550.000,00	Belum
Peningkatan kompetensi SDM bagi pelaku usaha dan kelompok pariwisata (%)	88,00	90,00	Belum
Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp. Milyar)	9,5 M	12,34	Belum
Pelaku Ekonomi Kreatif Unggulan (Orang)	44 orang	56,00	Belum
Jumlah produk ekonomi kreatif yang berdaya saing	82 produk	90,00	Belum
Urusan Pertanian			
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	1,55	7,51	Belum
Kontribusi sektor pertanian/hortikultura terhadap PDRB	1,55	4,60	Belum
Kontribusi sektor pertanian/peternakan terhadap PDRB	1,55	2,70	Belum
Kontribusi sektor pertanian/tanaman pangan terhadap PDRB	1,55	9,77	Belum
Produksi sektor pertanian			
- Padi	347.739,00	438.226,00	Tercapai
- Jagung	100.163,00	131.673,00	Belum
- Cabe merah	35.941,00	36.575,00	Belum
- Bawang merah	5.065,00	7.620,00	Belum
Produksi sektor peternakan (Ton)			
- Sapi	1.946,00	2.000,00	Belum
- Kerbau	3,30	44,00	Belum
- Kambing	66,12	55,00	Tercapai
- Unggas	19.435,75	18.776,00	Tercapai
Produksi sektor perkebunan			
- Kopi	1.667,53	1.743,00	Belum
- tebu	2.978,28	3.100,00	Belum
- kulit manis	31.227,00	31.472,00	Belum
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal per hektar			
- Padi	5,02	5,85	Belum
- Jagung	7,23	7,88	Belum
Nilai Tukar Petani	-	104,30	Belum
Cakupan Bina kelompok tani	78,00	80,00	Belum
Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)			
- Padi (%)	0,20	0,22	Belum
- Jagung (%)	-	0,18	Belum
Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura(cabai dan			

Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Tahun 2025 (Triwulan I)	Target Tahun 2025	Ketercapaian Terhadap Target 2025
bawang merah)			
- cabe	17,43	12,06	Tercapai
- bawang merah	8,75	9,58	Belum
Persentase peningkatan produktivitas perkebunan			
- Kopi	1,01	21,00	Belum
- tebu	1,03	14,00	Belum
- kulit manis	1,01	2,90	Belum
Persentase peningkatan produktivitas peternakan	8,72	11,15	Belum
Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencanan OPT	90,00	94,00	Belum
Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular	4,53	20,68	Belum
Urusan Perdagangan			
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	19,76	22,00	Belum
persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100,00	100,00	Tercapai
Persentase penanganan pengaduan konsumen	80,00	100,00	Belum
persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	27,41	37,68	Belum
Urusan Perindustrian			
Laju pertumbuhan pelaku usaha IKM	1,75	2,25	Belum
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	10,33	11,53	Belum
Pertumbuhan industri	1,75	2,21	Belum
Cakupan Bina kelompok pengrajin	11,00	12,00	Belum
Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan non migas	31.076,00	31.280,00	Belum
Nilai investasi sektor industri pengolahan non migas (milyar)	9,45	2,00	Tercapai
Urusan Pemerintahan			
Persentase regulasi daerah yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan.	100,00	100,00	Tercapai
Persentase fasilitasi penyelesaian tapal batas kabupten	n.a	100,00	Belum
Persentase OPD dengan nilai SAKIP baik	100,00	83,00	Tercapai
Persentase OPD dengan nilai IRB baik	n.a	90,00	Belum
Persentase OPD yang memiliki nilai organisasi perangkat daerah baik	n.a	85,00	Belum
Persentase fasilitasi kegiatan DPRD	100,00	100,00	Tercapai
Perencanaan			
Indeks Kualitas Perencanaan Daerah	87,59	100,00	Belum
Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	72,58	100,00	Belum
Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	88,89	100,00	Belum
Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100,00	100,00	Tercapai

Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Tahun 2025 (Triwulan I)	Target Tahun 2025	Ketercapaian Terhadap Target 2025
Keuangan			
Deviasi realisasi belanja terhadap total belanja	0,19	5,20	Belum
Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	14,54	-	Belum
Kesesuaian pengalokasian anggaran	90,00	98,00	Belum
Kemandirian Keuangan Daerah (persen)	10,78	13,10	Belum
Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	Tercapai
Manajemen Aset	baik	Baik	Tercapai
Rasio belanja pegawai di luar guru dan nakes	19,20	38	Belum
Kepegawaian			
Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	25,50	0,35	Tercapai
Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	27,00	0,75	Tercapai
Rasio Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	40,00	3,70	Tercapai
Penelitian dan Pengembangan			
Indeks Kinerja Kelitbangan	94,70	80,00	Tercapai
Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan bahan rekomendasi perumusan kebijakan	100,00	100,00	Tercapai
Persentase unit kerja yang memiliki inovasi (perangkat daerah, kecamatan, puskesmas sebanyak 66 unit kerja)	89,39	61,00	Tercapai
Pengawasan			
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	Level 3 (3,152)	Level 3 (3,9) (terdefenisi)	Belum
Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP)	Level 3 (3,00) (terdefinisi)	Level 3 (3,01) (infrastruktur)	Belum
Jumlah unit kerja yang ditetapkan menjadi WBK dan WBBM	2 opd	4,00	Belum
Indeks Persepsi Anti Korupsi	n.a	85,00	Belum
Kewilayahan			
Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	n.a	87,00	Belum
Pemerintahan Umum			Belum
Persentase potensi ATHG/konfliks sosial yang dapat diatasi.	100,00	100,00	Tercapai
Transparansi dan Partisipasi Publik			Belum
Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (persen)	100,00	100,00	Tercapai
Akses public terhadap keuangan daerah (persen)	20,00	100,00	Belum

Capaian Indikator Kinerja Daerah pada aspek pelayanan umum hingga bulan Juni 2024 menunjukkan masih terdapat 128 indikator yang belum tercapai dari total 230 indikator. Secara persentase, indikator yang capaiannya masih berada dibawah target mencapai 56 persen.

2.1.2. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan evaluasi hasil capaian indikator kinerja Utama dan Indikator kinerja kunci Pemerintah Daerah yang terangkum dalam sasaran dan prioritas daerah dalam RKPD, serta kondisi eksisting yang terjadi di tengah masyarakat yang dijaring melalui penyampaian aspirasi masyarakat dalam setiap proses perencanaan mulai konsultasi publik, musrenbang kecamatan dan kabupaten disepakati permasalahan sebagai berikut :

a. Penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan nagari

Peningkatan dan penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pembangunan merupakan langkah kunci dalam upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Reformasi birokrasi bertujuan untuk mengurangi birokrasi yang berlebihan, memperbaiki proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan pelayanan publik. Beberapa kendala yang terjadi sebagai berikut :

1. Nilai Sakip Kabupaten Agam berada pada kategori B dengan nilai 67,11. capaian ini lebih baik dari tahun sebelumnya, tapi belum mencapai target yang ditetapkan untuk tahun 2024 (BB;75).

2. Masih rendahnya kapasitas fiskal daerah dan ketergantungan kepada Pemerintah Pusat yang tinggi. Kapasitas fiskal kabupaten Agam berada pada kategori sangat rendah, dengan nilai rasio kapasitas fiskal sebesar 0,884.

3. Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Agam sebesar 74,03 yang artinya masih diperlukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah.

4. Pelaksanaan SPBE di Kabupaten Agam belum optimal, dimana pada tahun 2024 angka indeks SPBE berada pada level ”cukup” dengan nilai 2,56. Angka tersebut belum mampu mencapai target untuk tahun 2024.

5. Penerapan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan belum optimal.

b. Peningkatan Produktivitas Dan Nilai Tambah Usaha Pertanian Untuk Memperkuat Ketahanan Pangan

Peningkatan produktivitas dan nilai tambah usaha pertanian berkorelasi terhadapa penguatan ketahanan pangan kabupaten Agam. Beberapa kendala yang terjadi sebagai berikut :

1. Turunnya pertumbuhan PDRB di sektor pertanian dari 2,65 persen ditahun 2023 menjadi 1,55 persen ditahun 2024.
2. Belum optimalnya sinergi industri pengolahan dengan sektor pertanian dalam memberikan daya ungkit terhadap percepatan pertumbuhan perekonomian.
3. Masih rendahnya akses petani dan nelayan terhadap permodalan, layanan usaha, pemasaran dan diseminasi teknologi pengolahan.
4. Nilai indeks ketahanan pangan daerah sudah cukup baik dengan capaian indeks 86,92, namun belum memenuhi target tahun 2024 sebesar 92. sementara skor pola pangan harapan (PPH) turun dari 86,6 menjadi 81.
5. Persentase peningkatan produktivitas peternakan tahun 2024 menurun dari 10,91 persen menjadi 8,72 persen disebabkan fase produksi ternak belum optimal.

c. Peningkatan daya saing dan pemasaran produk Usaha Mikro

Peningkatan daya saing dan pemasaran produk usaha mikro guna mendukung pertumbuhan ekonomi kabupaten Agam dan menoptimalkan serapan angkatan kerja. Beberapa kendala yang terjadi sebagai berikut :

1. Sektor perdagangan besar dan eceran masih belum maksimal dalam meningkatkan nilai tambah dari produk pertanian, terutama ketika produk pertanian diperdagangkan dalam bentuk mentah
2. Menurunnya pertumbuhan pelaku usaha mikro ditahun 2024.

d. Peningkatan Kepariwisataan Melalui Amenitas, Atraksi dan Aksesibilitas

1. Kurangnya atraksi/event wisata, wisata kuliner dan berbagai fasilitas yang saling terkait sebagai faktor pendorong lama tinggal dan jumlah pengeluaran wisatawan
2. Belum adanya objek wisata yang benar-benar representatif, dengan dukungan fasilitas lengkap, Pariwisata daerah lebih mengandalkan pemandangan alam semata dan belum didukung event-event yang dilaksanakan secara kontinu. Penggunaan teknologi informasi (IT) juga belum dimanfaatkan secara optimal.

e. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur Berbasis Mitigasi Bencana

1. Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Salahsatu disebabkan masih rendahnya rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kab/Kota terhadap usaha izin lingkungan , izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten
2. Pengelolaan dan layanan persampahan oleh intitusi terkait belum optimal dan di tingkat masyarakat juga masih rendah. Persentase pengelolaan persampahan tahun 2024 baru mencapai 46,29 persen.
3. Timbunan sampah anorganik dan limbah B3 belum terkelola secara baik sesuai standar yang ditetapkan.
4. Masih terdapatnya jalan kabupaten pendukung ekonomi dalam kondisi rusak sepanjang 436 kilometer atau 25,7 persen dari total panjang jalan.
5. Pengendalian pemanfaatan ruang baru sebatas kepada yang mengurus izin, sementara penindakan kepada bangunan atau usaha yang menyalahi arahan tata ruang belum terlaksana dengan baik, sehingga berpotensi untuk menciptakan kawasan kumuh.
6. Turunnya indeks kapasitas ketahanan daerah ditahun 2024. Hal ini disebabkan tingginya intensitas bencana alam yang terjadi dan berdampak cukup masif terhadap infrastruktur, ekonomi dan sosial masyarakat.

f. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak serta daya saing pemuda

1. IPM meningkat tetapi masih rendah jika dibandingkan dengan kota sekitar Agam.
2. Belum terpenuhinya standart kualitas pendidik dan standart sarana prasarana pendidikan
3. Masih terdapatnya siswa putus sekolah, dimana angka putus sekolah SD sebesar 0,03 dan angka putus sekolah SMP sebesar 0,03.
4. Masih kurangnya sarana prasarana seperti mobiler yang sudah tidak layak, sarana perpustakaan, laboratorium dan sarana sanitasi sekolah khususnya pada jenjang pendidikan SD.
5. Masih tingginya kasus gizi buruk dan stunting. Pada tahun 2024 angka stunting sebesar 20,1 persen (Survei SKI).

6. Meningkatnya angka kematian ibu dan masih adanya kasus kematian bayi.
7. Akses air minum layak dan sanitasi layak 100% belum tercapai
8. Belum seluruh masyarakat mempunyai jaminan pelayanan kesehatan,

g. Penguatan gerakan nagari Madani melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan dukungan perantau

1. Belum optimalnya upaya mobilisasi potensi partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Filantropi).
2. Belum optimalnya pengendalian dan pembinaan pengelolaan pemerintahan nagari
3. Belum optimalnya sinkronisasi program nagari dengan sasaran daerah
4. Masih lemahnya pengelolaan data nagari sebagai dasar perencanaan nagari.

2. PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain:

a) Masih tingginya Angka Putus Sekolah di jenjang SD (0,02%) dan SMP (0,05%)
b) Masih terdapatnya sekolah setingkat SD dan SLTP yang belum terakreditasi minimal B.
c) Masih terdapatnya puskesmas yang belum memenuhi fasilitas dan tenga kesehatan sesuai standar
d) Masih tingginya angka stunting (20,1%)
e) Belum optimalnya standar pelayanan kesehatan, seperti pada usia lanjut, penderita diabetes dan penderita hipertensi.
f) Belum optimalnya penanganan kawasan permukiman kumuh
g) Belum optimalnya Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain :

a) Masih rendahnya rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kab/Kota terhadap usaha izin lingkungan , izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten

b) Masih rendahnya Persentase persetujuan teknis pengelolahan limbah bahan berbahaya dan beracun

c) Masih rendahnya Persentase pengelolaan persampahan.

d) Masih rendahnya Persentase unit organisasi yang melakukan penyusutan arsip

e) Masih rendahnya Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan.

f) Masih rendahnya Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

Permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan pemerintahan pilihan antara lain :

a) Masih rendahnya produksi perikanan budidaya.

b) Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD

c) Masih rendahnya produksi beberapa produk pertanian dan perkebunan seperti padi, jagung, cabe merah, bawang merah, manggis dan jeruk

d) Belum optimalnya pertumbuhan industri

4. Unsur Pendukung, Penunjang, Pengawasan Urusan Pemerintahan, Kewilayahan dan Pemerintah Umum

Permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan tersebut antara lain :

a. Masih tingginya deviasi realisasi belanja terhadap total belanja

b. Masih tingginya deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD

c. Masih rendahnya rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).

2.2. Arah kebijakan Keuangan Daerah

Arah Kebijakan Keuangan Daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, hal ini dikarenakan pembiayaan pelaksanaan pembangunan tergantung pada kemampuan keuangan daerah,

sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Perlunya faktor pengelolaan keuangan daerah dengan manajeman yang baik agar tercapai keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan.

KUA Tahun Anggaran 2025 sebagai dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode tahun 2025, telah mengalami perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.

Berkenaan kondisi tersebut, maka disusunlah Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 yang akan dijadikan dasar penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan Pemerintah Kabupaten Agam tahun 2025 pada masing-masing jenis pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
    a. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah
    b. Pendataan yang komprehensif, untuk memastikan seluruh potensi pajak terdaftar dan tertagih.
    c. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan penyuluhan pajak daerah
    d. Peningkatan pengawasan dan pengendalian.
    e. Digitalisasi pengelolaan pajak daerah (pelayanan, pelaporan dan pembayaran) untuk kemudahan dalam pelayanan, efisiensi, mengurangi potensi kebocoran.
    f. Reward dan Punishment, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
    g. Pemenuhan kebutuhan pegawai/SDM yang berkualifikasi/ bersertifikasi.
    h. Peningkatan Kualitas Layanan
    i. Peningkatan Kinerja BUMD

j. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang idle

2. Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Transfer meliputi :

   a. Meningkatkan akurasi data daerah sebagai dasar perhitungan pembagian Dana Perimbangan, diantaranya jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, luas wilayah, jumlah desa, inflasi, jumlah ASN dan lain-lain.

   b. Meningkatkan kelengkapan dan akurasi data pendukung, readinees criteria untuk pengusulan program kegiatan yang diharapkan mendapat sumber pendanaan dari Pemerintah Pusat.

   c. Meningkatkan sinergitas dan sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah dan nasional.

   d. Meningkatkan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pengusulan Dana Perimbangan dan mentaati kewajiban pelaporan realisasi DAU dan DAK secara tertib.

   e. Melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dalam peningkatan penerimaan pajak provinsi dan penghitungan besaranalokasi bagi hasil untuk daerah dari pajak provinsi.

2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA berupa pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah karena adanya efisiensi dan pergeseran anggaran belanja serta pelaksanaan kebijakan lainnya yang bersifat penting dan prioritas.

Oleh karena itu arah kebijakan belanja pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 yaitu menindaklanjuti beberapa ketentuan antara lain:

1) Menyesuaikan arah kebijakan, visi, misi, dan prioritas pembangunan dengan kepemimpinan kepala daerah yang baru dilantik. Perubahan ini dimaksudkan agar dokumen perencanaan mampu mengakomodasi program prioritas kepala daerah terpilih yang telah ditetapkan dalam dokumen visi dan misi saat pencalonan, sehingga terdapat keselarasan antara dokumen perencanaan daerah dengan agenda strategis Kepala Daerah.

2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBDN dan APBD Tahun 2025 dan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja dalam APBD yang mengamanatkan bahwa Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk membatasi Belanja untuk Kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi dan seminar/FGD, mengurangi Belanja Perjalanan Dinas sebesar 50%, menfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik dan melakukan penyesuain belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah.

3) Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian rincian Alokasi TKD menurut Provinsi/Kab/Kota dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 yang mana Kabupaten Agam mengalami efisiensi Dana Alokasi Khusus Fisik Irigasi sebesar Rp.6.142.428.000,- dan efisiensi Dana Alokasi Umum Yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp.31.337.163.000,- sehingga terjadi pengurangan Dana Transfer ke Kabupaten Agam sebesar Rp.37.479.591.000,-.

4) Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan pendanaan sampai dengan Triwulan I tahun 2025 yang mengharuskan dilakukannya perubahan atas rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan menyesuaikan dengan efisiensi anggaran yang dilaksanakan sebelumnya.

5) Capaian beberapa target Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024 sudah melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2025, sehingga perlu dilakukan penyesuaian target di perubahan Rencana Kerja Pemerinta Daerah Tahun 2025.

6) Hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2025, program unggulan Kepala Daerah, serta penyesuaian terhadap pagu definitif Dana Transfer serta dalam rangka konsistensi dan keselarasan serta kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Agam dengan lebih efisien dan efektif.

7) Mengakomodir pergeseran yang telah dilakukan sebelum perubahan APBD Tahun 2025 sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Agam Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Agam Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Peraturan Bupati Agam Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Agam Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Maka berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2025 Belanja Daerah pada Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar 1,28% atau sebesar Rp.20.934,249.602,17,- dari semula Rp.1.630.294.453.378,69- menjadi sebesar Rp.1.651.228.702.980,86-.

2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pada pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2025 terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA berupa perubahan sumber Pendanaan dari penerimaan pembiayaan daerah yaitu Hasil Audit BPK RI terhadap pengelolaan keuangan daerah dan ditetapkannya Sisa Lebih Tahun Anggaran 2024 sebesar sebesar Rp. 39.578.636.185.73 terdapat penurunan dari yang diperkirakan dalam APBD Awal 2025 yaitu sebesar Rp.18.397.774.021,27 dari semula sebesar Rp.57.976.410.207,69. sehingga Arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 adalah menyesuaikan SiLPA Tahun 2024 dengan Hasil Audit BPK RI Terhadap LKPD Tahun 2024 yaitu yang menggambarkan terjadinya Penurunan Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Selanjutnya SiLPA Sebesar Rp. 39.578.636.185.73,- terdiri atas SiLPA pada Kas Daerah dan SiLPA diluar Kas Daerah. SiLPA didalam Kas Daerah sesuai hasil Audit BPK tersebut adalah sebesar Rp.3.372.232.042,59,- yang bersumber dari Dana DAU yang ditentukan dan SiLPA yang berada diluar Kas Daerah adalah sebesar Rp.36.206.404.143,14,- yang terdiri dari Sisa BLUD Puskesmas sebesar Rp.7.522.721.413,-, Sisa BLUD RSUD sebesar Rp.25.763.324.039,53,- Sisa Bantuan Operasional Sekolah PAUD (BOSP) adalah sebesar Rp.466.489.210,61,-, Sisa BOK Puskesmas sebesar Rp.2.375.719.357,-, dan Kas pada Bendahara pengeluaran sebesar Rp.78.059.123,- dan di bendahara penerimaan sebesar Rp.91.000.000,-.

2.3. Arah Kebijakan Provinsi Sumatera Barat

Perekonomian Sumatera Barat tumbuh sebesar 4,36% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2023 sebesar 4,62% (yoy). Penurunan sejalan dengan hampir seluruh Lapangan Usaha utama mengalami perlambatan.

Penyumbang utamanya yaitu kinerja pertanian yang menurun akibat dampak bencana alam. Inflasi Sumatera Barat pada triwulan IV 2024 sebesar 0,89% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2024 yang sebesar 1,52 % (yoy). Kondisi lapangan kerja Sumatera Barat membaik. Hal ini tecermin dari meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari 69,61% menjadi 70,28% serta menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT dari 5,94%. menjadi 5,75%. Membaiknya kondisi ketenagakerjaan tersebut sejalan dengan ketersediaan lapangan kerja yang tetap terjaga. Sejalan dengan perbaikan lapangan kerja, kesejahteraan penduduk Sumatera Barat lebih baik dibandingkan tahun 2023. Persentase penduduk miskin di Sumatera Barat pada September 2024 sebesar 5,42%, lebih rendah dibandingkan dengan posisi Maret 2023 yang sebesar 5,95%. Perbaikan tersebut terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan dengan persentase penduduk miskin yang menurun.

Perekonomian Sumatera Barat pada tahun 2025 diprakirakan tumbuh dan berada pada kisaran 4,0% (yoy) – 4,8% (yoy), didukung oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, pemulihan sektor pertanian, dan peningkatan event pariwisata. Laju inflasi Sumatera Barat pada tahun 2025 diprakirakan meningkat dibandingkan inflasi tahun 2024. Namun demikian, inflasi diprakirakan tetap terjaga berada pada rentang sasaran inflasi 2,5±1% (yoy). Peningkatan inflasi diprakirakan berasal dari perbaikan konsumsi masyarakat.

Sumatera Barat memiliki potensi ekonomi yang kuat di sektor pertanian, pariwisata, industri kreatif, serta perdagangan. Arah kebijakan ekonomi yang dapat diterapkan pada tahun 2026 untuk memaksimalkan potensi tersebut meliputi:

1. Penguatan Sektor Pertanian dan Perkebunan Berkelanjutan

   Dengan mendorong modernisasi pertanian melalui teknologi digital (smart farming) diharapkan mampu unutk mengembangkan komoditas unggulan seperti padi, jagung, kakao, kopi, dan gambir dengan sistem hilirisasi. Selain itu peningkatan akses pasar melalui kerja sama dengan industri pangan dan ekspor dan optimalisasi lahan pertanian dan pengelolaan irigasi untuk meningkatkan produktivitas sangat diharapkan bisa dicapai di tahun 2026..

2. Pengembangan Industri Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal

   Pengembangkan pariwisata berbasis alam, budaya, dan kuliner, seperti wisata halal dan ekowisata di Danau Maninjau, Harau, dan Mentawai sangat berpotensi untuk dapat ditingkatkan. Dengan meningkatkan aksesibilitas dan infrastruktur pariwisata (bandara, jalan, dan fasilitas akomodasi) serta dapat memperkuat promosi wisata dengan digital marketing serta kolaborasi dengan influencer dan travel

blogger.Dengan mengembangkan desa wisata dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam sektor pariwisata disinyalir akan mampu mendongkrak perekonomian di Sumatera Barat.

3. Penguatan Ekonomi Kreatif dan Digitalisasi UMKM

   Sejalan dengan paningatan pariwisata, penguatan ekonomi kreatif dan UMKM diharapkan mampu tumbuh berdampingan dan saling menguatkan perekonomian Sumatera Barat

4. Pengembangan Infrastruktur dan Konektivitas Regional

   Meningkatkan konektivitas antar daerah dengan pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, serta pelabuhan dan uga melakukan optimalisasi jalur perdagangan antarprovinsi dan internasional melalui penguatan sektor maritim.

5. Peningkatan Investasi dan Kemudahan Berusaha

   Memberikan insentif pajak dan kemudahan regulasi bagi investor yang menanamkan modal di Sumbar. Mengembangkan kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk sektor industri dan perdagangan. Mendorong investasi di sektor energi terbarukan seperti PLTA dan energi geothermal.

6. Penguatan Sektor Perikanan dan Kelautan

   Pengembangan budidaya ikan air tawar dan air laut secara berkelanjutan. dan peningkatan kesejahteraan nelayan melalui bantuan alat tangkap modern dan akses permodalan. Ekspansi ekspor hasil laut, seperti tuna dan ikan kerapu, ke pasar internasional.

2.4. Arah Kebijakan Nasional

Tahap awal upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai melalui RPJMN Tahun 2025-2029 yang berfokus pada penguatan fondasi transformasi. Selanjutnya, pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 secara konkret dituangkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah. Perencanaan tahunan dalam RKP Tahun 2025 disusun sebagai fondasi awal untuk dapat menghubungkan transisi estafet pembangunan antar RPJPN (periode 2005-2025 ke 2025-2045) dan antar RPJMN (periode 2020-2024 ke 2025-2029). Dengan demikian RKP Tahun 2025 berkedudukan sangat strategis, karena memuat fondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda-agenda transformasi. Tema RKP Tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 diarahkan untuk dapat mendorong pencapaian sasaran pembangunan lain yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Indeks Modal Manusia, dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan

tercapainya sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025, diharapkan dapat mendorong tersedianya lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan, penurunan ketimpangan, dan pembangunan ramah lingkungan. Lebih lanjut arah kebijakan nasional dijelaskan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi

   Pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sangat penting sebagai landasan awal dalam pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029. Upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3–5,6 persen pada tahun 2025.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

   Pada tahun 2025, prospek positif pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan penurunan pengangguran sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan akan berada pada kisaran 4,5–5,0 persen. Semakin kondusifnya perekonomian nasional juga diharapkan akan terjadi di seluruh wilayah Indonesia sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka di daerah juga akan menurun. Target Tingkat Pengangguran Terbuka wilayah Sumatera berada pada kisaran 4,2–4,7 persen.

3. Tingkat kemiskinan

   Tingkat kemiskinan pada tahun 2025 ditargetkan berada di kisaran 7,0-8,0 persen. Hal ini mempertimbangkan banyak hal antara lain kondisi dan capaian tingkat kemiskinan sebelumnya. Meskipun demikian, pemerintah berkomitmen bahwa target ini dapat tercapai sehingga tidak mengganggu Visi Indonesia Emas 2045 menuju kemiskinan 0 persen. Beberapa hal diupayakan pemerintah antara lain melalui penyusunan peta jalan pengurangan kemiskinan dengan melakukan analisis per provinsi untuk mengkaji permasalahan di masing-masing daerah yang berpotensi memengaruhi capaian tingkat nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu dijaga inklusif serta stabilitas inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan menjadi prasyarat utama kebijakan makro penurunan kemiskinan.

4. Rasio Gini

   Arah kebijakan untuk mengurangi ketimpangan antarkelompok masyarakat ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat berpenghasilan tinggi. Kedua masyarakat tersebut membutuhkan arah kebijakan dan strategi yang berbeda. Kebijakan yang tepat untuk masyarakat berpenghasilan rendah adalah kebijakan yang dapat mempertahankan daya beli dan meningkatkan pendapatan. Sementara, untuk masyarakat berpenghasilan tinggi, kebijakan yang

diterapkan adalah kebijakan yang dapat menciptakan redistribusi yang merata.

5. Indeks Modal Manusia

   Pada perencanaan pembangunan periode 2025-2045 akan digunakan indikator baru yaitu Indeks Modal Manusia yang diharapkan dapat mengukur secara komprehensif kemampuan dan kualitas daya saing sumber daya manusia. Pada tahun 2025, Indeks Modal Manusia Indonesia ditargetkan mencapai nilai 0,56 melalui upaya peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan.

6. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca

   Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai Net-Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Target ambisius tersebut telah terakomodasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, dimana diantara lima sasaran utama dalam Visi Indonesia 2045 adalah Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca menurun menuju Net-Zero Emission dengan target 93,5 persen di tahun 2045. Pada tahun 2025, penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca ditargetkan mencapai 38,6 persen. Dengan demikian diperlukan upaya penurunan emisi gas rumah kaca melalui pembangunan rendah karbon yang selaras dengan percepatan pertumbuhan ekonomi yang dilakukan dengan koridor berkelanjutan dan transformasi melalui penerapan Ekonomi Hijau yang dilakukan melalui Percepatan Transisi Energi; Ekonomi Sirkular Industri; Terciptanya pekerjaan hijau (green jobs) yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing; serta Pengelolaan Hutan Lestari.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Dalam menuju Indonesia emas 2045, tahun 2025 merupaka pijakan awal dari Rencana Jangka Panjang Nasional 2025-2045 dan juga merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tular petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca, dengan sasaran pembangunan "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".**

Tabel III.1 Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

No	Indikator Sasaran Pembangunan 2025	Target
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,6
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,5-5,0
3	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0-8,0
4	Rasio Gini (nilai)	0,379-0,382
5	Indeks Modal Manusia (nilai)	0,56
6	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6
7	Nilai Tukar Petani (Kumulatif)	113-115
8	Nilai Tukar Pelayanan (kumulatif)	104-105

Sumber RKP, 2025

Memperhatikan Rancangan Awal RPJMN sebagai tahapan pertama penjabaran RPJPN Tahun 2025-2045 dalam mewujudkan Perkuatan Fondasi Transformasi, sasaran utama pembangunan Nasional pada RPJMN 2025-2029 ditargetkan:

1. Pendapatan Per Kapita setara negara Maju, yang diwakili oleh
   - Pertumbuhan ekonomi menuju 8% tahun 2029.
   - GNI Perkapita sebesar 7.400-8,240 USD.
   - Kontribusi PDB Maritim sebesar 9,1 %
   - Kontribusi PDB Manufaktur sebesar 21,9%
2. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, dengan masing-masing target:
   - Tingkat kemiskinan mencapai 4,5 – 5.0% (dengan tingkat kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada dua tahun pertama pemerintahan.
   - Rasio gini sebesar 0,372-0,375

3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, dengan target Global Power Index pada tahun 2029 berada di ranking 29.
4. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dengan target indeks modal manusia pada tahun mencapai 0,59.
5. Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero* yang tergambarkan melalui penurunan intensitas emisi GRK menjadi 62,37% dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi 77,20 pada tahun 2029.

Dalam mendukung pencapaian target dimaksud untuk membangun fondasi yang kuat dalam merealisasikan sasaran pembangunan nasional, disusun Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*), yaitu:

1. Memberi makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap.
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbungn pangan desa, daerah dan nasional.
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi disetiap Kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
6. Meningkatkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Prioritas pembangunan nasional tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia

   Kebijakan difokuskan pada penguatan kebebasan pers, mimbar akademik, hak berkumpul dan berpendapat secara akuntabel, serta modernisasi parlemen yang transparan, transformatif, dan responsif, didukung pengaturan media massa yang edukatif, objektif, dan bebas kekerasan atau stereotip gender dengan mekanisme monitoring terstruktur. Sementara itu, penegakan HAM meliputi revisi regulasi anti-diskriminasi, protokol perlindungan dan penegakan hukum bagi perempuan dan anak, serta mainstreaming perspektif gender dan inklusivitas di semua kebijakan. Pemenuhan hak dasar bagi fakir miskin,

anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya diintervensi melalui skema bantuan sosial terintegrasi dan percepatan akses layanan keadilan, dengan pemantauan kinerja sektoral.

2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru

Pemerintah memperkuat pertahanan dan keamanan nasional melalui modernisasi alutsista, penguatan cadangan dan kapabilitas cyber, serta sinergi instrumen TNI–Polri di perbatasan dan dalam penanggulangan terorisme, disertai peningkatan profesionalisme personel. Industri pertahanan dan diplomasi dikembangkan lewat peningkatan kapasitas industri strategis dalam negeri, transformasi tata kelola, pembangunan infrastruktur smart diplomacy, dan pemanfaatan potensi diaspora. Di bidang ekonomi, kebijakan difokuskan pada swasembada pangan, energi, dan air; digitalisasi UMKM, pengembangan ekonomi hijau, biru, dan syariah; serta pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati, dengan tujuan pertumbuhan berkelanjutan dan peningkatan ketahanan nasional.

3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

Pemerintah memperkuat infrastruktur terintegrasi jalan daerah, jaringan transportasi, pelabuhan transhipment, dan konektivitas digital hingga desa serta mendorong kewirausahaan dengan pemanfaatan tenaga kerja lokal, insentif usaha, revitalisasi pasar, dan pendampingan UMKM. Memperkuat regulasi kelembagaan koperasi, akses terhadap dana bergulir, dan revitalisasi unit desa dengan dukungan BUMN. Pengembangan industri kreatif dan pariwisata berkelanjutan berbasis budaya, hak cipta, klaster kreatif, inkubasi riset, serta prinsip ekonomi sirkular. Memperdalam sektor keuangan dengan diversifikasi produk perbankan, perluasan kredit produktif, penguatan asuransi, fintech, pasar modal, dan program inklusi serta literasi keuangan.

4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

Pemerintah memperkuat SDM dengan percepatan wajib belajar 13 tahun, revitalisasi PAUD dan pendidikan nonformal, pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan upskilling sesuai kebutuhan pasar kerja. Layanan pendidikan tinggi dan riset didorong melalui program afirmatif, peningkatan akreditasi, kolaborasi industri, dan pendanaan IPTEK. Sistem kesehatan diperkuat dengan jaminan kesehatan universal, pencegahan

stunting, kemandirian industri farmasi, reformasi BPJS, serta peningkatan layanan primer dan pemberdayaan komunitas. Inklusi sosial difokuskan pada pemberdayaan perempuan, pemuda, anak, lansia, dan penyandang disabilitas, infrastruktur ramah disabilitas, sedangkan olahraga ditingkatkan melalui program siswa-atlet dan pembinaan atlet.

5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

Pemerintah mendorong pengembangan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui pembiayaan inovatif, insentif fiskal/nonfiskal, penguatan ekosistem industri, aglomerasi kawasan industri, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta pengembangan industri hijau berbasis pertanian berkelanjutan. Selain itu, diperkuat juga industri padat karya, industri dasar, dan strategis nasional seperti kimia, farmasi, elektronik, kendaraan listrik, dan semikonduktor. Untuk memperkuat integrasi ekonomi domestik dan global, strategi dilakukan melalui pengembangan pusat pertumbuhan baru, penguatan konektivitas, sistem logistik nasional, peningkatan investasi prioritas dan ekspor, serta partisipasi aktif dalam rantai nilai global. Pendekatan pembangunan juga dilakukan dari desa dan akar rumput untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan pengentasan kemiskinan.

6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

Pembangunan desa difokuskan pada peningkatan daya saing, produktivitas, dan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan ekonomi lokal, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, serta pengembangan berbasis potensi dan karakteristik desa. Upaya ini juga mencakup percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, dan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru. Pemerataan ekonomi dilakukan melalui pembangunan wilayah metropolitan dan Ibu Kota Nusantara yang berkelanjutan dan inklusif, peningkatan akses terhadap hunian layak, pemberdayaan UMKM, serta penyediaan infrastruktur konektivitas dan layanan publik. Sementara itu, pemberantasan kemiskinan dilaksanakan dengan integrasi program bantuan sosial berbasis data Registrasi Sosial Ekonomi, perluasan jangkauan jaminan sosial, serta perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan secara menyeluruh, adaptif, dan inklusif, dengan fokus pada wilayah miskin, rentan, dan tertinggal.

7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

Pemerintah merancang reformasi menyeluruh di berbagai sektor untuk memperkuat fondasi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Reformasi politik mencakup pendanaan politik yang transparan, sistem kependudukan terpadu, dan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Di sektor hukum, fokus pada penguatan lembaga hukum, peningkatan kompetensi aparat peradilan, pemberantasan korupsi, dan pelayanan hukum yang adil. Reformasi tata kelola pemerintahan diarahkan pada peningkatan integritas ASN, digitalisasi pelayanan, manajemen talenta, dan sinergi pusat-daerah. Transformasi digital difokuskan pada layanan publik yang efisien dan inklusif. Tata kelola keuangan negara diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan inovatif. Kebijakan fiskal dan moneter difokuskan pada pengendalian inflasi, hilirisasi pangan, dan logistik. Pencegahan narkoba dan perjudian ditingkatkan melalui edukasi, rehabilitasi, dan penegakan hukum. Penguatan BUMN dilakukan melalui restrukturisasi dan pelibatan dalam proyek strategis nasional di sektor kesehatan, industri, energi, logistik, pariwisata, dan infrastruktur.

8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan harmonis melalui penguatan persatuan, gotong royong, dan nilai-nilai kebhinekaan. Kebebasan beragama dijamin dengan peningkatan layanan keagamaan dan dukungan terhadap ekosistem keumatan. Pelestarian budaya dilakukan lewat revitalisasi situs budaya, penguatan komunitas seni, dan diplomasi budaya. Penanganan bencana difokuskan pada peningkatan mitigasi, sistem peringatan dini, pembangunan infrastruktur tangguh, serta adaptasi terhadap perubahan iklim melalui kolaborasi lintas sektor.

3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 adalah ***Akselerasi Produktivitas Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan Berkelanjutan.***

Prioritas Pembangunan RKPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2026 adalah:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

4. Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi berbasis Digital
5. Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Berdaya Saing Kepariwisataan
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas

Sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 mengacu kepada Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 - 2029 yaitu: " Sumatera Barat Madani Yang Maju Dan Berkeadilan"

Selanjutnya Visi dijabarkan dalam Misi, Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 -2029 Tujuan dan sasaran pada setiap misi, memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel III.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

VISI: Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi I Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia
		Meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung produktivitas.
Misi II Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan	Terwujudnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan yang berkualitas dan keberlanjutan
		Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang

VISI: Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan		
Misi	Tujuan	Sasaran
		berkelanjutan
Misi III Nigari/ Desa sebagai Basis Kemajuan	Kota sebagai pusat pertumbuhan dengan nagari/desa sebagai basis kemajuan yang mandiri dan berdaya saing	Meningkatnya kemandirian ekonomi desa/nagari berbasis potensi lokal
		Meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan dasar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa/nagari/kelurahan
Misi IV Sumatera Barat pusat perdagangan dan bisnis Sumatera Bagian Barat	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui penguatan perdagangan, investasi, industri, dan inovasi	Meningkatkan investasi, perdagangan, dan daya saing industri daerah
		Memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkualitas
		Mendorong pertumbuhan UMKM dan industri kecil-menengah sebagai pilar ekonomi daerah
Misi V Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana	Terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh bencana, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Resiliensi Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
		Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang produktif dan berkelanjutan
		Memperkuat konektivitas dan aksesibilitas wilayah serta pemanfaatan teknologi dalam pembangunan infrastruktur
Misi VI	Terwujudnya masyarakat beradat	Memperkuat nilai adat, budaya, dan kearifan lokal

VISI: Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan		
Misi	Tujuan	Sasaran
Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas	dan berbudaya yang harmonis, religius, serta berbasis keluarga berkualitas	dalam kehidupan masyarakat
		Meningkatnya perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender
		Terwujudnya lingkungan sosial yang aman dan harmonis berbasis keluarga berkualitas
Misi VII Tingkatkan daya Saing Pariwisata dan Akselesari Ekonomi Kreatif untuk UMKM	Pariwisata yang berdaya saing dan akselerasi ekonomi kreatif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah
		Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung pertumbuhan UMKM
Misi VIII Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik Yang Efektif	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang efektif.	Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan
		Meningkatnya kualitas layanan publik dan kinerja keuangan daerah

Sumber : RKPD Prov Sumatera Barat 2026

Adapun proyeksi Target Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 sebagaimana tabel berikut.

Tabel III.3 Proyeksi Indikator Makro

No	Indikator Makro Pembangunan	Proyeksi 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,05
2	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	62,29
3	TPT (%)	5,55
4	IPM	77,41
5	Kemiskinan (%)	5,65
6	Gini Rasio	0,290

Sumber : RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Mempertimbangkan kondisi daerah, target RPJPD, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu strategis dan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka dirumuskan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Agam Tahun 2025-2029 **"Agam Madani yang Maju, Adil dan Sejahtera".**

Visi tersebut diatas selanjutnya dijabarkan dalam misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Misi yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Agam selama 5 (lima) tahun kedepan adalah:

1. Tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, syarak mangato adat mamakai"
2. Tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional
3. Sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas, inovatif dan berdaya saing
4. Ekonomi yang tangguh dan berkeadilan
5. Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dan meningkatkan ketangguhanmitigasi bencana
6. Pengembangan wilayah berbasis nagari untuk membangun kemandirian, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat

Secara lebih rinci keterkaitan misi, tujuan dan sasaran beserta indikator dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel III.4 Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029

MISI	TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR	Capaian 2024	2025	Keterangan
Misi I : Tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, syarak mangato adat mamakai"							
	1.1.	Terciptanya masyarakat yang beradab yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat		Persentase Nagari Dengan Level Madani V	14,13	18.48	
			Meningkatnya pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai agama	Tingkat Penerapan Nilai-Nilai Agama	68,64	69,61	
			meningkatnya pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai adat, budaya dan kearifan lokal.	Tingkat Penerapan Nilai-Nilai Adat, Budaya, dan Kearifan Lokal	62,55	63,70	
			Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Keamanan	96,7	91.5	
Misi II : Tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional							

MISI	TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR	Capaian 2024	2025	Keterangan
	2.1	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	75,84	79 (BB)	
			Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah	Maturitas SPIP	3,152	3,160	
				Nilai SAKIP	B(67,11)	67,89	
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Na	77,50	
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,56	2.65	
				Indeks Sistem Merit	Na	280	
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Na	3,50	
Misi III : Sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas, inovatif dan berdaya saing							
	3.1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berkarakter.		IPM	75,08	75.75	
			Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berkarakter	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,23	9.75	
				Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,16	14.4	
			Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas	Usia Harapan Hidup (tahun)	74,39	74.51	
			Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Na	0,33	
				Indeks Daya Saing Pemuda Olahraga	Na	39,49	
Misi IV Ekonomi yang tangguh dan berkeadilan							
	4.1	Terwujudnya Ekonomi Daerah yang kuat, inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan		Laju pertumbuhan ekonomi	4,12	4,41	
				IDSD	3,62	3.64	
			Meningkatnya produktivitas Sektor pertanian, perikanan dan industri Pengolahan	Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan (%)	26,26	28,21	
				Rasio PDRB Industri Pengolahan	10,33	10.2	
			Meningkatnya kontribusi usaha pariwisata, ekonomi kreatif	Rasio Kewirausahaan	NA	3.89	
				Rasio PDRB Akomodasi Mamin	0,89	0.96	

MISI	TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR	Capaian 2024	2025	Keterangan
			dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (Jasa Lainnya)		0.91	
			Meningkatnya investasi daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,71	30,02	
	4.2	Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan daerah		Gini Rasio	0,249	0.248	
				Pendapatan per kapita (ribu)		57849,63	
				Angka Kemiskinan	6,83	6,50	
			Meningkatnya keterjangkauan dan ketersediaan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	86,92	86,93	
			Meningkatnya kesempatan kerja dan produktifitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran terbuka	4,73	4.71	
				Produktivitas tenaga kerja	88,52	98,35	
			Meningkatnya perlindungan sosial	% PPKS yang mendapatkan perlindungan sosial	90,89	90,91	
Misi 5 : Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dan meningkatkan ketangguhan mitigasi bencana							
	5.1	Terwujudnya pembangunan yang inklusif dan ramah lingkungan serta adaptif terhadap risiko bencana.		Indeks Risiko Bencana (IRB)	205,29	200,28	
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,74	76,9	
			Meningkatnya ketahanan daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Rendah (0,33)	C Rendah (0,55)	
	5.2	Meningkatnya kualitas infrastruktur yang tangguh dan merata		Indeks Pembangunan Infrastruktur	Na	41,52	
			Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar 1	RT dengan Akses Sanitasi Aman	na	15,40	
				Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman (Perpipaan)	na	17,95	
				Jalan dalam kondisi mantab	58	60	

MISI	TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR	Capaian 2024	2025	Keterangan
			Meningkatnya konektivitas wilayah	Indeks Konvektivitas Wilayah	Na	69	
			Meningkatnya pemukiman rumah layak huni	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	Na	73,75	
Misi VI. Pengembangan wilayah berbasis nagari untuk membangun kemandirian, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat							
	6.1	Terselenggaranya pengembangan wilayah berbasis nagari		Indeks Desa	Na	8,87	
			Meningkatnya kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri	32,61	35 %	

Sumber: Rancangan Perda RPJMD Tahun2025-2029

Dalam mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan, pengendalian dan evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan memberikan gambaran riil capaian pembangunan di Kabupaten Agam. Hasil evaluasi ini menjadi salah satu dasar dalam perumusan isu strategis sebagai dasar penyusunan prioritas daerah tahun 2025. Selain itu dalam penyusunan tema dan prioritas juga memperhatikan kebijakan pembangunan propinsi Sumatera Barat, Kebijakan pembangunan Nasional, amanat penerapan Standar Pelayanan Minimal, mandatory yang harus dipenuhi dan isu-isu berkembang yang menjadi aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD dan proyeksi kemampuan keuangan daerah tahun 2025. RKPD Tahun 2025 disusun dengan pendekatan teknokratik,politik, partisipatif, *Top Down* dan *Bottom Up* dengan pengarasutamaan pendekatan substantif, Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Target Indikator Makro Tahun 2025 disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.5
Indikator Sasaran Makro dan Target Pembangunan Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	Target Nasional	Target Prop. Sumatera Barat	Target Kab. Agam
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5,3-5,6	5,05	4,41
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,5-5,0	5,55	4,71
3.	Tingkat Kemiskinan	7,0-8,0	5,65	6,50
4.	Rasio Gini	0,379-0,382	0,290	0.248
5.	Indeks Pembangunan Manusia	IMM 0,56	77,41	75,75

Sumber : RKP 2025, RKPD Prop. Sumatera Barat, RKPD Kab. Agam

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan mengembangkan sektor basis (pertanian, usaha mikro dan pariwisata) melalui investasi dalam infrastruktur yang memadai, pendidikan dan pelatihan yang berkualitas untuk mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten, dukungan untuk riset dan inovasi, pemberdayaan mikro, promosi investasi baik domestik maupun asing, serta kebijakan pemerintah yang mendukung dan

regulasi yang kondusif. Sejalan dengan program unggulan daerah dibidang pertanian seperti Sawah Pokok Murah dan asruransi tani serta pengembangan nagari creative hub berbasis masjid diharapkan dapat menjadi pengungkit tumbuhnya perekonomian masyarakat.

Dalam menangani Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), kemiskinan, dan rasio Gini perlu dilakukan pendekatan holistik. Penciptaan lapangan kerja dengan mendorong investasi dalam sektor-sektor yang mempekerjakan banyak tenaga kerja, meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui program pendidikan dan pelatihan, program bantuan sosial dapat membantu mengurangi kemiskinan dan mengurangi ketidaksetaraan pendapatan yang tercermin dalam rasio Gini. Begitu juga dukungan terhadap Usaha Mikro yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi lokal dan pencipta lapangan kerja. Selain itu, program unggulan menciptakan 1000 entrepeneur muda diharapkan sebagai strategi akseleratif dalam menumbuhkan kewirausahaan dikalangan henerasi produktif, sekaligus menjadi salah satu upaya efektif dalam menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka melalui penciptaan lapangan kerja mandiri dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis inovasi dan kemandirian usaha.

Dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) harus diprioritaskan pada sektor-sektor kunci yaitu pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Meliputi investasi dalam akses pendidikan yang merata, peningkatan mutu layanan kesehatan, dan penguatan sistem perlindungan sosial untuk melindungi kelompok rentan. Selain itu juga harus menkadi perhatian setiap individu memiliki akses yang sama terhadap layanan dasar dan kesempatan untuk berkembang.

Prioritas pembangunan tahun 2025 diterjemahkan dalam tema pembangunan daerah tahun 2025 ***"Pembangunan Berkelanjutan melalui Penguatan Sektor Ekonomi Basis, Peningkatan Daya Saing & Sumber Daya Manusia"***

Dengan prioritas pembangunan:

1. Tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, syarak mangato adat mamakai"
2. Tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional
3. Sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas, inovatif dan berdaya saing
4. Ekonomi yang tangguh dan berkeadilan
5. Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dan meningkatkan ketangguhanmitigasi bencana

6. Pengembangan wilayah berbasis nagari untuk membangun kemandirian, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat

Adapun intergrasi dari prioritas pembangunan kabupaten agam dijabarkan sebagai berikut :

1. **Tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, syarak mangato adat mamakai"**

   Masyarakat Kabupaten Agam yang berkarakter, beriman dan berbudaya merupakan cita-cita luhur yang perlu disikapi dengan serius. Terutama dalam menghadapi penurunan penghayatan dan pengamalan ajaran agama, khususnya di kalangan generasi muda, yang dipengaruhi oleh derasnya arus globalisasi, modernisasi, dan perkembangan teknologi digital. Selain itu, terdapat kecenderungan melemahnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan sehari-hari, yang menyebabkan pergeseran norma sosial dan budaya masyarakat. Permasalahan lainnya adalah rendahnya ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi perubahan zaman, minimnya regenerasi tokoh adat dan agama sebagai teladan, serta masih adanya kesenjangan antarwilayah dalam pelaksanaan program pembinaan mental, spiritual, dan budaya.

   Terdapat beberapa isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian. Pertama, pentingnya penguatan pendidikan karakter berbasis agama dan adat melalui lembaga pendidikan formal dan nonformal. Kedua, perlunya revitalisasi dan pelestarian nilai-nilai ABS-SBK untuk memperkuat jati diri masyarakat. Ketiga, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan keagamaan dan adat untuk menjadi motor penggerak pembinaan masyarakat. Keempat, pentingnya membangun sinergi antarsektor dalam pelaksanaan program pembangunan di bidang pendidikan, keagamaan, sosial, dan budaya. Kelima, perlu ditingkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan keagamaan, adat, dan sosial yang berlandaskan kearifan lokal.

   Melalui tagline "***Bangkik dari Surau"*** program program unggulan disusun untuk menjembatani hubungan spiritual, sosial, dan budaya masyarakat melalui holistik dan kearifan lokal. Pembangunan daerah tidak hanya difokuskan pada aspek fisik dan pertumbuhan ekonomi, namun juga diarahkan pada pembentukan manusia dan masyarakat yang memiliki karakter kuat, berlandaskan nilai-nilai religius dan budaya. Nilai-nilai inilah yang menjadi landasan utama bagi keberlanjutan pembangunan serta kemajuan peradaban daerah di masa mendatang.

Program Unggulan ***Agam Religius*** diluncurkan dengan mengusung kegiatan:

a) Gerakan Nagari Madani

b) Insentif bagi Pondok Pesantren, Garin, Penyuluh, Guru TPA/MDTA, guru Tahfiz dan Imam Masjid serta Beasiswa ke Timur Tengah

c) Menciptakan Nagari Creative Hub Berbasis Masjid

Melihat kompleksitas permasalahan tersebut serta pentingnya menjaga identitas sosial budaya masyarakat Agam, maka pembangunan mental, pengamalan agama, dan penguatan nilai-nilai ABS-SBK ditetapkan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Prioritas ini dipilih karena bersifat strategis untuk memperkuat identitas daerah di tengah arus perubahan global, menjadi upaya preventif terhadap potensi degradasi moral dan disintegrasi sosial, serta mendukung visi Kabupaten Agam yang berlandaskan pada nilai agama, adat, dan budaya. Selain itu, prioritas ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan, dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman, dan sejahtera. Prioritas ini di laksanakan melalui **Gerakan Penguatan ABS-SBK Berbasis Nagari**.

Tabel III.6

Tujuan dan Sasaran Priortas Tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, syarak mangato adat mamakai”

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Capaian 2024	2025
Terciptanya masyarakat yang beradab yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat		Persentase Nagari Dengan Level Madani V	14,13	18.48
	Meningkatnya pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai agama	Tingkat Penerapan Nilai-Nilai Agama	68,64	69,61
	meningkatnya pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai adat, budaya dan kearifan lokal.	Tingkat Penerapan Nilai-Nilai Adat, Budaya, dan Kearifan Lokal	62,55	63,70
	Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Keamanan	96,7	91.5

Dengan arah Kebijakan:

1. Penguatan pendidikan keagamaan, kelembagaan dan kehidupann sosial religius masyarakat, melalui:

a. Sosialisasi dan implementasi gerakan nagari madani

b. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan keagamaan di tingkat nagari dan sekolah formal.

c. Fasilitasi dan penguatan kapasitas kelembagaan keagamaan, seperti MDA, pesantren, dan majelis taklim.

d. Menjadikan surau sebagai titik tolak pembangunan karakter masyarakat, khususnya generasi muda dan anak-anak Pemberdayaan pemuda dalam pelestarian adat dan agama

e. Peningkatan nilai-nilai ABS-SBK dalam sendi kehidupan masyarakat

2. Penguatan dan pelestarian nilai-nilai adat dan budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat, melalui:

   a. Fasilitasi pelestarian adat dan budaya lokal melalui dokumentasi, revitalisasi tradisi, dan dukungan terhadap kegiatan budaya masyarakat.

   b. Penguatan peran kelembagaan dan tokoh adat

   c. Pengembangan program berbasis budaya lokal dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan pariwisata daerah.

   d. Integrasi nilai-nilai adat dan budaya dalam sistem pendidikan formal dan non formal

   e. Pelestarian dan pengembangan warisan budaya takbenda dan benda

3. Peningkatan kapasitas dan sinergi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, melalui:

   a. Penguatan koordinasi dan kolaborasi antar Lembaga

   b. Peningkatan kapasitas aparatur penegak perda dan layanan tramtibum

   c. Pelaksanaan sosialisasi, edukasi, dan kampanye ketertiban umum di lingkungan masyarakat, sekolah, dan tempat umum

   d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan

Tabel III.7

Program Pembangunan Mendukung Tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, syarak mangato adat mamakai

No	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Target	Pendanaan	Perangkat Daerah

No	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Target	Pendanaan	Perangkat Daerah
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	1.083.202.400,00	KesbangPol
2	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase koorsinasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	100%	66.933.500,00	Kecamatan
3	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peningkatan cakupan pendidikan wawasan kebangsaan (%)	50%	1.208.449.304,00	KesbangPol
4	Program Peningkatan Partai Politik dan Tenaga Pendidik Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase parpol yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat masyarakat (%)	100%	913.992.812,00	KesbangPol
5	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ORMAS yang aktif Persentase ormas yang aktif (%)	35%	2.984.000,00	KesbangPol
6	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah pembinaan dan pengembangan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang difasilitasi	5 Kegiatan	45.529.580,00	KesbangPol
7	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase cakupan pencegahan/tangkal dini konflik (%)	80%	841.965.000,00	KesbangPol
8	Program Pemberdayaan lembaga kemasayarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Nagari	100%	3.039.894.469,00	DPMN

No	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Target	Pendanaan	Perangkat Daerah
9	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan dibidang bina mental spritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana	100%	17.452.674.737,00	Bagian Kesra
10	Program Pengembangan Kebudayan Daerah	Persentase Lembaga adat yang menerapkan tradisi dan budaya	70%	204.885.000,00	Disdikbud
11	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah sanggar dan group seni tradisional yang aktif Jumlah sanggar seni yang akti	192 sanggar 256 Unit	440.000.000,00	Disdikbud
12	Program Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang di tetapka	51 65 buah Unit	253.020.000,00	Disdikbud
13	Program Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Kunjungan Museum Jumlah kunjungan Museum (orang	20500 orang	1.014.774.500,00	Disdikbud
14	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	16,02 persen	358.528.000,00	Dalduk KB
15	Program Perlindungan Perempuan	Presentase perempuan korban kekerasan dan tindak Pidana perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatka layanan Komperhensif	100%	76.401.451,00	Dalduk KB
16	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase pemenuhan pilarpilar kualitas keluarga.	83,3 persen	150.000.000,00	Dalduk KB
17	Program Pengelolaan Data Gender dan Anak	Persentase Penyajian Data Gender dan Anak	100%	14.324.000,00	Dalduk KB
18	Program Pemenuhan Hak Anak	Indeks pemenuhan hak anak (IPHA)	80 Persen	130.484.000,00	Dalduk KB
19	Program Perlindungan	Persentase anak memerlukan	100%	351.341.199,00	Dalduk KB

No	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Target	Pendanaan	Perangkat Daerah
	Khusus Anak	perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif			
20	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks pembangunan keluarga (iBangga) (%)	56.12 persen	2.583.991.685,00	Dalduk KB
			JUMLAH	30.233.375.637	

2. Tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional

Tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Agam untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Pemerintahan yang baik (*good governance*) ditandai dengan partisipasi masyarakat, transparansi, responsivitas, serta efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik. Pemerintahan yang bersih (*clean government*) berarti terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menjunjung tinggi integritas dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, pemerintahan profesional mengutamakan kompetensi aparatur, etos kerja yang tinggi, serta sistem birokrasi yang modern dan adaptif terhadap perubahan.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang ideal tersebut, Pemerintah Kabupaten Agam masih menghadapi sejumlah permasalahan dan isu strategis. Masih belum optimalnya kualitas pelayanan publik di sejumlah sektor, kurang optimalnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta perlunya penguatan sistem pengawasan internal untuk mencegah adanya celah bagi praktik-praktik penyimpangan. Selain itu, kapasitas dan kompetensi sebagian aparatur sipil negara (ASN) belum sepenuhnya memadai untuk menjawab tuntutan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang semakin kompleks. Terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses administrasi pemerintahan juga menjadi kendala dalam menciptakan birokrasi yang efisien dan responsif. Masih terdapat budaya kerja birokrasi yang belum adaptif terhadap perubahan dan inovasi, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan publik.

Berangkat dari berbagai permasalahan dan tantangan tersebut, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional menjadi salah satu prioritas utama pembangunan di Kabupaten Agam. Langkah-langkah strategis diarahkan pada penguatan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja, peningkatan kapasitas dan integritas ASN, digitalisasi layanan publik, serta optimalisasi peran

masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Dengan demikian, pemerintahan daerah diharapkan mampu menjadi motor penggerak transformasi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.

Program unggulan **Agam Melayani** merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Agam dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Melalui percepatan reformasi birokrasi dan pemanfaatan teknologi informasi, program ini mendorong pelayanan publik yang cepat, mudah, dan akuntabel, termasuk dengan digitalisasi layanan dan pembangunan gedung bersama di setiap kecamatan. Prioritas ini didukung dengan **Gerakan Terpadu Reformasi Birokrasi.**

Tabel III.8

Tujuan dan Sasaran Priortas Tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Capaian 2024	2025
Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	75,84	79 (BB)
	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah	IPKD MCP	3,152	3,160
		Nilai SAKIP	B(67,11)	
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Na	77,50
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,56	2.65
		Indeks Sistem Merit	Na	280
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Na	3,50

Dengan arah kebijakan:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, berbasis kinerja, dan didukung oleh penguatan pengawasan internal serta pemanfaatan teknologi informasi, melalui:
    a. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang terintegrasi dan akuntabel.
    b. Penguatan sistem pengawasan internal dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
    c. Peningkatan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan dan pengawasan publik.
    d. Pengembangan dan optimalisasi sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk mendukung efisiensi dan transparansi layanan.
    e. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah

f. Peningkatan kemandirian keuangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah

2. Penguatan sistem pelayanan publik berbasis digital, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, melalui:

   a. Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis digital dan terintegrasi serta Penyederhanaan prosedur dan waktu pelayanan

   b. Penguatan kapasitas SDM pelayanan publik untuk mendukung transformasi layanan yang cepat, adaptif, dan humanis.

   c. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam evaluasi dan perbaikan kualitas layanan public.

Tabel III.9

Program yang Mendukung Prioritas Tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional

No	Program Pembangunan Daerah	Kinerja				Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target	Pendanaan	
1	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	persentase keselaran dokumen perencanaan OPD dengan dokumen perencanaan daerah (Renstra, Renja) (%)	%	100	270.372.000,00	Bappeda
2	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan darrah (%)	%	100	31.605.000,00	Bappeda
3	Program penelitian dan pengembangan daerah	persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan pembangunan dan peningkatan kinerja	%	100	1.076.142.400,00	Bappeda
4	Semua program di perangkat daerah pelayanan publik, program di kecamatan (RSUD, Puskesmas, Capil, DPMPTSP. DPRD)	Indek Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik meningkat	Indeks	84.05.00	111.561.779.099,00	
5	Program penyelenggaraan pengawasan	persentase tindaklanjut temuan (jumlah temuan yang ditindaklanjuti/total temuan)	%	87	1.458.809.434,00	Inspektorat
6	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Tingkat kepatuhan OPD dalam penyelenggaraan pemeritah daerah	%	82	282.422.600,00	Inspektorat
7	Program pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah (LKPD)	Opini	WTP	211.284.495.864,00	BKAD
8	Program	Persentase BMD	%	85	894.312.100,00	BKAD

No	Program Pembangunan Daerah	Kinerja				Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target	Pendanaan	
	pengelolaan barang milik daerah	yang terkelola dengan baik				
9	Program pengeloaan pendapatan daerah	Kemandirian keuangan daerah	%	13	4.234.432.710,00	BKAD
10	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase Kebijakan dibidang Perundang-undangan, Bantuan Hukum	%	100	336.170.100,00	Setda
11	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Perekonomian dan Pembangunan	%	100	1.195.291.052,00	Setda
12	Program kepegawaian	Indeks Personalitas ASN	%	66	1.390.829.000,00	BKPSDM
13	Progaram aplikasi informatika	persentase layanan publik dan layanan administrasi yang teritegrasi dengan sistem layanan pemerintahan	%	50	2.040.987.948,00	Diskominfo
14	Program Informasi dan komunikasi public	persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	%	45	2.596.996.910,00	Diskominfo
15	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase pemenuhan kebutuhan data statistik sektor lingkup daerah	%	40	65.721.400,00	Diskominfo
16	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Indeks keamanan informasi	Indeks	300	6.551.000,00	Diskominfo
17	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan nagari yang terbina	Kegiatan	18	652.240.638,00	DPMN
18	Program Penataan Desa	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam penataan sesuai standar	Nagari	13	99.700.200,00	SPMN
TOTAL					339.478.859.455,00	

3. Sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas, inovatif dan berdaya saing

Sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas, inovatif, dan berdaya saing merupakan fondasi utama dalam mewujudkan kemajuan dan kemandirian daerah. Pembangunan SDM diarahkan tidak hanya untuk mencetak individu yang unggul secara akademis, tetapi juga

secara spiritual, moral, dan sosial. SDM yang cerdas dan berkualitas merupakan hasil dari sistem pendidikan yang merata, inklusif, dan berbasis kompetensi. Kesehatan masyarakat menjadi prasyarat dasar bagi produktivitas dan kesejahteraan, sehingga perlu didukung oleh akses layanan kesehatan yang mudah, terjangkau, dan bermutu. Keimanan dan karakter menjadi landasan penting dalam membentuk pribadi yang bermoral, disiplin, dan memiliki integritas tinggi. Di sisi lain, kemampuan berinovasi dan daya saing menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global, kemajuan teknologi, dan dinamika pasar kerja.

Kabupaten Agam masih menghadapi berbagai permasalahan dan isu strategis dalam pengembangan SDM. Ketimpangan kualitas pendidikan antardaerah dan antarwilayah, terutama antara wilayah perkotaan dan nagari terpencil, masih menjadi tantangan serius. Sarana dan prasarana pendidikan di beberapa sekolah belum memadai, dan masih terdapat kekurangan tenaga pendidik yang berkualifikasi. Di sektor kesehatan, tingkat prevalensi stunting masih relatif tinggi, menandakan perlunya intervensi yang lebih terarah dan sistematis. Selain itu, rendahnya literasi digital dan minimnya akses terhadap pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan pasar kerja turut menghambat peningkatan daya saing tenaga kerja lokal. Masih lemahnya budaya inovasi di kalangan generasi muda dan keterbatasan ruang ekspresi kreatif juga menjadi kendala dalam melahirkan SDM yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Di tengah dinamika tersebut, pembangunan SDM menjadi prioritas strategis Kabupaten Agam sebagai upaya menjawab berbagai tantangan jangka menengah dan panjang. Penguatan pendidikan karakter, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, pengembangan keahlian vokasional yang relevan, serta penguatan ekosistem inovasi dan wirausaha muda akan menjadi fokus utama dalam kebijakan pembangunan SDM. Dengan demikian, Kabupaten Agam dapat menciptakan generasi masa depan yang tidak hanya cerdas dan kompeten, tetapi juga berintegritas, sehat, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Agam dalam memajukan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berkarakter, dan berdaya saing, telah dirancang dan diimplementasikan program unggulan ***Agam Cerdas*** dan ***Agam Sehat***. **Agam Cerdas** diwujudkan dengan pendidikan berkarakter dan beasiswa bagi siswa kurang mampu yang berprestasi, sedangkan dengan agam sehat pemerintah berkomitmen meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh, melalui pendekatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Upaya yang dilakukan diantaranya Perluasan cakupan jaminan kesehatan Sebagai upaya mencapai Universal Health Coverage (UHC).

Prioritas ini dilaksanakan melalui Gerakan Terpadu Pengembangan SDM dan Gerakan Terpadu Hidup Bersih dan Sehat

Tabel III.10 Tujuan dan Sasaran Priortas Sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas, inovatif dan berdaya saing

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Capaian 2024	2025
Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berkarakter.		IPM	75,08	75.75
	Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berkarakter	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,23	9.75
		Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,16	14.4
	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas	Usia Harapan Hidup (tahun)	74,39	74.51
	Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Na	0,33
		Indeks Daya Saing Pemuda Olahraga	Na	39,49

Dengan arah kebijakan:

1. Peningkatan akses, mutu, relevansi, dan tata kelola pendidikan yang mendorong pembentukan karakter dan daya saing peserta didik.
    a. Pengembangan kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler yang menanamkan nilai karakter, budaya local
    b. Mendorong pengembangan pendidikan berbasis karakter melalui pembentukan *boarding school* (sekolah berasrama) di setiap kecamatan yang memadukan kurikulum pendidikan umum, keagamaan, dan adat istiadat lokal sebagai wujud sekolah madani.
    c. Pemerataan layanan pendidikan yang inklusif dan terjangkau.
    d. Peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
    e. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana Pendidikan
    f. Fasilitasi kegiatan Makan Bergizi Gratis bagi peserta didik
2. Penguatan akses dan mutu layanan kesehatan yang merata dan responsif melalui pendekatan promotif dan preventif, melalui
    a. Perluasan jangkauan layanan kesehatan dasar yang merata
    b. Peningkatan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan melalui penyediaan tenaga medis, sarana-prasarana, dan teknologi kesehatan yang memadai.

c. Penguatan program promotif dan preventif seperti imunisasi, gizi, sanitasi lingkungan, serta deteksi dini penyakit menular dan tidak menular.

d. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) melalui edukasi dan pemberdayaan berbasis nagari.

e. Penguatan sistem manajemen layanan kesehatan yang responsif dan berbasis data untuk pengambilan kebijakan yang tepat dan cepat.

f. Perluasan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat (JKN/Jamkesda)

g. Peningkatan gizi masyarakat dan fasilitasi Makan Bergizi Gratis

3. Peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yang inklusif melalui pemberdayaan pemuda dan kesetaraan gender

a. Peningkatan kapasitas dan peran pemuda dalam pembangunan melalui pelatihan, kewirausahaan yang berkeadilan gender dan partisipasi sosial.

b. Pengembangan program pelibatan pemuda dalam inovasi, teknologi, dan kegiatan kreatif untuk meningkatkan daya saing.

c. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan kelompok rentan.

d. Pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik melalui pelatihan keterampilan dan penguatan kelembagaan.

e. Pemberdayaan Pemuda dan Partisipasi Aktif dalam aspek ekonomi, organisasi dan olahraga

f. Mendorong Lingkungan yang Inklusif dan Mendukung Kesetaraan Gender

Tabel III.11

Program yang Mendukung Prioritas Sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas, inovatif dan berdaya saing

No	Program Pembangunan Daerah	Kinerja			Pendanaan	Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target		
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (%)	%	95	84.994.992.988,61	DisdikBud
2	Program Pengembangan Kurikulum (Muatan Lokal)	Persentase tahapan silabus muatan lokal	%	100	236.380.000,00	DisdikBud

No	Program Pembangunan Daerah	Kinerja			Pendanaan	Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target		
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah sekolah yang telah memiliki pendidik dan tenaga Kependidikan sesuai standar (unit)	Unit	452	6.550.000,00	DisdikBud
4	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (%	%	65	102.949.300,00	Dinas Arpus
5	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Peningkatan grade akreditasi Puskesmas	Unit utama	10	83.148.332.559,00	Dinkes
6	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar (%)	%	100 (23 unit)	937.972.500,00	Dinkes
7	Program Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase fasilitas kefarmasian (apotik) dan toko obat yang memenuhi standar kesehatan dan perizinan.	%	97,14	634.728.000,00	Dinkes
8	Program Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Jumlah Kebijakan Germas dan Kebijakan Berwawasan Kesehatan	Kebijakan	6	311.195.400,00	Dinkes
9	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Penurunan jumlah konsumsi beras(kg/perkapita/tahun)	kg/kapita/tahun	110	506.441.910,00	DKPP
10	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	%	83	7.313.008.488,00	DPUTR
11	Program Pengarasutamaan Gender dan Pemberdayaan perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	16.02	358.528.000,00	
12	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif dan wirausaha muda	%	90	486.590.000,00	Disparpora
13	Program Pengembangan Kapasitas daya	Jumlah event olahraga yang diselenggarakan	event	15	2.577.305.070,00	Disparpora

No	Program Pembangunan Daerah	Kinerja			Pendanaan	Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target		
	Saing Keolahragaan	dan diikuti				
14	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase peningkatan jumlah kegiatan kepramukaan (%)	%	85	150.000.000,00	Disparpora
	Total				181.764.974.215,61	

4. Ekonomi yang tangguh dan berkeadilan

Prioritas keempat pembangunan Kabupaten Agam diarahkan untuk mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh, inklusif, dan berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Arah kebijakan dan strategi dalam misi ini difokuskan pada penguatan sektor-sektor ekonomi produktif berbasis potensi lokal, seperti pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif; peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan koperasi; serta pemerataan akses terhadap sumber-sumber ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan ekonomi dirancang agar mampu mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, memperluas penciptaan lapangan kerja, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok sosial.

Permasalahan dan isu strategis yang menjadi tantangan dalam menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan diantanya struktur ekonomi daerah masih didominasi oleh sektor-sektor tradisional dengan produktivitas rendah dan nilai tambah yang terbatas. Keterbatasan akses modal, teknologi, dan pasar masih menjadi hambatan utama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi untuk berkembang secara kompetitif. Selain itu, rendahnya kapasitas SDM pelaku usaha, minimnya diversifikasi produk lokal, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi digitalisasi ekonomi dan industri kreatif menjadi isu strategis yang perlu segera direspons.

Di sisi lain, perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, serta ancaman krisis global juga turut menambah kerentanan terhadap keberlanjutan ekonomi lokal. Oleh karena itu, prioritas penguatan ekonomi kerakyatan dan berbasis potensi lokal menjadi sangat relevan dan mendesak. Pemerintah Kabupaten Agam berkomitmen untuk merumuskan kebijakan yang mendorong transformasi ekonomi daerah, melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha, perluasan akses pembiayaan dan pasar, pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi secara adaptif. Dengan langkah strategis ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Dalam hal ini Pemerintah melalui program unggulan ***Agam Melayani*** berkomitmen dapat hadir dan memfasilitasi serta mendorong pemberdayaan

pelaku usaha mikro. Pemberdayaan UMKM tidak hanya sebatas dukungan modal, tetapi juga mencakup pelatihan keterampilan dan pendampingan terhadap pelaku UMKM. Selain itu dilakukan updating dan perbaikan aplikasi E-KUMKM sebagai sarana untuk membuka jaringan pasar yang lebih luas. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan, UMKM dapat tumbuh menjadi entitas yang tangguh, inovatif, dan siap bersaing di pasar global. Revitalisasi pasar merupakan upaya perbaikan dan pengembangan pasar, baik dari segi fisik, manajemen, maupun fungsinya, agar menjadi tempat perdagangan yang lebih layak, modern, higienis, tertata, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain itu melalui program unggulan ***Agam Sejahtera*** Program unggulan Agam Sejahtera merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Agam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Kesejahteraan merupakan tujuan mutlak dari pembangunan ekonomi. Kabupaten Agam sebagian besar masih ditopang oleh sektor pertanian dan perikanan. Oleh karena itu dalam mewujudkan agam sejahtera perlu dikembangkan potensi lokal sebagai kabupaten agraris sehingga kabupaten Agam mampu menjadi lumbung pangan, salah satunya adalah dengan program Sawah Pokok Murah (SPM), Asuransi komoditi pertanian dan peningkatan serta penataan jaringan irigasi dan peningkatan sarana prasarana pemasaran hasil pertanian. Pembangunan pertanian diupayakan untuk mencapai kesejahteraan petani dan peningkatan nilai tambah dan produktivitas pertanian.

Gerakan Pensejahteraan Kawasan Pesisir merupakan sebuah inisiatif strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir melalui pendekatan terpadu dan berkelanjutan. Kawasan pesisir seringkali menghadapi berbagai tantangan seperti kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, kerusakan lingkungan, serta minimnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Oleh karena itu, gerakan ini berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dengan mengembangkan potensi lokal, seperti perikanan, pariwisata bahari, dan kerajinan berbasis sumber daya laut. Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar seperti akses jalan, dermaga nelayan, air bersih, dan fasilitas sanitasi juga menjadi prioritas untuk mendukung aktivitas ekonomi dan keseharian masyarakat. Untuk memperkuat daya saing masyarakat, dilakukan pula peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan, pendidikan vokasi, dan adopsi teknologi.

Pengembangan sektor perdagangan, Usaha Mikro dan kewirausahaan terutama wirausahawan muda yang telah dikenal sebagai keunggulan masyarakat, baik di ranah maupun rantau ditingkatkan dengan perkembangan-perkembangan baru dalam pemanfaatan teknologi digital. Bersamaan dengan pengembangan pariwisata dengan ragam potensi alam dan budaya yang terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk pembangunan ekonomi yang berskala luas bagi pencapaian

kesejahteraan masyarakat. Diharapkan program ini mampu mencetak 1000 entrepeneur muda dan mengembangkan pariwisata Kabupaten Agam berbasis Geopark Sianok Maninjau, Pantai Tiku dan Destinasi Wisata Potensial Nagari dan Menuntaskan nagari mandiri.

Prioritas ini didukung dengan Gerakan Terpadu Kemandirian Pangan Berbasis Keluarga dan Nagari, Gerakan Terpadu Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, Gerakan Terpadu Pengembangan Pariwisata, Gerakan Terpadu Pensejahteraan Masyarakat Pesisir dan Gerakan Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Miskin.

Tabel III.12

Tujuan dan Sasaran Prioritas Ekonomi yang tangguh dan berkeadilan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Capaian 2024	2025
Terwujudnya Ekonomi Daerah yang kuat, inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan		Laju pertumbuhan ekonomi	4,12	4,41
		IDSD	3,62	3.64
	Meningkatnya produktivitas Sektor pertanian, perikanan dan industri Pengolahan	Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan (%)	26,26	28,21
		Rasio PDRB Industri Pengolahan	10,33	10.2
	Meningkatnya kontribusi usaha pariwisata, ekonomi kreatif dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	Rasio Kewirausahaan	NA	3.89
		Rasio PDRB Akomodasi Mamin	0,89	0.96
		Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (Jasa Lainnya)		0.91
	Meningkatnya investasi daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	0,249	0.248
Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan daerah		Gini Rasio		57849,63
		Angka Kemiskinan	6,83	6,50
	Meningkatnya keterjangkauan dan ketersediaan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	86,92	86,93
	Meningkatnya kesempatan kerja dan produktifitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran terbuka	4,73	4.2
		Produktivitas tenaga kerja	88,52	98,35
	Meningkatnya perlindungan sosial	% PPKS yang mendapatkan perlindungan sosial	90,89	90,91

dengan arah kebijakan:

1. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing sektor pertanian, perikanan, dan industri pengolahan melalui penguatan kapasitas produksi, sistem agribisnis dan kemitraan, melalui:

   a. Peningkatan kapasitas produksi pertanian, perikanan, dan komoditas unggulan melalui penyediaan sarana prasarana dan teknologi tepat guna.

b. Penguatan kelembagaan petani, nelayan, dan pelaku usaha tani/ikan dalam rangka membangun sistem agribisnis yang terintegrasi.

c. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan skala kecil dan menengah untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal.

d. Fasilitasi kemitraan antara pelaku utama (petani/nelayan) dengan pelaku usaha, lembaga keuangan, dan offtaker pasar.

e. Peningkatan akses pasar dan promosi produk pertanian, perikanan, dan olahan melalui digitalisasi dan dukungan logistik.

f. Pelaksanaan dan perenapan program Sawah Pokok Murah dan asuransi tani

g. Pengelolaan dan pengembangan komoditas kelapa sawit dan komoditi perkebunan secara berkelanjutan

2. Penguatan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan usaha mikro melalui penguatan daya saing, inovasi, serta sinergi antar sektor berbasis potensi lokal dan budaya, melalui:

   a. Pengembangan destinasi pariwisata berbasis potensi lokal, budaya, dan keunikan alam berlandaskan wisata halal (halal tourism)

   b. Peningkatan kapasitas pelaku pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM melalui pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan.

   c. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan

   d. Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages).

   e. inovasi produk dan jasa ekonomi kreatif yang bernilai tambah dan berbasis teknologi digital.

   f. Penguatan promosi dan pemasaran destinasi serta produk unggulan lokal melalui platform digital dan event kolaboratif.

   g. Peningkatan sinergi lintas sektor (pariwisata, perdagangan, perindustrian, dan kebudayaan) dalam mendukung ekosistem ekonomi lokal yang berkelanjutan.

   h. Peningkatan konektivitas pada kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.

   i. mempercepat pembentukan koperasi desa/kelurahan (koperasi merah putih) yang legal, mandiri, dan produktif melalui fasilitasi kelembagaan, pendampingan SDM, alokasi pendanaan

   j. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan kelembagaan syariah, pengembangan UMKM dan koperasi syariah, serta

pemanfaatan sektor keuangan dan industri halal yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

3. Peningkatan daya tarik dan realisasi investasi melalui penataan iklim usaha, penguatan infrastruktur pendukung, pemanfaatan potensi lokal, serta promosi dan kemitraan

    a. Peningkatan kemudahan berusaha dan penyederhanaan perizinan melalui digitalisasi layanan dan penyempurnaan regulasi daerah.

    b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi strategis seperti jalan usaha tani, kawasan industri kecil, dan sentra produksi lokal.

    c. Fasilitasi penyediaan data potensi investasi daerah berbasis sektor unggulan dan komoditas lokal.

    d. Pelaksanaan promosi peluang investasi secara aktif melalui media digital, forum investasi, dan jejaring antar daerah.

    e. Penguatan kemitraan antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan investor dalam pengembangan ekonomi potensial.

4. Peningkatan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan, melalui:

    a. Peningkatan produktivitas dan diversifikasi produk pangan

    b. Pengembangan cadangan pangan masyarakat dan penguatan sistem distribusi pangan antar wilayah untuk menjamin ketersediaan yang merata.

    c. Fasilitasi aksesibilitas pangan bagi rumah tangga rentan melalui program intervensi pangan berbasis data terpadu.

    d. Peningkatan edukasi dan kampanye konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal.

    e. Penguatan cadangan pangan dan pengendalian kerawanan pangan

5. Peningkatan kualitas dan relevansi tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja yang inklusif, melalui:

    a. Peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan vokasi, sertifikasi, dan pendidikan berbasis kebutuhan pasar kerja

    b. Pengembangan program magang, pelatihan kerja, dan inkubasi wirausaha bagi pemuda, perempuan, dan kelompok rentan

    c. Fasilitasi kemitraan antara dunia usaha, industri, dan lembaga pelatihan kerja untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal.

    d. Pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan penempatan kerja, informasi pasar kerja, dan sistem pendataan tenaga kerja.

e. Pengembangan sektor padat karya, usaha mikro, dan ekonomi kreatif sebagai alternatif perluasan lapangan kerja yang inklusif dan berkelanjutan.

6. Penguatan sistem perlindungan sosial yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan, melalui:

   a. Perluasan cakupan program perlindungan social

   b. Penguatan kelembagaan dan data terpadu perlindungan sosial

   c. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM penyelenggara layanan perlindungan sosial di tingkat daerah dan nagari.

   d. Pengembangan sistem perlindungan sosial yang responsif terhadap bencana, krisis ekonomi, dan dinamika sosial lainnya.

   e. Peningkatan kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan sosial berbasis kearifan lokal.

7. Pengembangan Infrastruktur dasar dan penguatan ekonomi wilayah pesisir, melalui:

   a. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah pesisir

   b. Penguatan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi

   c. Pengembangan sentra ekonomi kelautan dan perikanan berbasis potensi lokal melalui peningkatan sarana produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil laut.

   d. Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

   e. Penguatan sinergi antar sektor dalam pembangunan wilayah pesisir, termasuk pariwisata bahari, perikanan tangkap dan budidaya, serta konservasi wilayah pesisir.

Tabel III.13

Program yang Mendukung Prioritas Priortas Ekonomi yang tangguh dan berkeadilan

No	Program Pembangunan Daerah	Kinerja			Pendanaan	OPD
		Indikator	Satuan	Target		
1	Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.	Peningkatan produksi pertanian	Ton	654.076	1.704.037.307,00	Pertanian
2	Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.	Peningkatan luas area pertanian yang terfasilitasi pembangunan infrastruktur dan sarana	Ha	1500	3.608.183.824,00	Pertanian

No	Program Pembangunan Daerah	Kinerja			Pendanaan	OPD
		Indikator	Satuan	Target		
		prasarana pertanian (ha)				
3	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	persentase hewan yang terfasiltasi pelayanan medik	%	25,53	392.948.703,00	Pertanian
4	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	persentase kasus serangan organisme pengganggu Tanaman (OPT) yang terfasilitasi saraana prasarana pengendalian OPT	%	100	88.886.200,00	Pertanian
5	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan SDM Penyuluh	%	66	2.073.538.575,00	Pertanian
6	Program Pengelolaan perikanan tangkap.	Jumlah produksi ikan tangkap	Ton	8.170	60.594.860,00	DPKP
7	Program Pengelolaan perikanan Budidaya	jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	30.750	390.692.100,00	DPKP
8	Program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan.	Jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasar ikan (orang)	Orang	338	105.076.368,00	DPKP
9	Program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan	%	20	4.179.000,00	DPKP
10	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya keamanan pangan segar	%	45	29.755.390,00	DPKP
11	Program Penanganan Kerawanan Pangan	persentase penurunan nagari rawan pangan	%	19,4	459.300.286,00	DPKP
12	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penurunan jumlah konsumsi beras	kg/perkapita /tahun	110	506.441.910,00	DPKP
13	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Peningkatan Luas lahan sawah yang beririgasi	%	49.06.00	4.034.268.750,00	PUTR
14	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	persentase koperasi sehat	%	69.40.00	89.830.200,00	Dinas Koperasi UMKM

No	Program Pembangunan Daerah	Kinerja			Pendanaan	OPD
		Indikator	Satuan	Target		
15	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	persentase koperasi dengan pengelolaan kelembagaan sesuai standar	%	85	99.158.000,00	Dinas Koperasi UMKM
16	Program Pemberdayaan Usaha Kecil dan usaha Mikro	Persentase peningkatan skala usaha kecil	%	2,3	1.273.270.469,00	Dinas Koperasi UMKM
17	Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase alat UTTP yang bertanda tera sah	%	25	75.197.060,00	Disperindag Naker
18	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	persentase pelaku usaha yang memilliki SIUP, TDG	%	08.04	8.009.800,00	Disperindag Naker
19	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	persentase pasar tradisional yang memenuhi standar	%	0,1270833	1.214.709.572,00	Disperindag Naker
20	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indek Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik meningkat	Indeks	87.05.00	144.695.000,00	DPMPTSP
21	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	persentase pertambahan jumlah investor	%	20	146.620.000,00	DPMPTSP
22	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah kemitraan pengusaha besar dan UMKM	Jumlah kemitraan	8	36.310.000,00	DPMPTSP
23	Program pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	7	263.857.441,00	Disperindag Naker
24	Program pengembangan jasa kontruksi	Rasio tenaga operator/ teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompetensi	Rasio		80.598.000,00	DPUTR
25	Program penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	70	52.814.800,00	Disperindag Naker
26	Program hubungan industrial	Persentase perusahaan yang telah melaksanakan hubungan Industrial	%	80	980.926.500,00	Disperindag Naker
27	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Jumlah destinasi yang terkelola	Destinasi	44	1.114.661.163,00	Disparpora

No	Program Pembangunan Daerah	Kinerja			Pendanaan	OPD
		Indikator	Satuan	Target		
28	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan jumlah promosi wisata (%)	%	10	309.133.000,00	Disparpora
29	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilakukan pembinaan.	%	50	72.439.680,00	Disparpora
30	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten (%)	%	84	35.607.803.927,00	PUTR
31	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Lembaga adat yang menerapkan tradisi adat (%)	%	76.77	204.885.000,00	Dinas Pendidikan dan kebudayaan
32	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	372.568.292,00	Disperkim
33	Program Kawasan Permukiman	Persentase berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	1,67	1.065.741.600,00	Disperkim
34	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Berkurangnya Jumlah RTLH di Luar Kawasan Permukiman Kumuh	%	0,1	1.675.731.000,00	Disperkim
35	Program Peningkatan PSU	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi	%	65	2.203.717.250,00	Disperkim
36	Program Penataan bangunan Gedung	Persentase Penataan bangunan gedung	%	91	16.089.924.728,00	BPBD
37	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber	%	80	232.797.050,00	Dinas Sosial

No	Program Pembangunan Daerah	Kinerja			Pendanaan	OPD
		Indikator	Satuan	Target		
		Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dilakukan Pembinaan dan pemberdayaan				
38	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar, gelandangan dan pengemis di luar panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	80	6.056.748.600,00	Dinas Sosial
39	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase data terpadu penanggulangan kemiskinan yang dimutakhirkan	%	83	230.119.600,00	Dinas Sosial
40	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial	%	100	282.818.032,00	Dinas Sosial
41	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Indeks pembangunan keluarga (iBangga) (%)	%	56,12	2.583.991.685,00	Dalduk KB
42	Program Stabilisasi Harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	terjaminnya ketersediaan kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar raktyat	Unit	5 pasar	71.675.850,00	Disnaker
					86.098.656.572,00	

5. Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dan meningkatkan ketangguhanmitigasi bencana

Prioritas kelima pembangunan Kabupaten Agam menitik beratkan pada pembangunan infrastruktur yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan sebagai fondasi dalam mendukung konektivitas antarwilayah, peningkatan kualitas pelayanan dasar, serta percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Arah kebijakan dan strategi dalam misi ini juga menekankan pentingnya integrasi antara pembangunan fisik dengan pelestarian lingkungan hidup, serta penguatan ketangguhan wilayah terhadap risiko bencana. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga untuk menjamin keberlanjutan sumber daya alam, daya dukung

lingkungan, dan keselamatan masyarakat dalam menghadapi dinamika perubahan iklim serta meningkatnya potensi bencana alam.

Permasalahan dan isu strategis masih menjadi hambatan dalam mewujudkan infrastruktur yang inklusif dan berwawasan lingkungan di Kabupaten Agam diantaranya kualitas infrastruktur yang sudah ada belum sepenuhnya memadai dan berdaya tahan, terutama dalam menghadapi intensitas curah hujan yang tinggi, pergerakan tanah, atau risiko bencana lainnya. Di sisi lain, kerusakan lingkungan akibat aktivitas pemanfaatan lahan yang tidak terkendali, alih fungsi lahan dan lemahnya pengawasan terhadap pelestarian kawasan lindung turut meningkatkan risiko bencana seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Isu perubahan iklim juga menjadi tantangan serius, yang memerlukan langkah-langkah adaptif dan mitigatif yang terintegrasi dalam seluruh perencanaan infrastruktur. Keterbatasan pendanaan dan kapasitas teknis pemerintah daerah dalam membangun serta memelihara infrastruktur secara berkelanjutan turut memperkuat urgensi pembenahan.

Kondisi kawasan Danau Maninjau juga semakin tertekan akibat degradasi lingkungan, terutama dari pencemaran limbah rumah tangga dan keramba jaring apung yang tidak terkendali. Kerusakan ekosistem dan penurunan kualitas air Danau Maninjau bukan hanya mengancam daya tarik pariwisata dan keberlanjutan ekonomi masyarakat sekitar, tetapi juga berdampak pada ketahanan lingkungan jangka panjang. Selain itu, permasalahan pengelolaan sampah, masih menjadi tantangan serius. Kurangnya sistem pengelolaan sampah yang terpadu, keterbatasan fasilitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah secara mandiri memperburuk kondisi lingkungan dan estetika kawasan.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Agam menjadikan pembangunan infrastruktur berkeadilan dan tangguh bencana sebagai prioritas strategis. Melalui pembangunan jalan, jembatan, jaringan air bersih, sanitasi, serta fasilitas pelayanan dasar yang merata dan adaptif terhadap risiko lingkungan, diharapkan terwujud sistem infrastruktur yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan wilayah dan meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat Agam secara berkelanjutan.

Prioritas ini didukung dengan program unggulan ***Agam Sehat*** melalui Pengelolaan Sampah dari sumbernya dengan gerakan terpadu “Buang Sampah Beli Sampah” ditandai dengan melaksanakan Sosialisasi dan Pembinaan Perda Pengelolaan Sampah di 16 Kecamatan, Pembuatan Rencana Induk Pengelolaan Sampah, pembentukan kemitraan koperasi dengan bank sampah di seluruh Nagari, meningkatkan Operasional dan Maintenance pengelolaan sampah pada TPA dan TPST Sei Jariang, meningkatkan sarana pengangkut sampah dan meningkatkan pemeliharaan sarana pengangkut sampah.

Prioritas ini dilaksanakan melalui **Gerakan Terpadu Kebersihan dan Pelestarian Lingkungan Hidup.**

Tabel III.14 Tujuan dan Sasaran Priortas

Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dan meningkatkan ketangguhanmitigasi bencana

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Capaian 2024	2025
5.1 Terwujudnya pembangunan yang inklusif dan ramah lingkungan serta adaptif terhadap risiko bencana.		Indeks Risiko Bencana (IRB)	205,29	200,28
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,74	76,9
	Meningkatnya ketahanan daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Rendah (0,33)	C Rendah (0,55)
5.2 Meningkatnya kualitas infrastruktur yang tangguh dan merata		Indeks Pembangunan Infrastruktur	Na	41,52
	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar 1	RT dengan Akses Sanitasi Aman	na	15,40
		Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman (Perpipaan)	na	17,95
		Jalan dalam kondisi mantab	58,91	60
	Meningkatnya konektivitas wilayah	Indeks Konvektivitas Wilayah	Na	69
	Meningkatnya pemukiman rumah layak huni	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	Na	73,75

Dengan arah kebijakan:

1. Penguatan pengelolaan lingkungan hidup guna mendukung pembangunan ramah lingkungan dan ketahanan ekosistem, melalaui:
    a. Peningkatan kualitas tata kelola lingkungan melalui penguatan regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan.
    b. Pelaksanaan program konservasi sumber daya alam dan rehabilitasi ekosistem yang rusak, termasuk hutan, sungai, dan kawasan pesisir.
    c. Penguatan kapasitas masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan berbasis partisipatif dan kearifan lokal.
    d. Integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah.
    e. pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan
    f. Peningkatan kapasitas pengelolaan persampahan dan limbah

g. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim.

2. Penguatan kapasitas ketahanan wilayah terhadap bencana, perubahan iklim, serta ketahanan air, pangan, dan energi melalui:
    a. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanggulangan bencana berbasis risiko
    b. Penguatan sistem peringatan dini dan penyediaan infrastruktur tanggap darurat di wilayah rawan bencana.
    c. Integrasi adaptasi perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan sektor-sektor strategis seperti pertanian, infrastruktur, dan pemukiman
    d. Pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan melalui konservasi, pemanfaatan efisien, dan pengendalian pencemaran.
    e. Peningkatan ketahanan pangan dan energi lokal melalui diversifikasi sumber, inovasi teknologi, dan penguatan cadangan strategis.
3. Meningkatnya kualitas infrastruktur yang tangguh dan merata
    a. Peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar
    b. Penguatan standar teknis dan ketahanan infrastruktur terhadap bencana dan perubahan iklim.
    c. Pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur secara berkelanjutan guna menjaga fungsi layanan publik.
4. Meningkatnya konektivitas wilayah, melalui:
    a. Pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan jalan penghubung antarwilayah, antar-nagari, dan kawasan produktif.
    b. Pemeliharaan infrastruktur konektivitas untuk memastikan kelancaran distribusi logistik dan akses layanan publik.
    c. Peningkatan Layanan dan penguatan keselamatan sarana transportasi
    d. Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan
    e. Peningkatan akses jaringan telekomunikasi dan internet di wilayah blank spot
5. Meningkatnya pemukiman rumah layak huni, melalui:
    a. Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah

b. Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas dasar (PSU) permukiman seperti jalan lingkungan, drainase, air bersih, dan sanitas

c. Fasilitasi akses masyarakat terhadap program bantuan perumahan dan pembiayaan perumahan berbasis inklusi

d. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui program peremajaan kawasan kumuh dan padat penduduk

e. Penguatan regulasi dan tata kelola pembangunan permukiman yang ramah lingkungan, aman bencana, dan berkelanjutan.

Tabel III.15

Program yang Mendukung Prioritas Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dan meningkatkan ketangguhan mitigasi bencana

No	Program Pembangunan Daerah	Kinerja			Pendanaan	Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target		
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Rasio Luas Kawasan Permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Rasio	10,85	4.034.268.750,00	PUTR
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan (%).	%	88%	7.313.008.488,00	PUTR
3	Program Penataan Banguna Gedung	Persentase penataan bangunan gedung	%	45%	16.089.924.728,00	PUTR
4	Program Kawasan Permukiman	Persentase berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	1,67	1.065.741.600,00	Perkim
5	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Berkurangnya Jumlah RTLH di Luar Kawasan Permukiman Kumuh	%	0,1	1.675.731.000,00	
6	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen lingkungan hidup	%	100 persen	121.732.740,00	DLH
7	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Persentase peningkatan kualitas air dan revitalisasi Danau Maninjau.	%	55,79 point	1.205.469.992,00	DLH
8	Program Pengelolaan Keanekaragam	Persentase RTH yang dikelola	%	100 persen	1.356.406.915,00	DLH

No	Program Pembangunan Daerah	Kinerja			Pendanaan	Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target		
	an Hayati (KEHATI					
9	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (LB3)	Persentase Limbah B3 yang terkelola	%	100 persen	32.010.600,00	DLH
10	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan	Perusahaan	37 persen	111.642.000,00	DLH
12	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduaan pencemaran/perusaknlingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100 persen	12.327.200,00	DLH
13	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah Kabupaten	%	60 persen	8.288.684.323,00	DLH
14	Program penyelenggaraan penataan ruang	Pesentase ketaatan terhadap RTRW	%	98	50.060.000,00	PUTR
15	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana yang Terintegrasi pada Fase Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana (%)	%	91 persen	1.066.757.280,00	BPBD
15	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial (%)	%	100%	371.704.232,00	BPBD
16	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan sesuai Standar (%	%	100	1.389.591.420,00	Satpol PP Damkar
20	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)(%)	%		2.203.717.250,00	Perkim

No	Program Pembangunan Daerah	Kinerja			Pendanaan	Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target		
	(PSU)					
21	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 10 ribu keberangkatan	Rasio	75 persen	18.383.968.508,00	Dishub
					64.772.747.026,00	

6. Pengembangan wilayah berbasis nagari untuk membangun kemandirian, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat

Pengembangan wilayah berbasis nagari untuk membangun kemandirian, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu program strategis Pemerintah Kabupaten Agam dalam mendorong pembangunan yang berakar dari kekuatan lokal. Misi ini menekankan pentingnya peran nagari sebagai unit pemerintahan terdepan dalam merancang, mengelola, dan mengawal pembangunan yang partisipatif, inklusif, dan sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Melalui penguatan kapasitas kelembagaan nagari, pemanfaatan potensi sumber daya lokal, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat nagari, diharapkan pembangunan dapat merata hingga ke pelosok, kesenjangan antarwilayah dapat diperkecil, dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara adil dan berkelanjutan.

Pembangunan berbasis nagari di Kabupaten Agam masih menghadapi berbagai permasalahan dan isu strategis yang perlu segera diatasi. Kesenjangan infrastruktur dan akses layanan dasar antar-nagari masih cukup tinggi, terutama antara nagari di wilayah pesisir, pegunungan, dan kawasan terpencil dengan nagari-nagari yang berada di pusat pertumbuhan. Kapasitas aparatur dan kelembagaan nagari dalam perencanaan, pengelolaan keuangan, serta pelaksanaan pembangunan belum merata dan masih memerlukan peningkatan, baik dari sisi kompetensi maupun tata kelola yang akuntabel.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan di tingkat nagari belum sepenuhnya efektif, sehingga berbagai program belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga. Minimnya sinergi antar-nagari dalam pengembangan kawasan, terbatasnya data spasial dan sosial ekonomi yang mutakhir, serta lemahnya sistem monitoring dan evaluasi pembangunan nagari menjadi tantangan dalam mewujudkan pembangunan wilayah yang terencana dan terukur. Dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan, belum semua nagari

memiliki kesadaran dan kapasitas dalam mengintegrasikan aspek lingkungan, mitigasi risiko bencana, dan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal ke dalam perencanaan pembangunan.

Berangkat dari kondisi tersebut, prioritas pengembangan wilayah berbasis nagari disusun untuk menjawab kebutuhan nyata di lapangan dan memperkuat peran nagari sebagai pilar utama pembangunan daerah. Prioritas ini juga telah diselaraskan dengan dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah daerah, provinsi, maupun nasional, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara sinergis dan terpadu. Melalui pendekatan ini, Kabupaten Agam meneguhkan komitmennya untuk membangun dari akar rumput, mendorong kemandirian wilayah, serta memastikan setiap warga mendapatkan akses yang adil terhadap hasil pembangunan.

Tabel III.16

Tujuan dan Sasaran Priortas Pengembangan wilayah berbasis nagari untuk membangun kemandirian, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Capaian 2024	2025	Keterangan
Terselenggaranya pengembangan wilayah berbasis nagari		Indeks Desa	Na	8,87	
	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri	32,61	35 %	

Dengan arah kebijakan:

1. Pemberdayaan nagari melalui penguatan tata kelola, ekonomi lokal, kapasitas SDM, dan pemanfaatan potensi sumber daya berbasis kearifan local, melalui:
    a. Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan nagari dalam tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
    b. Penguatan ekonomi nagari melalui pengembangan BUMNag, Usaha Mikro, dan usaha produktif berbasis potensi lokal.
    c. Peningkatan kualitas SDM nagari melalui pelatihan, pendidikan non-formal, dan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas
    d. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam nagari secara berkelanjutan dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal.
    e. Penguatan peran nagari dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan berbasis kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Tabel III.17

Program yang Mendukung Prioritas Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dan meningkatkan ketangguhanmitigasi bencana

No	Program Pembangunan Daerah	Kinerja			Pendanaan	Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target		
1	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Berkurangnya Jumlah RTLH di Luar Kawasan Permukiman Kumuh	%	0,1	1.675.731.000,00	
2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)(%)	%		2.203.717.250,00	Perkim
3	Program Kawasan Permukiman	Persentase berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	1,67	1.065.741.600,00	Perkim
4	Program Penaataan Desa	Jumlah Nagari yang Terfasilitasi dalam penataan sesuai standar Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam penataan sesuai standar	Nagari	92	99.700.200	DPMN
5	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan nagari yang terbina Jumlah Nagari yang Taat dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan	Nagari	92	652.240.638,00	DPMN
6	Program Pemberdayaan, Lembaga Kemasyarakatan, Lemnbaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kelembagaan Nagari yang Ditata sesuai Standar Persentase komponen pada kelembagaan nagari yang ditata sesuai standar	Nagari %	92Nagari 95 persen	3.039.894.469,00	DPMN
7	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase nagari dengan pengelolaan keuangan yang baik	%	100	131.508.800,00	DPMN
8		TOTAL			8.868.533.957	

Memperhatikan tujuan dan sasaran dan arah kebijakan yang telah tertuang pada Kabupaten Agam Tahun 2021-2026, maka target tujuan dan sasaran pembangunan yang akan di capai pada akhir tahun 2025 yakni sebagai berikut :

Tabel. III.18

Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Agam

Tahun 2025

No	Indikator Kinerja		Capaian (2024)	Target RKPD 2025	Target P RKPD 2025	Keterangan
Misi I : Tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, syarak mangato adat mamakai"						
I	Persentase Nagari Dengan Level Madani V		14,13	18,48 (92 Nagari)	18.48	
	1	Tingkat Penerapan Nilai-Nilai Agama	62,55	-	63,70	
	2	Tingkat Penerapan Nilai-Nilai Adat, Budaya, dan Kearifan Lokal	96,7	-	91.5	
	3	Indeks Keamanan	68,64	91,5	69,61	
Misi II : Tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional						
I	Indeks Reformasi Birokrasi		75,84	BB (71)	79 (BB)	
	1	Maturitas SPIP	3,152	3,9	3,160	
	2	Nilai SAKIP	B(67,11)	BB (77)	68,61	
	3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Na	Baik (84)	77,50	
	4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,56	3,1 (Baik)	2.65	
	5	Indeks Sistem Merit	Na	-	280	
	6	Indeks Pelayanan Publik	Na	-	3,50	
Misi III : Sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas, inovatif dan berdaya saing						
	IPM		75,08	75,75	75.75	
		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,23	9,75	9.75	
		Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,16	14,39	14.4	
		Usia Harapan Hidup (tahun)	74,39	74,51	74.51	
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Na	-	0,33	
		Indeks Daya Saing Pemuda Olahraga	Na	-	39,49	
Misi IV Ekonomi yang tangguh dan berkeadilan						
	Laju pertumbuhan ekonomi		4,12	4,89	4,41	
	IDSD		3,62	-	3.64	
		Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan (%)	26,26	28,21	28,21	

		Rasio PDRB Industri Pengolahan	10,33	11,53	10.2	
		Rasio Kewirausahaan	NA	-	3.89	
		Rasio PDRB Akomodasi Mamin	0,89	-	0.96	
		Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (Jasa Lainnya)		-	0.91	
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,71	-	30,02	
	Gini Rasio		0,249	0,253	0.248	
	Pendapatan Perkapita			-	57849,63	
	Angka Kemiskinan		6,83	6,15	6,50	
		Indeks Ketahanan Pangan	86,92	94	86,93	
		Tingkat Pengangguran terbuka	4,73	4,88	4.71	
		Produktivitas tenaga kerja	88,52	-	98,35	
		% PPKS yang mendapatkan perlindungan sosial	90,89	-	90,91	
Misi 5 : Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dan meningkatkan ketangguhan mitigasi bencana						
	Indeks Risiko Bencana (IRB)		205,29	-	200,28	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,74	76,87	76,9	
		Indeks Ketahanan Daerah	Rendah (0,33)	Tinggi	C Rendah (0,55)	
	Indeks Pembangunan Infrastruktur		Na	-	41,52	
		RT dengan Akses Sanitasi Aman	na	-	15,40	
		Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman (Perpipaan)	na	-	17,95	
		Jalan dalam kondisi mantab	58	86	60	
		Indeks Konvektivitas Wilayah	Na	-	69	
		Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	Na	-	73,75	
Misi VI. Pengembangan wilayah berbasis nagari untuk membangun kemandirian, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat						
	Indeks Desa		Na	-	8,87	
		Persentase Desa Mandiri	32,61	36,9%	35 %	

Tabel III.19

Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Agam

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2024	Targe2025		Keterangan
			Awal	Perubahan	
A	Indikator Kinerja Makro				

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2024	Targe2025		Keterangan
			Awal	Perubahan	
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,12	4,89	4,89	
2.	Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK)	2,74	3,98	3,98	
3.	Indeks Gini Rasio	0,249	0,253	0,248	
4.	Persentase Penduduk Miskin	6,83	6,15	6,50	
5.	Tingkat pengangguran Terbuka (%)	4,73	4,88	4,71	
6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,08	75,75	75,75	
7.	Angka Harapan Lama Sekolah	14,16	14,39	14,39	
8.	Rata-Rata lama sekolah	9,23	9,75	9,75	
9.	Angka Harapan Hidup	74,39	74,51	74,51	
B.	Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah				
I.	Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
1.	Urusan Pendidikan				
1.1	Angka Harapan Lama Sekolah	14,16	14,39	14,39	
1.2	Rata-rata lama sekolah	9,23	9,75	9,75	
1.3	APK PAUD	60,05	83,75	83,75	
1.4	APK SD	97,19	100	100	
1.5	APK SMP	101,56	102,69	102,69	
1.6	APM SD	88,38	92	92	
1.7	APM SMP	78,52	84,17	84,17	
1.8	Angka Putus Sekolah SD	0,02	0,01	0,01	
1.9	Angka Putus Sekolah SMP	0,05	0,01	0,01	
1.10	Persentase Lembaga satuan PAUD yang Terakreditasi	**77,23**	78,08	78,08	
1.11	Persentase PKBM dan SKB yang terakreditasi	80,00	100	100	
1.12	Persentase SD yang terakreditasi Minimal B	87,30	94,7	94,7	
1.13	Persentase SMP yang terakreditasi Minimal B	85,29	89,81	89,81	
1.14	Persentase anak Usia 7-15 tahun yang terlayani sesuai SPM pendidikan dasar	**99,60**	100	100	
1.15	Persentase anak Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang terlayani sesuai SPM pendidikan kesetaraan	**100,00**	100	100	
1.16	Persentase anak Usia 5-6 Tahun yang terlayani sesuai SPM	**99,53**	100	100	

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2024	Targe2025		Keterangan
			Awal	Perubahan	
	pendidikan PAUD				
1.17	Persentase Anak PAUD yang menamatkan iqra' 6	15,93	92	92	
1.18	Persentase murid SD yang hafal al-Qur'an Juz 30	31,22	50	50	
1.19	Persentase murid SMP yang hafal al-Qur'an Juz 1 dan juz 30	42,20	60	60	
1.20	Persentase murid SD yang mampu Pasambahan adat	23,07	45	45	
1.21	Persentase murid SMP yang mampu Pasambahan adat	3,08	60	60	
1.22	Persentase murid SD yang mampu Berbahasa inggris	10,00	30	30	
1.23	Persentase murid SMP yang mampu Berbahasa inggris	18,00	35	35	
2.	Urusan Kesehatan				
2.1	Menurunnya rasio kematian ibu	172,08	97,08	97,08	
2.2	Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) per tahun	10,00	12,5	12,5	
2.3	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	93,56	100	100	
2.4	Menurunnya ratio kematian bayi	12,60	8,9	8,9	
2.5	Persentase balita stunting	(20,1% Survei SKI), (7,01% ePPGBM)	10,7	10,7	
2.6	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	4,13	3,48	3,48	
2.7	Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	25,20	53	53	
2.8	Inseiden HIV per 1000 penduduk yang tidak reinfeksi HIV	0,026	0,102	0,102	
2.9	Insedensi TB per 100.000 penduduk	155,00	216	216	
2.10	Persentase angka keberhasilan pengobatan (succes rate) TBC	92,00	91,26	91,26	
2.11	Temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB)	**83,50**	75	84	
2.12	Treatmen coverage pada pasien TB	36,00	75	75	
2.13	Cakupan Posbindu aktif	100 %	72	100	
2.14	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan survelen	23,00	23	23	
2.15	Jumlah Puskesmas yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar	**23,00**	23	23	
2.16	Persentase ketersedian prasarana dan alkes Puskesmas sesuai standar	**72,25**	72	72,5	
2.17	Persentase ketersedian obat esensial Puskesmas	100,00	100	100	
2.18	Persentase Puskesmas yang menggunakan sistem pelaporan on-line	**100,00**	100	100	
2.19	Persentase Puskesmas dengan jenis	42,25	80,46	80,46	

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2024	Targe2025		Keterangan
			Awal	Perubahan	
	nakes sesuai anjab ABK				
2.20	Persentase SPP-IRT yang diterbitkan sesuai ketentuan	70,00	92	92	
2.21	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	10,10	8,1	8,1	
2.22	Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan upaya berhenti merokok (UBM)	**100,00**	100	100	
2.23	Implementasi KTR pada 9 tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll)	**50,00**	100	100	
2.24	Persentase rumah tangga ber-PHBS	82 %	87	87	
2.24	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil sesuai standar	93,56	100	100	
2.25	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin sesuai standar	98,59	100	100	
2.26	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standar	93,67	100	100	
2.27	Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	73,79	100	100	
2.28	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar sesuai Standar	97,83	100	100	
2.29	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sesuai Standar	89,43	100	100	
2.30	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sesuai Standar	73,71	100	100	
2.31	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sesuai Standar	90,90	100	100	
2.32	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus sesuai Standar	90,86	100	100	
2.33	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai Standar	**100,00**	100	100	
2.34	Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai Standar	**83,73**	100	100	
2.35	Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) sesuai Standar	**93,00**	100	100	
2.36	Persentase rumah sakit rujukan yang terakreditasi	100,00	100	100	
2.37	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk (1 : 1.000)	185,00	205 tempat tidur	205 tempat tidur	
2.38	Jumlah desa/kelurahan bebas Stunting (Pravalensi Stunting <14%)	85,00	92 (100%)	92 (100%)	
3.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
3.1.	Persentase luas sawah beririgasi	51,74	91,2	91,2	
3.2.	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	68,98	86	86	
3.3.	Persentase penduduk berakses air minum	88,51	100	100	
3.4.	Persentase rumah tangga berakses sanitasi	79,50	85	85	
3.5.	Persentase drainase kondisi baik	40,60	41,6	41,6	
3.6.	Persentase jalan lingkung kondisi	54,25	64,05	64,05	

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2024	Targe2025		Keterangan
			Awal	Perubahan	
	baik				
3.7.	Persentase ketaatan terhadap tata ruang	96,48	98,65	98,65	
3.8.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	**0,00**	0,27	0,27	
3.9.	Persentase Gedung Pemerintah yang dibangun	33,33	95	95	
3.11.	Persentase Bangunan yang tertata	82,75	98	98	
4.	Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman				
4.1.	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	**26,18**	100	100	
4.2.	Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH	1,34	1,67	1,67	
4.3.	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	3,63	0,11	0,11	
4.4.	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	**55,01**	65	65	
5.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
5.1.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100	
5.2.	Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	100	100	100	
5.3.	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100	96	100	
5.4.	Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	**85%**	49	86	
5.5.	Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	31%	50	50	
5.6.	Persentase penanganan pra bencana	38%	89,08	89,08	
5.7.	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100%	100	100	
5.8.	Persentase penanganan pasca bencana	100%	100	100	
6.	Urusan Sosial				
6.1	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan Yang Dimiliki	10	10	10	
6.2	Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	1	3	3	
6.3	Keluarga Yang mendapat Bantuan Sosial Bersyarat (KK)	20.779	21.371	21.371	
II.	**Layanan Urusan Wajib Non Layanan Dasar**				
7.	Urusan Ketenaga Kerjaan				
7.1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	69	76,58	76,58	
7.2	Rasio penduduk yang bekerja.	95,27	95,71	95,71	
7.3	Pencari Kerja yang ditempatkan	1565	1.571	1.571	

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2024	Targe2025		Keterangan
			Awal	Perubahan	
8.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
8.1.	IDG	**63,63**	70,06	70,06	
8.2.	Kecamatan Layak Anak	n.a	6	6	
8.3.	Nagari Layak Anak	n.a	27	27	
9	Urusan Pangan				
9.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	81	85	85	
9.2	Persentase cadangan pangan masyarakat	18,58	15	19	
9.3	Ketersediaan pangan utama	79,694	100	100	
10	Urusan Pertanahan				
10.1	Luas tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya (Ha)	**37,45**	1	37,50	
10.2	Jumlah bidang tanah yang direstribusi	**87**	1000	100	
10.3	Persentase Penyelesaian sengketa tanah	100	100	100	
10.4	Persentase Sertifikat Tanah milik daerah	50	100	100	
11.	Urusan Lingkungan Hidup				
11.1.	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	**100,00**	100	100	
11.2.	Rasio Pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kab/Kota terhadap usaha izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	**0,00**	3	3	
11.3.	Persentase persetujuan teknis pengelolahan limbah bahan berbahaya dan beracun	**100,00**	100	100	
11.4	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	**100,00**	100	100	
11.5.	Persentase pengelolaan ruang terbuka hijau / taman kota	**100,00**	100	100	
11.6.	Persentase peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan hidup	**50,41**	78	78	
11.7	Persentase data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan.	100,00	100	100	
11.9.	Persentase pengelolaan persampahan.	**46,29**	65	65	
11.9	Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan.	**62,50**	58	58	
12.	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
12.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	**97,37**	97,16	97,50	
12.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	63,63	76,27	76,27	
13.	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil				
13.1	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang	**100**	100	100	

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2024	Targe2025		Keterangan
			Awal	Perubahan	
	dilaporkan				
13.2	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	**65,53**	100	100	
13.3	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	**62,93**	100	100	
14.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
14.1	Nilai kontribusi masyarakat dan perantau terhadap pembangunan nagari (Rp. Juta)	**62.878.107.651**	28,46 milyar	63 M	
14.2	Jumlah sistem pelayanan Administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar (3 Sistem Pelayanan Kelembagaan : 1. WN, 2. Bamus, 3. BUMNag)	**195 Sistem**	217	196	
14.3	Jumlah Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) Berkembang	28 Unit	25	28	
14,4	Persentase pengentasan desa tertinggal	100,00	100	100	
15.	Urusan Perhubungan				
15.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	348.765	610.556	610.556	
15.2	Rasio ijin trayek	0,09	0,155	0,155	
15.3	Jumlah uji KIR angkutan umum	4570	4.870	4.870	
15.4	Rasio Kejadian Kecelakaan	1,87	0,15	0,15	
16.	Urusan Komunikasi dan Informatika				
16.1	Persentase perangkat daerah (OPD) yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	100,00	100	100	
16.2	Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital	**10,00**	10	10	
16.3	Persentase layanan SPBE yang memanfaatkan sertifikat elektronik	13,100	10	13,25	
16.4.	Persentase konten informasi tekait program dan kebijakan Pemda termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis Pemda (tema: prokes, vaksin, stunting) yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi	**100,00**	100	100	
16.5.	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik pemerintah daerah.	**100,00**	100	100	
17	Urusan Koperasi dan UMKM				
17.1	Persentase Peningkatan koperasi yang berkualitas	69,13	69,4	69,4	
17.2	Persentase BPR/LKM aktif	n.a	67,52	67,52	

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2024	Targe2025		Keterangan
			Awal	Perubahan	
17.3	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	n.a	10,4	10,4	
18	Urusan Penanaman Modal				
18.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	0	13	13	
18.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp. Milyar)	0	414	414	
19.	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga				
19.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	**49,75**	85	85	
19.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	**7,85**	70	70	
19.3	Peningkatan prestasi olah raga (Jumlah perolehana medali)	88,00	180	180	
9.4.	Persentase wirausahawan muda	52,17 (9.104)	0,75	0,75	
20	Urusan Statistik				
20.1	Persentase organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah.	evaluasi= 83% perencana an = 86%	100	100	
21.	Urusan Persandian				
21.1	Indeks keamanan informasi	33.8	30	33,9	
22.	Urusan Kebudayaan				
22.1	Persentase lembaga adat yang aktif menegakkan Adat Salingka Nagari	**100,00**	100	100	
22.2	Jumlah situs cagar budaya yang terdaftar dan dapat di lestarikan	52,00	65	65	
22.3	Jumlah Pengunjung Museum	26381	20.500	20.500	
22.4	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni.	**10,00**	13	13	
22.5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni.	**90,00**	85	90,5	
22.6	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.	**1,00**	1,5	1,5	
22.7	Persentase Rumah Tangga yang menyelenggarakan upacara adat.	80,00	72	81	
23.	Urusan Perpustakaan				
23.1	Nilai Tingkat kegemaran membaca	81,72	63	82	
23.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	72,92	70,66	73	
24	Urusan Kearsipan				
24.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang syah dan pertanggungjawaban nasional	**57**	57,25	57,25	

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2024	Targe2025		Keterangan
			Awal	Perubahan	
24.2	Persentase unit organisasi yang melakukan penyusutan arsip	13,63	7,04	13,8	
24.3	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan public dan kesejahteraan rakyat	**68,33**	65,33	68,5	
24.4	Nilai Pengelolaan Arsip Daerah	51,01 (CC)	Baik (61)	Baik (61)	
III	**Layanan Urusan Pilihan**				
1.	Urusan Kelautan dan Perikanan				
1.1.	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	4,61	4,93	4,93	
1.2	Produksi perikanan tangkap (ton)	**8.140**	8.170	8.170	
1.3.	Produksi perikanan budidaya (ton)	33409	30.750	34000	
1.4.	Produksi benih ikan (juta ton)	133,66	200	200	
1.5	Jumlah konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	*tunggu rils BPS dan KKP namun AKI Sementara masih mengguna kan rilis BPS Tahun 2023 yaitu 43.43	46	46	
1.6	Cakupan Bina kelompok nelayan	37	100	100	
1.7	Produksi perikanan kelompok nelayan (Ton)	8140	8.170	8.170	
1.8	Jumlah Produksi Olahan Ikan (Ton),	715	755	755	
2.	Urusan Pariwisata				
2.1	Tingkat hunian akomodasi (Length of Stay)	2 hari	2 hari	2 hari	
2.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Rp. 242147500	1	Rp. 252.000.000	Menyesuaikan Capaian 2024
2.3	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	913.330	1.135.159	1.135.159	
2.4	Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara	17.287	14.471	17,5	Menyesuaikan Capaian 2024
2.5	Peningkatan Rata - Rata Pengeluaran Wisatawan (Spend Of Money)	**536.000**	550.000	550.000	
2.6	Peningkatan kompetensi SDM bagi pelaku usaha dan kelompok pariwisata (%)	**88**	90	90	
2.7	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp. Milyar)	9,5 M	12,34	12,34	
2.8	Pelaku Ekonomi Kreatif Unggulan (Orang)	44 orang	56	56	
2.9	Jumlah produk ekonomi kreatif yang berdaya saing	82 produk	90	90	
3.	Urusan Pertanian				
3.1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	**1,55**	7,51	7,51	

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2024	Targe2025		Keterangan
			Awal	Perubahan	
3.2	Kontribusi sektor pertanian/hortikultura terhadap PDRB	**1,55**	4,6	4,6	
3.3	Kontribusi sektor pertanian/peternakan terhadap PDRB	**1,55**	2,70	2,70	
3.4	Kontribusi sektor pertanian/tanaman pangan terhadap PDRB	**1,55**	9,77	9,77	
3.5	Produksi sektor pertanian				
	- Padi	347.739	438.226	438.226	
	- Jagung	100.163	131.673	131.673	
	- Cabe merah	35.941	36.575	36.575	
	- Bawang merah	5.065	7.620	7.620	
3.6	Produksi sektor peternakan (Ton)				
	- Sapi	1.946	2000	2000	
	- Kerbau	33.08	44	44	
	- Kambing	66,12	55	66,4	Menyesuaikan Capaian 2024
	- Unggas	19.436	18.776	19,7	Menyesuaikan Capaian 2024
3.7	Produksi sektor perkebunan				
	- Kopi	1668	1.743	1.743	
	- tebu	2978	3.100	3.100	
	- kulit manis	31227	31.472	31.472	
3.8	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal per hektar				
	- Padi	5,02	5,85	5,85	
	- Jagung	7,23	7,88	7,88	
3.9	Nilai Tukar Petani	-	104,3	104,3	
3.10	Cakupan Bina kelompok tani	78	80	80	
3.11	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)				
	- Padi (%)	0,20	0,22	0,22	
	- Jagung (%)	0,00	0,18	0,18	
3.12	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura(cabai dan bawang merah)				
	- cabe	17,43	12,06	17,75	Menyesuaikan Capaian 2024
	- bawang merah	8,75	9,58	9,58	
3.13	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan				
	- Kopi	1,01	21	21	
	- tebu	1,03	14	14	
	- kulit manis	1,01	2,9	2,9	
3.14	Persentase peningkatan produktivitas peternakan	8,72	11,15	11,15	
3.15	Persentase luas areal pengendalian	**90,00**	94	94	

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2024	Targe2025		Keterangan
			Awal	Perubahan	
	dan penanggulangan bencanan OPT				
3.16	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular	4,53	20,68	20,68	
4.	Urusan Perdagangan				
4.1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	19,76	22	22	
4.2	persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	**100**	100	100	
4.3	Persentase penanganan pengaduan konsumen	80	100	100	
4.4	persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	**27,41**	37,68	37,68	
5.	Urusan Perindustrian				
5.1	Laju pertumbuhan pelaku usaha IKM	1,75	2,25	2,25	
5.2	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	10,33	11,53	11,53	
5.3	Pertumbuhan industri	1,75	2,21	2,21	
5.4	Cakupan Bina kelompok pengrajin	11	12	12	
5.5	Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan non migas	31076	31.280	31.280	
5.6	Nilai investasi sektor industri pengolahan non migas (milyar)	9,45	2,0	9,5	Menyesuaikan Capaian 2024
IV	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**				
4.1	Persentase regulasi daerah yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan.	**100**	100	100	
4.2	Persentase fasilitasi penyelesaian tapal batas kabupten	n.a	100	100	
4.3	Persentase OPD dengan nilai SAKIP baik	100	83	100	
4.4	Persentase OPD dengan nilai IRB baik		90	100	
4.5.	Persentase OPD yang memiliki nilai organisasi perangkat daerah baik	n.a	85	85	
4.6	Persentase fasilitasi kegiatan DPRD	100	100	100	
V	**Unsur Penunjang urusan Pemerintahan**				
5.1.	Perencanaan				
5.1.1	Indeks Kualitas Perencanaan Daerah	87,59	100	100	
5.1.2	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	**72,58**	100	100	
5.1.3	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	88,89	100	100	
5.1.4	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100,00	100	100	
5.2.	Keuangan				
5.2.1	Deviasi realisasi belanja terhadap total belanja	0,19	5,2	5,2	
5.2.2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	14,54	0	10,00	Menyesuaikan Capaian 2024
5.2.3	Kesesuaian pengalokasian anggaran	90,00	98	98	
5.2.4	Kemandirian Keuangan Daerah	10,78	13,1	13,1	

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2024	Targe2025		Keterangan
			Awal	Perubahan	
	(persen)				
5.2.5	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	
5.2.6	Manajemen Aset	baik	Baik	Baik	
5.2.7	Rasio belanja pegawai di luar guru dan nakes	19,20	0,38	0,38	
5.3.	Kepegawaian				
5.3.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	255	0,35	0,35	
5.3.2	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	27	0,75	0,75	
5.3.3	Rasio Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	40	3,7	3,7	
5.4.	Penelitian dan Pengembangan				
5.4.1	Indeks Kinerja Kelitbangan	95	80	96	Menyesuaikan Capaian 2024
5.4.2	Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan bahan rekomendsi perumusan kebijakan	100	100	100	
5.4.3	Persentase unit kerja yang memiliki inovasi (perangkat daerah, kecamatan, puskesmas sebanyak 66 unit kerja)	89	61	90	Menyesuaikan Capaian 2024
VI.	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**				
6.1.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	Level 3 (3,152)	Level 3 (3,9) (terdefenisi)	Level 3 (3,9) (terdefenisi)	
6.2.	Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP)	Level 3 (3,00) (terdefinisi)	Level 3 (3,01) (infrastruktur)	Level 3 (3,01) (infrastruktur)	
6.3.	Jumlah unit kerja yang ditetapkan menjadi WBK dan WBBM	2opd	4	4	
6.4.	Indeks Persepsi Anti Korupsi	n.a	85	85	
VII	**Unsur Kewilayahan**				
7.1	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan		87,00	87,00	
VIII	**Unsur Pemerintahan Umum**				
8.1.	Persentase potensi ATHG/konfliks sosial yang dapat diatasi.	100	100	100	
IX.	**Transparansi dan Partisipasi Publik**				
9.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (persen)	**100**	100	100	
9.2	Akses public terhadap keuangan daerah (persen)	20	100	100	

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025

Perubahan asumsi KUA berupa pelampauan ataupun tidak tercapainya target Pendapatan Daerah tahun 2025, mendasari adanya kebijakan perubahan perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 dilakukan dengan memperhatikan realisasi Anggaran Semester 1 tahun 2025, berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2025 serta memperhatikan hal-hal Adanya penyesuaian target pendapatan berdasarkan regulasi dari Pemerintah Pusat yaitu Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian rincian Alokasi TKD menurut Provinsi/Kab/Kota dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 dimana Kabupaten Agam mengalami pemotongan penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik Irigasi sebanyak Rp. 6.142.428.000,- dan Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp.31.337.163.000 Sehingga terjadi pengurangan dana transfer ke Kabupaten Agam sebesar Rp. 37.479.591.000,-, serta Adanya penyesuaian target Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Trasfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Berdasarkan kondisi tersebut, Pendapatan Daerah tahun 2025 yang sebelumnya ditargetkan sebesar Rp.1.573.318.043.171,- turun sebesar 1,51% atau sebesar Rp.23.696.380.276,- sehingga menjadi sebesar Rp.1.549.621.662.895,-. dengan rincian sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel IV.I
Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025

Uraian	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025	Selisih RKPD 2025 - P RKPD 2025	Selisih APBD 2025 - P RKPD 2025
PENDAPATAN	1.567.538.115.863	1.573.318.043.171	1.549.621.662.895,00	17.422.269.840,00	-23.696.380.276,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	202.336.420.911	207.819.815.431,00	197.337.113.658,00	4.463.867.125,00	-10.482.701.773,00
Pajak Daerah	92.045.000.000	91.558.350.536,00	81.395.879.626,00	10.649.120.374,00	-10.162.470.910,00
Retribusi Daerah	85.984.282.473	94.860.860.488,00	96.102.388.532,00	-10.188.304.707,00	1.241.528.044,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.000.000.000	14.000.000.000,00	13.807.124.697,00	192.875.303,00	-192.875.303,00
Lain-lain PAD yang Sah	10.307.138.438	7.400.604.407,00	6.031.720.803,00	4.348.276.283,00	-1.368.883.604,00
PENDAPATAN TRANSFER	1.364.451.694.952	1.365.498.227.740	1.352.284.549.237	12.208.402.715,00	13.213.678.503,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.301.971.075.212	1.303.017.608.000	1.263.938.865.949,00	38.073.466.263,00	39.119.999.051,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	62.480.619.740	62.480.619.740,00	88.345.683.288,00	-25.865.063.548,00	-25.865.063.548,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	750.000.000	-	-	750.000.000,00	-
Pendapatan Hibah	750.000.000	-	-	750.000.000,00	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan					

Pada APBD awal tahun 2025 target Pendapatan Asli Daerah dianggarkan disebesar Rp.207.819.815.431,00, dengan strategi pencapaian melalui penguatan SDM dan kelembagaan, peningkatan kualitas layanan, penggalian potensi sumber pendapatan baru, digitalisasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah serta peningkatan pengawasan dan pengendalian. Realisasi PAD sampai dengan semester I tahun 2025 sebesar Rp. 97.202.375.667,76 atau 46,77%.

Pada perubahan tahun 2025 PAD diproyeksi mengalami penurunan dari APBD Awal Tahun 2025 yaitu sebesar Rp.197.337.113.658,00 Penurunan target PAD pada perubahan tahun 2025 ini dikarenakan beberapa hal, yaitu adanya kebijakan pemerintah pusat terkait dengan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mendukung program tiga juta rumah. Hal ini sangat mempengaruhi realisasi penerimaan BPHTB dan retribusi PBG, karena sampai dengan semester I, realisasi BPHTB baru mencapai 32,77%.

Selain itu kemampuan membayar pajak bagi masyarakat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berdampak pada penerimaan pajak daerah, seperti penerimaan pajak hotel, pajak makanan dan minuman dan PBB P2.

Penerimaan pajak sarang burung wallet sampai dengan semester I masih 0 (nol) atau belum terealisasi, hal ini masih memerlukan upaya lebih dalam mengoptimalkan edukasi dan pengawasan kepada Wajib Pajak.

Dari jenis penerimaan retribusi daerah, retribusi pelayanan kesehatan masih mendominasi dibanding jenis retribusi daerah yang lain dengan realisasi sampai dengan semester I sebesar 51,16%.

Penerimaan PAD dari jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang sudah terealisasi sebesar Rp.13.807.124.697,00 atau 98,62% pada bulan Maret 2025 yang bersumber dari deviden atas penyertaan modal Pemerintah Kabupatan Agam pada Bank Nagari.

Jenis Penerimaan PAD dari Lain Lain PAD yang Sah terealisasi sampai dengan semester I sebesar Rp.3.539.801.542,76 atau 47,83%. terdapat beberapa sub jenis yang capaian realisasinya masih rendah yaitu Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan (sewa BMD), Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak Daerah dan Denda Retribusi Daerah serta Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan.

Berdasarkan realisasi sampai dengan semester I tahun 2025 dan perhitungan serta pertimbangan kondisi penerimaan sampai dengan akhir tahun 2025, maka direncanakan target PAD pada perubahan tahun 2025 diproyeksi sebesar Rp.197.337.113.658,00 .

Sedangkan untuk Pendapatan Transfer diproyeksi sebesar Rp.1.352.284.549.237,- berkurang sebesar Rp.13.213.678.503,- dibanding APBD Awal sebesar Rp.1.365.498.227.740,-. Pengurangan ataupun penyesuaian ini disebabkan antara lain :

a) Adanya efisiensi penerimaan Dana Alokasi Khusus Bidang Irigasi dan Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya Bidang Infrastruktur yang telah disesuaikan pada pergeseran anggaran sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Agam Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Agam Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang merupakan tindaklanjut dari Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian rincian Alokasi TKD menurut Provinsi/Kab/Kota dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 dimana Kabupaten Agam mengalami efisiensi sebesar Rp.37.479.591.000,- dengan rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Irigasi sebanyak Rp.6.142.428.000,- dan Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum sebesar 31.337.163.000,-.

b) Adanya pengurangan penerimaan DAK Non Fisik sebesar Rp.5.157.278.051,- yang berasal dari pengurangan penerimaan DAK Non Fisik bidang Operasional Pelenggaraan Museum Taman Budaya sebesar Rp.22.554.745,-, pengurangan penerimaan Bantuan Operasional Kesehatan sebesar Rp.2.237.876.211,-, Pengurangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas sebesar Rp.2.375.719.357,-, Pengurangan Bantuan Operasional KB sebesar Rp.506.982.076,-, dan pengurangan penerimaan Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar Rp.14.145.662,-.

   Pengurangan pengalokasian target DAK Non Fisik sebesar Rp.5.157.278.051,- tersebut karena penerimaannya telah dikonversi oleh Pemerintah Pusat melalui SiLPA DAK Non Fisik Tahun 2024, artinya penerimaan DAK Non Fisik Tahun 2025 secara target penerimaan tidak mengalami pengurangan, namun sumber penerimaannya sebesar Rp.5.157.278.051,- melalui SiLPA Tahun 2024.

c) Penambahan target penerimaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS Kinerja) sebesar Rp.3.165.750.000,- sesuai keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 30/P/2025 tanggal 16 Mei 2025 tentang Penerima Dana Dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kinerja, Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja, Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kinerja Tahun Anggaran 2025.

d) Penerimaan Kurang Salur DBH Pajak Provinsi Tahun 2024 sebesar Rp.27.071.506.726,- sesuai Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/008/PPD-BAPENDA/2025 Tanggal 5 Maret 2025 tentang Rincian Kekurangan Salur DBH Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota Sumatera Barat Tahun 2024.

e) Penyesuaian target penerimaan DBH Pajak Provinsi Tahun 2025 sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-1301-2025 tanggal 15 April 2025 tentang Perkiraan Dana Bagi Hasil DBH Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota Sesumatera Barat Tahun 2025 yaitu target penerimaan pajak rokok tahun 2025 bertambah sebesar Rp.2.266.624.047,-, dan penerimaan pajak pemanfaatan air permukaan bertambah sebesar Rp.172.083.616,- dan pengurangan target PBB-KB sebesar Rp.3.645.150.841,-, dibanding target penerimaan Pajak Provinsi pada APBD Awal tahun 2025.

f) Adanya penyesuaian target penerimaan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Tahun 2025 dari semula Rp.222.151.000,- bertambah sebesar Rp.41.257.000,- sehingga menjadi Rp.263.408.000,- sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-223-2025 tanggal 11 April 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 903-782-2024 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Perubahan asumsi KUA berupa pelampauan dan tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah dan Perubahan sumber penggunaan pembiayaan daerah, mendasari adanya kebijakan perubahan rencana belanja Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya kebijakan perubahan rencana belanja Tahun Anggaran 2025 juga dilakukan untuk menindaklanjuti:

a) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efesiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efesiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun 2025, bahwa Pemerintah Daerah untuk melakukan efesiensi belanja APBD Tahun 2025.

b) Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian rincian Alokasi TKD menurut Provinsi/Kab/Kota dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. APBD Kabupaten Agam mengalami efisiensi penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik Irigasi sebesar Rp. 6.142.428.000,- dan Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum sebesar 31.337.163.000 Sehingga terjadi pengurangan dana transfer ke Kabupaten Agam sebesar Rp. 37.479.591.000,

c) Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan pendanaan sampai dengan Triwulan I tahun 2025 yang mengharuskan dilakukannya perubahan atas dokumen RKPD Tahun 2025, menyesuaikan dengan efisiensi anggaran yang dilaksanakan sebelumnya.

d) Capaian beberapa target Indikator Kinerja Daerah Tahun 2023 sudah melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2025, sehingga perlu dilakukan penyesuaian target di perubahan RKPD Tahun 2025.

e) Hasil Audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 yaitu ditetapkannya Sisa Lebih Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 39.578.636.185,73 sehingga terdapat selisih dari yang diperkirakan dalam APBD Awal tahun 2025 yaitu berkurang sebesar Rp.18.397.774.021,27 dari proyeksi semula sebesar Rp.57.976.410.207,69 sehingga perlu dilakukan penyesuaian pada Perubahan KUA Tahun 2025

Berdasarkan kondisi tersebut maka pada Rancangan Perubahan KUA Tahun anggarkan 2025 belanja daerah yang sebelumnya di anggarkan sebesar Rp.1.630.294.453.378,69,- bertambah sebesar 1,28% atau sebesar Rp.20.934.249.602,17,- menjadi sebesar Rp.1.651.228.702.980,86,-. sedangkan realisasi belanja semester 1 Tahun 2025 sebesar 40,50% atau sebesar Rp.660.188.079.310,95 dengan rincian sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini :

TABEL V.1

Rincian Belanja Daerah Semester I Tahun Anggaran 2025

No	URAIAN	APBD TA 2025	REALISASI SEMESTER 1	%
5	BELANJA	1.630.294.453.378,69	660.188.079.310,95	40,50
5.1	BELANJA OPERASI	1.331.857.645.462,69	546.261.613.099,95	41,02
5.1.01	Belanja Pegawai	871.809.842.034,44	416.841.552.276,12	47,81
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	434.606.305.616,25	124.134.260.823,83	28,56
5.1.05	Belanja Hibah	18.010.497.812,00	5.285.800.000,00	29,35
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.431.000.000,00	-	-
	BELANJA MODAL	91.618.407.935,00	6.696.011.127,00	7,31
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.995.338.637,00	5.377.895.106,00	19,21
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.532.774.646,00	22.343.967,00	0,26
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	49.385.900.139,00	196.105.254,00	0,40
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.479.394.513,00	1.099.666.800,00	20,07
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	225.000.000,00		-
	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.400.000.000,00	644.153.705,00	7,67
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.400.000.000,00	644.153.705,00	7,67
	BELANJA TRANSFER	198.418.399.981,00	106.586.301.379,00	53,72
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6.443.749.581,00	4.893.254.979,00	75,94
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	191.974.650.400,00	101.693.046.400,00	52,97

Kebijakan belanja Pemerintah Kabupaten Agam tahun 2025 pada masing-masing jenis belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Kebijakan yang dilakukan untuk masing-masing jenis belanja meliputi pemberian kompensasi kepada pegawai ASN berdasarkan kemampuan/prestasi, beban kerja, dan kondisi kerja pegawai dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Penganggaran dan pelaksanaan Belanja Operasi dilakukan secara cermat melalui koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah (PD). Pemberian hibah dilakukan kepada organisasi kemasyarakatan maupun partai politik yang memenuhi persyaratan serta peraturan perundangundangan yang berlaku.
2. Belanja Modal mencakup setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang dikelompokkan berdasarkan jenisnya antara lain belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya. Penganggaran dan pelaksanaan Belanja Modal dilakukan melalui koodinasi dengan PD

terkait untuk meningkatkan akurasi penganggaran dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku.

3. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat diantaranya keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah nagari. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau pada OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah. Belanja transfer terdiri atas :
   - Belanja Bagi Hasil Pendapatan Pajak dan Retribusi daerah kabupaten kepada pemerintahan nagari.

     kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintah Nagari paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2025, dengan ketentuan; besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Nagari dianggarkan secara bruto; penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
   - Belanja Bantuan Keuangan

     Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain seperti keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Pada APBD Tahun Anggaran Tahun 2025 belanja dianggarkan sebesar Rp.1.630.294.453.378,69,- dan pada Perubahan KUA Tahun 2025 ini belanja daerah direncanakan sebesar Rp.1.651.228.702.980,86,- atau bertambah sebesar Rp.20.934.249.602,17,- Dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp.1.352.142.668.284,07. mengalami penambahan sebesar Rp.20.285.022.821,38 atau 1,52% dari semula sebesar Rp.1.331.857.645.463,- dengan rincian sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp.906.908.271.326,00,- mengalami penambahan sebesar Rp.35.098.429.292,06,- atau 4,03% dari semula sebesar Rp.871.809.842.034,44-. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara umum penyesuaian anggaran belanja pegawai dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Realisasi belanja pegawai bulan Juli Tahun 2025; dan
2) Pemuttakhiran data pegawai setelah penerimaan CPNS dan PPPK Formasi Tahun 2024 yang telah diserahkan SK Pengangkatannya pada Bulan Juli 2025.

Pada APBD Awal tahun 2025, Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru dan belanja pegawai BLUD dari semula sebesar 41,07% atau sebesar Rp.669.640.003.158,- dari total belanja daerah sebesar Rp.1.630.294.453.379,-, belum sesuai yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025 yang mana belanja pegawai dialokasikan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah. Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022, secara bertahap Pemerintah daerah akan berupaya memenuhi ketentuan ini sampai dengan tahun 2027.

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa direncanakan sebesar Rp.419.002.899.145,57,- mengalami penurunan sebesar Rp.15.603.406.470,68,- atau 3,59% dari semula sebesar Rp.434.606.305.616,25-. Secara umum penyesuaian terhadap belanja barang dan jasa adalah menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBDN dan APBD Tahun 2025 dan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja dalam APBD, bahwa Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk membatasi Belanja untuk Kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi dan

seminar/FGD, mengurangi Belanja Perjalanan Dinas sebesar 50%, menfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik dan melakukan penyesuain belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah.

Disamping itu penyesuaian belanja barang dan jasa adalah untuk menindaklanjuti arah kebijakan, visi, misi, dan prioritas pembangunan dengan kepemimpinan kepala daerah yang baru dilantik. Perubahan ini dimaksudkan agar dokumen perencanaan mampu mengakomodasi program prioritas kepala daerah terpilih yang telah ditetapkan dalam dokumen visi dan misi saat pencalonan, sehingga terdapat keselarasan antara dokumen perencanaan daerah dengan agenda strategis Kepala Daerah

c) Belanja Hibah

Belanja Hibah direncanakan sebesar Rp.18.800.497.812,- mengalami penambahan sebesar Rp.790.000.000,- atau 4,39% dari semula sebesar Rp.18.010.497.812,-. Sebagian besar Belanja Hibah ini antara lain:

1) Hibah Kepada Lembaga yang bersifat Nirlaba antara lain Hibah Kepada Mesjid, Pramuka dan KORMI.

2) Hibah Kepada Lembaga Bersifat Sukarela yaitu Hibah kepada KONI dan PMI.

3) Hibah BOS Satuan Pendidikan Negeri yang bersumber dari DAK Non Fisik dan Hibah kepada Satuan Pendidikan Swasta yang bersumber dari DAK Non Fisik

4) Hibah kepada Partai Politik

d) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial direncanakan sebesar Rp.7.431.000.000,- tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan APBD Awal Tahun 2025. Pengalokasikan belanja bantuan sosial ini antara lain untuk mengalokasikan belanja beasiswa Agam Maju dan Rehabilitasi rumah tidak layak huni.

2. Belanja Modal

Belanja Modal direncanakan sebesar Rp.90.647.118.332,79,- mengalami penurunan sebesar Rp.971.289.602,21 dari semula sebesar sebesar Rp.91.618.407.935,-.

Terhadap Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian rincian Alokasi TKD menurut Provinsi/Kab/Kota dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, dimana Kabupaten Agam mengalami

efisiensi yaitu Dana Alokasi Khusus Fisik Irigasi sebesar Rp.6.142.428.000,- dan Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum sebesar 31.337.163.000,- Sehingga terjadi pengurangan dana transfer ke Kabupaten Agam sebesar Rp. 37.479.591.000,-,

Untuk Efisiensi Dana Alokasi Khusus Fisik Irigasi sebesar Rp.6.142.428.000,- telah dilakukan pada Pergeseran Anggaran Tahun 2025, dan untuk Efisiensi Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum sebesar 31.337.163.000,- akan dibahas lebih lanjut antara TAPD dengan Banggar DPRD, adapun kegiatan yang bersumber dari DAU yang ditentukan Bidang Pekerjaan Umum ini sebagian untuk mendanai P1 Musrembang dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp.8.400.000.000,- tidak mengalami perubahan jika dibandikan dengan alokasi anggaran APBD Awal Tahun 2025. Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan, antara lain pengeluaran untuk keadaan darurat dan pengeluaran untuk keperluan mendesak.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer terdiri atas belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Belanja bagi hasil direncanakan sebesar Rp.11.197.982.264,- bertambah sebesar Rp.4.754.232.683,- dari semula sebesar Rp.6.443.749.581,- penambahan ini adalah untuk mengakomodir utang Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Nagari Tahun 2023. Sedangkan belanja bantuan keuangan direncanakan sebesar Rp.188.840.934.100,- berkurang sebesar Rp.3.133.716.300,- dari semula sebesar Rp.191.974.650.400,- pengurangan ini adalah penyesuaian penghitungan besaran alokasi dana transfer ke nagari yaitu 10% dari DAU dan DBH yang dianggarkan dalam APBD Tahun 2025, yang mana penerimaan DAU Tahun 2025 mengalami pengurangan sebesar Rp.31.337.163.000,- yaitu pengurangan target penerimaan DAU yang ditentukan bidang pekerjaan umum sebagaimana diatur dalam KMK Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian rincian Alokasi TKD menurut Provinsi/Kab/Kota dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.

Gambaran umum Belanja daerah pada perubahan KUA tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel V.2
Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025

Uraian	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025	Selisih RKPD 2025 - P RKPD 2025	Selisih APBD 2025 - P RKPD 2025
BELANJA	1.534.849.060.997,00	1.630.294.453.378,69	1.651.228.702.980,86	-116.280.111.397	20.934.249.602,17
Belanja Operasi	1.210.859.160.870,00	1.331.857.645.462,69	1.352.142.668.284,07	-141.701.221.165	20.285.022.821,38
Belanja Pegawai	750.224.137.285,00	871.809.842.034,44	906.908.271.326,00	-156.478.287.549	35.098.429.292,06
Belanja Barang dan Jasa	388.176.440.957,00	434.606.305.616,25	419.002.899.145,57	-31.450.018.432	-15.603.406.470,68
Belanja Hibah	66.843.582.628,00	18.010.497.812,00	18.800.497.812,00	48.043.084.816	790.000.000
Belanja Bantuan Sosial	5.615.000.000,00	7.431.000.000,00	7.431.000.000,00	-1.816.000.000	0
Belanja Modal	139.007.975.111,00	91.618.407.935,00	90.647.118.332,79	48.878.101.116	-971.289.602,21
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.175.409.504,00	27.995.338.637,00	34.310.564.230,18	-4.528.714.389	6.315.225.593,18
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.250.418.079,00	8.532.774.646,00	12.805.481.775,00	11.384.890.304	4.272.707.129,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	79.222.627.499,00	49.385.900.139,00	37.761.351.368,00	41.461.276.131	-11.624.548.771
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.488.641.329,00	5.479.394.513,00	5.544.720.959,61	-85.229.631	65.326.446,61
Belanja Modal Aset Lainnya	870.878.700,00	225.000.000,00	225.000.000,00	645.878.700	-
Belanja Tidak Terduga	3.157.818.416,00	8.400.000.000,00	8.400.000.000,00	-5.242.181.584	-
Belanja Tidak Terduga	3.157.818.416,00	8.400.000.000,00	8.400.000.000,00	-5.242.181.584	-
Belanja Transfer	181.824.106.600,00	198.418.399.981,00	200.038.916.364,00	-18.214.809.764	1.620.516.383
Belanja Bagi Hasil	-	6.443.749.581,00	11.197.982.264,00	-11.197.982.264	4.754.232.683
Belanja Bantuan Keuangan	181.824.106.600,00	191.974.650.400,00	188.840.934.100,00	-7.016.827.500	-3.133.716.300

Berdasarkan proyeksi pendapatan daerah pada Perubahan RKPD tahun 2025 sebesar Rp.1.549.621.662.895,00 dan rencana perubahan belanja daerah tahun 2025 sebesar Rp.1.651.228.702.980,86 dan Proyeksi Pembiayaan Netto sebesar Rp.38.578.636.185,73 maka Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2025 defisit sebesar Rp.63.028.403.900,13**,-.**

Tabel V.2
Rincian Perhitungan Defisit Perubahan KUA-PPAS
Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Jumlah	
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	197.337.113.658,00	
4.2	Pendapatan Transfer	1.352.284.549.237,00	
	JUMLAH PENDAPATAN		1.549.621.662.895,00
5	BELANJA DAERAH		1.651.228.702.980,86
	Surplus/ (Defisit)		-101.607.040.085,86
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	39.578.636.185,73	
6.1.01	Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	39.578.636.185,73	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	39.578.636.185,73	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	
6.1.01	Penyertaan Modal	1.000.000.000,00	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	
	Pembiayaan NETTO (6.1 dikurangi 6.2)		38.578.636.185,73
	Defisit KUA PPAS Tahun 2025		-63.028.403.900,13

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Berdasarkan Ketentuan Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah. Pada tahun 2025 pembiyaan daerah sebesar Rp.57.976.410.207,69,- yang diproyeksi bersumber dari SiLPA kas daerah sebesar Rp.47.976.410.207,69,- dan SiLPA BLUD RSUD sebesar Rp.10.000.000.000,- dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.1.000.000.000,- yang direncanakan untuk penyertaan modal daerah pada BUMD, sehingga pembiayaan netto pada APBD Awal tahun 2025 sebesar Rp.56.976.410.207,69,-.

Selanjutnya Berdasarkan Audit BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024, bahwa hasil Audit SiLPA sebesar Rp.39.578.636.185.73,- terdiri atas SiLPA pada Kas Daerah dan SiLPA diluar Kas Daerah. SiLPA didalam Kas Daerah sesuai hasil Audit BPK tersebut adalah sebesar Rp.3.372.232.042,59,- yang bersumber dari Dana DAU yang ditentukan dan SiLPA yang berada diluar Kas Daerah adalah sebesar Rp.36.206.404.143,14,- yang terdiri dari Sisa BLUD Puskesmas sebesar Rp.7.522.721.413,-, Sisa BLUD RSUD sebesar Rp.25.763.324.039,53,- Sisa Bantuan Operasional Sekolah PAUD (BOSP) adalah sebesar Rp.466.489.210,61,-, Sisa BOK Puskesmas sebesar Rp.2.375.719.357,-, dan Kas pada Bendahara pengeluaran sebesar Rp.78.059.123,- dan di bendahara penerimaan sebesar Rp.91.000.000,-.

Disamping itu berdasarkan hasil audit BPK tersebut diatas, juga terdapat SiLPA yang terpakai yang harus dianggarkan kembali sebesar Rp.32.142.736.931,- yang terdiri dari :

1	DAU Tambahan Dana THR dan Gaji ke-13 Guru Tahun 2024	23.377.628.000
2	Sisa DBH CHT Tahun 2024	205.599.669
3	Sisa DBH Sawit Tahun 2023 dan Tahun 2024	1.512.962.770
4	Sisa Tambahan Penghasilan Guru s/d Tahun 2024	877.822.004
5	Sisa Tunjangan Profesi Guru s/d Tahun 2024	2.453.410.144
6	Sisa DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal s/d Tahun 2024	295.906.200
7	Sisa DAK Non Fisik Pelayanan Kepariwisataan s/d Tahun 2024	45.825.100
8	Sisa DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi s/d Tahun 2024	86.107.500
9	Sisa DAK Non Fisik Ketahanan Pangan dan Pertanian s/d Tahun 2024	40.571.246

10	Sisa DAK Fisik Tahun 2024	1.107.056.997
11	DAU Tambahan Gaji ke-13 Guru Tahun 2023	2.139.847.300

Berdasarkan hal tersebut diatas arah kebijakan penerimaan pembiayaan pada Perubahan KUA Tahun 2025 adalah menyesuaikan penerimaan pembiayaan dengan hasil Audit BPK RI terhadap LKPD Tahun 2024 yaitu SiLPA sebesar Rp.39.578.636.185.73,- yang semula diproyeksi sebesar Rp.57.976.410.207,69,- atau berkurang sebesar Rp.18.397.774.021,96,- disamping itu juga mengalokasikan kembali SiLPA yang terpakai sebesar Rp.32.142.736.931,-.

Selanjutnya Kebijakan pengeluaran pembiayaan Tahun 2025 diproyeksikan tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar Rp.1.000.000.000,- yaitu berupa Pernyertaan Modal kepada BUMD, berikut disajikan rencana perubahan pembiayaan daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 :

Tabel VI.1
Rincain Proyeksi Pembiayaan Perubahan Tahun 2025

URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025	Selisih RKPD 2025 - P RKPD 2025	Selisih APBD 2025 - P RKPD 2025
Penerimaan Pembiayaan	74.061.191.866	57.976.410.207	39.578.636.185	34.482.555.681	-18.397.774.022
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	74.061.191.866	57.976.410.207	39.578.636.185	34.482.555.681	-18.397.774.022
Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000	1.000.000.000,	1.000.000.000	4.000.000.000	-
Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000	1.000.000.000,	1.000.000.000	4.000.000.000	-
Pembiayaan Neto	69.061.191.866	56.976.410.207	38.578.636.185	30.482.555.681	-18.397.774.022

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sesuai dengan proyeksi ekonomi makro Pemerintah Kabupaten Agam, maka Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2025 diarahkan pada upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah dengan mengarahkan seluruh potensi dan sumber daya pemerintah daerah guna mencapai target penerimaan pendapatan asli daerah yang optimal. Untuk mencapai kondisi pembangunan ekonomi sebagaimana yang diproyeksikan pada tahun 2025, maka upaya mengoptimalkan pendapatan daerah, diarahkan pada:

1. Penguatan SDM dan kelembagaan : Pelatihan dan pengembangan SDM, Sedangkan untuk kelembagaan melalui penguatan struktur, sistem, prosedur koordinasi dan kolaborasi
2. Peningkatan Kualitas Layanan : Peningkatan kualitas layanan kepada wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan dan mengurangi tunggakan.
3. Penggalian potensi sumber-sumber pendapatan baru : intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta Pendataan yang Komprehensif, untuk memastikan seluruh potensi pajak terdaftar dan tertagih, serta optimalisasi pengelolaan aset daerah.
4. Digitalisasi pengelolaan pajak daerah : digitalisasi pelayanan, pelaporan dan pembayaran untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi kebocoran
5. Pengawasan dan pengendalian yang efektif : Melalui pengawasan internal, eksternal, monitoring dan evaluasi. Untuk pengendalian dilakukan melalui pengendalian proses, keuangan dan pengendalian resiko.

7.2. Strategi Pencapaian Pendapatan Transfer

Strategi Pencapaian Pendapatan Transfer Tahun 2025 yaitu dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI terkait petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dana transfer Pemerintah Pusat dan pihak-pihak terkait sebagai upaya realisasi penerimaan dana transfer yang sesuai dengan schedule pencairan yang telah ditetapkan. Sedangkan strategi pencapaian dari sisi teknis, Pemerintah Daerah terus berupaya meningkatkan capaian perolehan nilai SAKIP, peningkatan indeks inovasi daerah, perolehan prestasi dalam kompetisi pelayanan publik dan pengoptimakan Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD).

Untuk pengoptimalan pencapaian pendapatan dari DAK Fisik maka strategi yang dilakukan yaitu pengusulan kegiatan melalui aplikasi krisna yang dilakukan berdasarkan penetapan lokasi prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sedangkan untuk DAK Non Fisik upaya optimalisasi pendapatannya melalui penigkatan akurasi data teknis yang dijadikan sebagai rujukan dalam penetapan alokasi oleh pemerintah pusat.

Selanjutnya upaya optimalisasi bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKK) Provinsi, dilakukan dengan mengusulkan proposal yang didukung oleh berbagai informasi terkait dengan kondisi daerah.

BAB VIII

PENUTUP

Berdasarkan Kesepakatan pada pembahasan rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2025 Tanggal 6 s/d 7 Agustus 2025 antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran DPRD, disepakati sebagai berikut:

1. Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 menjadi sebesar Rp.205.074.782.496,-
2. Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Agam yang sudah disepakati pada saat pembahasan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati.
3. Penambahan anggaran belanja Sekretariat DPRD sesuai Kesepakatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Banggar DPRD ditindaklanjuti pada Perubahan KUA-PPAS Tahun 2025.
4. Pelaksanaan kegiatan yang berasal dari P1 Musrembang Tahun 2025 ditunda, dan dianggarkan kembali pada Tahun 2026 dengan tetap mempedomani ketentuan terkait Perencanaan dan Penganggaran Daerah Tahun 2026, sedangkan kegiatan yang berasal dari P1 Musrembang Tahun 2024 anggarannya tetap diakomodir pada APBD Tahun Anggaran 2025.
5. Penyesuaian anggaran belanja OPD hasil pembahasan, ditindaklanjuti pada Perubahan KUA-PPAS Tahun 2025.

Demikian Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Tahun Anggaran 2025 ini dibuat, sebagai tindaklanjut dari kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam.

Selanjutnya Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Tahun Anggaran 2025 ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Lubuk Basung, Agustus 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM	BUPATI AGAM
ILHAM KETUA	BENNI WARLIS
HENRIZAL WAKIL KETUA	
MUHAMMAD RISMAN WAKIL KETUA	
ADERIA WAKIL KETUA	